



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# **PENYEBAB KETERLAMBATAN FORMULASI KEBIJAKAN PERDA PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PARIAMAN**

## **TESIS**



**ULYA FITRI**  
**0821202057**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 12 Nopember 1985 di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sebagai anak kedua dari lima bersaudara yaitu Isra Reslina, S. Farm. Apt (kakak), Rasyidah Mustika, S. ST (Adik), Syarifa Rahmi (Adik), Ridha Dian Lestari (Adik), Istri dari Zaimul Ihsan, S. SI, Lc, Ibu dari Fairuz Dhiyaul Husni. Ayah bernama Dr Mustafa Zen, S. IP, M. Pd. dan Ibu bernama Dra. Asni Juwita. Penulis menamatkan SD pada tahun 2000 di SDN 04Pauh Kurai Taji, SLTPN 3 Pariaman tahun 2002 dan SLTA pada tahun 2004 di MAN Koto Baru Padang Panjang. Penulis memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang pada bulan Desember tahun 2008.

Sejak tahun 2009 peneliti meneruskan pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Andalas di Padang. Pada tahun 2009 dipercaya menjadi menjabat sebagai Pembantu Ketua I di STIA BNM Pariaman, dari tahun 2010 hingga sekarang penulis dipercaya menjadi Ketua STIA BNM Pariaman.

Padang, 20 Desember 2011

Penulis

Ulya Fitri



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi tesis yang saya tulis dengan judul:

**"PENYEBAB KETERLAMBATAN FORMULASI KEBIJAKAN PERDA  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH (BPBD) KOTA PARIAMAN"**

Adalah hasil kerja/karya saya sendiri dan bukan hasil jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.

Padang, 20 Desember 2011

Yang Membuat Pernyataan,

ULYA FITRI  
No.BP. 0821202057



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Alhamdulillahirabbil'alam*, segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita, termasuk dimudahkannya penyelesaian Tesis **“Penyebab Keterlambatan Formulasi Kebijakan Perda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD) Kota Pariaman”** ini. Shalawat dan salam semoga tercurahlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada program Pascasarjana Universitas Andalas. Banyak Pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir H. Novirman Jamarun, M.Sc, selaku Direktur Program Pascasarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Afrizal M.A, selaku Ketua Komisi Pembimbing.
3. Ibu Dr. Sri Zul Chairiyah M.A, selaku Ketua Prodi Pemusatan Polokda, sekaligus sebagai Anggota Komisi Pembimbing.
4. Bapak Dr. Azwar M.Si, Roni Eka Putra S.IP M.PA, Drs. Edi Indrizal M.Si, selaku Komisi Penguji.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Pascasarjana Universitas Andalas.
6. Suami, Orang Tua dan Keluarga, serta seluruh keluarga besar STIA BNM Pariaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dengan segala keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan dan penyempurnakan tesis ini.

Akhirnya penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya, Semoga Allah SWT senantiasa menerima amal ibadah kita dan selalu memberi petunjuk kepada kita semua. Amin.

Pariaman, 20 Januari 2012

Penulis



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
 BAB I PENDAHULUAN .....	 1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
 BAB II KERANGKA TEORITIS .....	 11
2.1 Konsep Kebijakan Publik .....	11
2.2 Proses Kebijakan Publik .....	12
2.3 Formulasi Kebijakan Publik .....	15
2.4 Konsep Model Kebijakan Publik .....	21
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	 28
3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian .....	28
3.2 Lokasi Penelitian .....	28
3.3 Peranan Peneliti .....	29
3.4 Unit Analisis .....	29
3.5 Teknik Pemilihan Informan .....	29
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	30
3.7 Uji Pembuktian (Triangulasi) Data .....	31
3.8 Analisis Data .....	33
3.9 Proses Penelitian .....	33
 BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....	 36
4.1 Letak Geografis Kota Pariaman .....	36
4.2 Batas-Batas Wilayah .....	35
4.3 Jumlah Kecamatan .....	37
4.4 Jumlah Kepadatan Penduduk .....	37
4.5 Struktur Bangunan (Rumah Penduduk) di Kota Pariaman .....	37
4.6 Data Kerusakan Gempa 30 September 2009 .....	38
 BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....	 43
5.1 Proses Formulasi Kebijakan .....	43
A. Proses Input .....	43
B. Sistem Politik .....	55
- Penyerahan draft Ranperda oleh eksekutif ke legislative .....	55
- Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda oleh Walikota .....	55
- Pembentukan Pansus I .....	56

- Studi Banding Pansus I Ke Kota Yogyakarta dan Kab.Sleman .....	56
- Konsultasi Pansus I dengan BPBD Propinsi Sumbar dan BPBD Kota Padang .....	57
- Konsultasi Pansus I ke BNPB dan Departemen Sosial RI .....	58
- Konsultasi Pansus I dengan Pemda Padang Pariaman .....	60
- Rapat Pansus dengan Eksekutif .....	60
- Hearing antara Pansus I dengan instansi eksekutif .....	65
- Rapat akhir Pansus I .....	68
- Laporan Pansus I Kepada Fraksi-Fraksi mengenai pembahasan Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman .....	68
C. Output .....	74
5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Pembentukan BPBD Kota Pariaman .....	75
BAB VI PENUTUP .....	82
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	83
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kepadatan Penduduk.....	35
Tabel 2. Struktur Bangunan.....	35
Tabel 3. Data Kerusakan Rumah Penduduk.....	36
Tabel 4. Data Kerusakan Rumah Sekolah.....	36
Tabel 5. Data Kerusakan Ruang Kelas.....	37
Tabel 6. Data Kerusakan Fasilitas Kesehatan.....	37
Tabel 7. Data Kerusakan Rumah Ibadah.....	38
Tabel 8. Data Kerusakan Fasilitas Pemerintah.....	40



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jalur Tektonik Di Indonesia.....	2
Gambar 2 Proses Kebijakan Publik .....	13





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar teritorialnya merupakan daerah maritim yang dianugerahi begitu banyak kekayaan alam dari sabang sampai merauke. Berbagai bentuk kekayaan alam diantaranya, minyak bumi, gas, batu bara, semen, emas, dan berbagai hasil hutan, lengkap dengan flora dan fauna yang ada di dalamnya. Keindahan alam juga tidak kalah menariknya, jejeran pulau-pulau dan deretan gunung-gunung semakin menjadi daya tarik, sehingga tidak sedikit *tourist* asing yang menghabiskan waktu hanya untuk sekedar menikmati indahnya alam Indonesia.

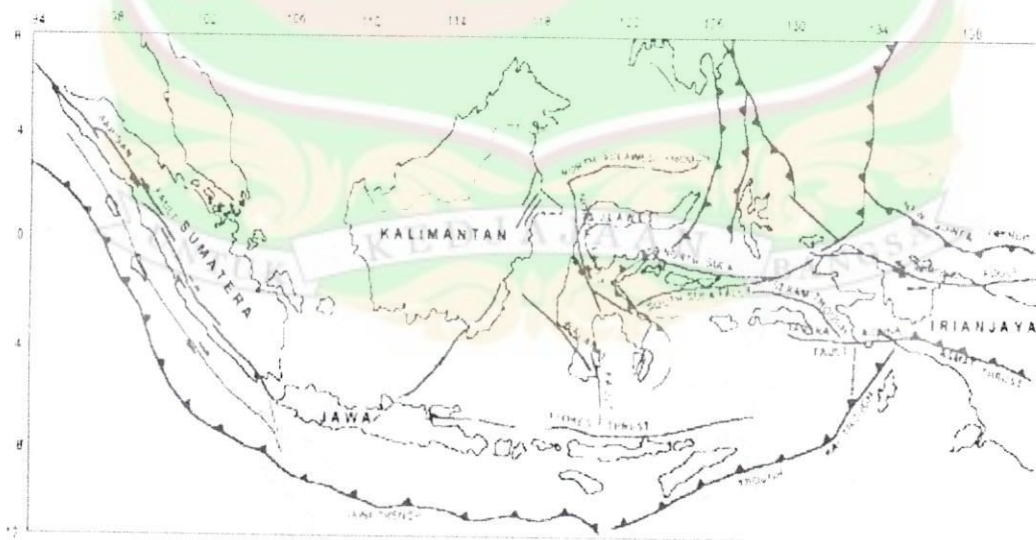
Melimpahnya kekayaan alam bumi Indonesia serta keanekaragaman hayatinya, tidak serta merta selalu menguntungkan masyarakat Indonesia, karena sepanjang 1.200 km dari barat sampai timur Indonesia ternyata berbatasan dengan tiga lempengan besar dunia yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik, yang akan berpotensi memicu berbagai kejadian alam yang cukup besar. Di samping itu, Indonesia juga berada pada pertemuan tiga sistem pegunungan (*Alpine Sunda*, *Circum Pasific*, dan *Circum Australia*, dimana terdapat 452 gunung berapi, lebih kurang 128 di antaranya tergolong aktif. Kenyataan ini membuat Indonesia menjadi negara rawan bencana khususnya gempa, gunung

meletus, dan longsor.<sup>1</sup> Kerusakan alam akibat ulah manusia semakin menambah besar ancaman bencana di Indonesia seperti banjir dan tanah longsor, di samping bencana lainnya yang terjadi secara alamiah.

Gempa bumi merupakan salah satu dari bencana alam yang paling banyak menyita perhatian dunia, hal ini disebabkan karena dampak bencana gempa yang banyak menimbulkan korban jiwa dan kerusakan materil akibat gempa. Terlebih jika gempa disertai tsunami, dalam hitungan menit daerah bisa tersapu gelombang tsunami. Jenis bencana ini tidak bisa diprediksi dimana, kapan, dan berapa besar kekuatan gempa bumi yang bakal terjadi. Mau atau tidak mau, siap atau tidak siap kondisi ini memaksa kita harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan dengan bencana.

Gambar 1

Jalur Tektonik di Indonesia



Sumber: Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

<sup>1</sup> Hadi Purnomo-Ronny Sugiantoro, 2010. *Manajemen Bencana Respon dan Tindakan terhadap Bencana*, Yogyakarta: Media Pressindo hal.31

Peta di atas memberikan gambaran bahwa hampir semua pulau di Indonesia dilalui jalur tektonik yang rawan potensi bencana. Desember 2004, ujung Pulau Sumatera diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan hampir delapan skala richter. Tsunami pun menyapu bumi Aceh, dimana gerakan tektonik terus bergerak dengan skala yang berbeda. Satu persatu kota dari ujung Sumatera terus diguncang gempa, mulai dari Kutacane di Aceh Tenggara, lalu turun ke Bahorok di Kabupaten Langkat serta Mandailing Natal di Sumatera Utara. Patahan yang terus bergerak ini telah diprediksi dari awal akan menimbulkan gempa dahsyat di Sumatera Barat.<sup>2</sup>

Melihat tingginya potensi bencana disekitaran Pulau Sumatra, menuntut semua pihak baik itu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, sekolah, dan NGO (*Non Government Organisation*) untuk bersama-sama mengambil langkah cepat dan tepat berupa langkah antisipasi bencana agar kerugian dan efek bencana tersebut dapat diminimalisir. Semua orang akan berharap untuk hidup terbebas dari bencana, akan tetapi kita menyadari bahwa bencana alam tidak dapat dihilangkan atau dilenyapkan, tapi bisa kita antisipasi dengan siap siaga bencana.

Sesuai prediksi ahli sebelumnya ternyata memang benar terjadi gempa dahsyat di Sumatra Barat, tepatnya tanggal 30 September 2009 yang berpusat di  $0.72^{\circ}$  LS dan  $99.94^{\circ}$  BT dengan kedalaman 110 km pesisir pantai Pariaman. Jumlah kerugian diperkirakan berupa 249.833 unit rumah rusak, 114.797 unit diantaranya mengalami rusak berat, roboh atau rata dengan tanah. Sementara

---

<sup>2</sup> Erwan Agus Purwanto. 2006. *Memahami Kompleksitas Manajemen Bencana, dalam Manajemen Bencana: Belajar dari Pengalaman Aceh*



sebanyak 67.198 unit mengalami rusak sedang dan 67.838 unit rusak ringan. Fasilitas lain yang mengalami kerusakan yakni, perkantoran sebanyak 442 unit, sarana prasarana pendidikan 4.748, kesehatan 153, jembatan 68, pasar 58 dan tempat ibadah 2.851. Total kerugian materi akibat bencana yang juga merenggut 1.195 jiwa ini ditaksir mencapai Rp21,58 triliun.<sup>3</sup>

Besarnya potensi bencana di Indonesia khususnya Sumatra Barat menuntut pemerintah untuk melahirkan kebijakan-kebijakan terkait penanggulangan bencana. Terlebih pada daerah rawan bencana, sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia salah satu bentuknya yaitu perlindungan terhadap bahaya bencana.

Beragam bencana yang terjadi di Indonesia mulai dari banjir bandang, angin puting beliung, abrasi, gunung meletus, tanah longsor sampai gempa dan tsunami akhirnya direspon pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Undang-Undang tersebut pasal 83 pada ketentuan penutup disebutkan bahwa enam bulan pasca ditetapkan undang-undang ini harus telah terbentuk Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) di tingkat nasional, dan paling lambat satu tahun telah terbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kota/kabupaten.

Aturan di atas berarti bahwa satu tahun pasca disahkan undang-undang tersebut pemerintah daerah baik itu ditingkat propinsi maupun ditingkat

---

<sup>3</sup> Disadur dari: [www. BNPB.com](http://www.BNPB.com). *Dámpak Bencana Gempa Sumatera Barat*,2009



kabupaten/kota harus telah membentuk sebuah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang berwenang dan fokus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Realisasi dari undang-undang ini sedikit terkendala karena penjelasan undang-undang berupa Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah tidak ada penjelasan terkait bencana dan proses pembentukan BNPB/BPBD. Selanjutnya (PP) No 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana baru keluar pada 21 Oktober 2008.

BPBD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang menjadi koordinator dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana di masing-masing daerah. Besarnya potensi bencana, menuntut daerah-daerah khususnya daerah rawan bencana untuk sesegera mungkin membentuk BPBD, tidak terkecuali Kota Pariaman.

Pariaman sebagai daerah yang menjadi pusat gempa 30 September 2009 sudah seharusnya merealisasikan tuntutan undang-undang tersebut, hal ini disebabkan karena pengalaman bencana yang pernah terjadi dan besarnya efek bencana yang dirasakan masyarakat ketika terjadi bencana. Di samping itu peristiwa dan ancaman yang terus dirasakan masyarakat hendaklah menjadi pelajaran penting baik itu oleh pemerintah maupun masyarakat sendiri, agar bagaimana ke depannya harus ada sikap siaga bencana sehingga bencana bisa dikenali dan dikelola. Oleh sebab itu pembentukan BPBD dianggap sebagai langkah tepat bagaimana sebuah badan tersebut nantinya bisa berfungsi secara

baik dalam mengkoordinir penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di Kota Pariaman itu sendiri.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemda Provinsi Sumatra Barat bahwa potensi bencana gempa bumi merupakan resiko bencana dengan jumlah korban yang timbul amat besar dan kemungkinan terjadinya bencana tersebut amat tinggi, sehingga bencana gempa bumi tergolong pada tingkat resiko I, dengan kebutuhan mendesak untuk segera ditangani. Sedangkan bencana tanah longsor masuk pada kategori tingkat resiko II dan banjir pada tingkat resiko III.<sup>4</sup>

Pulau Sumatra dan pulau-pulau sekitarnya khususnya wilayah Kota Pariaman merupakan daerah yang memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap gempa bumi dan tsunami karena terletak berdekatan dengan dua lempeng patahan bumi yaitu Australia dan Eurasia. Kota Pariaman merupakan wilayah yang berdekatan dengan lempeng Eurasia yang memiliki dua patahan yaitu patahan Sumatra disepanjang Bukit Barisan, dan patahan Mentawai diantara pesisir barat dengan Kepulauan Mentawai. Berdasarkan penelitian ahli geologi Indonesia bahwa dibagian barat Kepulauan Mentawai antara batas lempeng Eurasia dan Australia, dimana lempeng Australia bergerak mendorong lempeng Eurasia dengan kecepatan + 7 cm/tahun ke arah timur laut, sehingga sewaktu-waktu akan menimbulkan patahan besar yang menyebabkan gempa<sup>5</sup>. Melihat kondisi di atas, Pariaman sebagai daerah yang memiliki potensi bencana gempa bumi harus lebih memprioritaskan untuk tanggap bencana dan menyegerakan pembentukan badan penanggulangan bencana di daerah tersebut.

<sup>4</sup> Disadur dari: [www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8850](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8850)

<sup>5</sup> Pemerintah Daerah Kota Pariaman. *Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2010*. Bagian Hukum dan Organisasi Kota Pariaman.hal.26



Berdasarkan pantauan penulis, sebelumnya yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang terjadi di Kota Pariaman adalah tim Satlak PB (Satuan pelaksana Penanggulangan Bencana) yang diangkat berdasarkan SK Walikota Pariaman. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.83 tahun 2005 tentang Bakornas PB (Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana) pasal 16 disebutkan bahwa untuk melaksanakan penanganan bencana dan kedaruratan di daerah dapat dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut dengan Satlak PB di tingkat Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Bupati/Walikota.

Kota Pariaman telah membentuk tim Satlak PB sejak tahun 2007 yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing SKPD dan ormas terkait seperti : Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP, Kesbangpol linmas, Pemadam Kebakaran, Dandim, Kapolres, PMI, MUI, LSM dan sebagainya yang di ketuai langsung oleh Walikota. Pada tahun 2007 beranggotakan 39 orang, tahun 2008 berjumlah 41 orang dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 45 orang<sup>6</sup>. Dengan jumlah personel yang tidak sedikit, tentunya akan berimbas kepada jumlah anggaran yang juga tidak sedikit. Hal itu tidak terlalu menjadi persoalan ketika tim ini benar-benar bekerja sesuai dengan program kerjanya.

---

<sup>6</sup> Dikutip dari SK Walikota Pariaman terkait pengangkatan anggota Satlak PB Kota Pariaman

Akan tetapi berdasarkan pantauan penulis yang dikuatkan dengan hasil wawancara dengan Kasi Linmas (Azwir) pada kantor Kesbangpol linmas disebutkan bahwa<sup>7</sup> :

“memang kelemahan tim ini adalah tidak adanya program yang jelas, sehingga tiap ada rapat yang hadir hanya sebagian kecil dari anggota, terlebih ketika kemaren sudah hampir masuk akhir tahun anggaran kami belum ada kegiatan, akhirnya ya dari pada anggaran berbalik ke negara, kita bikin rapat-rapat formalitas saja, sehingga gaji anggota bisa dikeluarkan”.

Pernyataan di atas menjadi bukti bahwa tidak berjalannya fungsi dan tugas Satlak PB sebagaimana mestinya, sehingga tuntutan bagaimana setiap orang bisa sadar akan bencana masih jauh dari yang diharapkan. Sebagai tim yang dibentuk berdasarkan SK Walikota, masing-masing anggota hanya diamanahkan tugas selama satu tahun , sehingga dikhawatirkan masing-masing anggota tidak terlalu fokus dengan tugas dan fungsinya. Di samping itu, banyak sekali SKPD yang terlibat berdampak kepada ketidakjelasan tupoksinya masing-masing.

Buruknya kondisi tersebut menuntut dibentuknya badan yang lebih fokus dan bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di daerah. Pembentukan BPBD sebagaimana yang diamanahkan undang-undang menjadi salah satu alternatifnya. Di samping itu, keberadaan badan ini menaruh harapan baru bagaimana ke depannya masyarakat bisa lebih merasa aman dan siaga ketika bahaya tiba-tiba terjadi. Sesuai dengan tuntutan Undang-Undang No 24 tahun 2007 terkait penanggulangan bencana, Pariaman sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi bencana tertinggi di Sumatra barat sudah semestinya membentuk

---

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan Kasi linmas(Bapak Azwir) di kantor Kesbangpol Linmas Kota Pariaman pada tanggal 12 November 2010 pada pukul:10.00-10.30 WIB



BPBD. Ketika telah dibentuk BPBD di suatu daerah, dengan sendirinya Satkorlak atau Satlak PB harus telah dibubarkan, agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan penanggulangan bencana

Berdasarkan pantauan penulis di lapangan, Kota Pariaman tergolong lambat dalam merumuskan perda pembentukan SOTK BPBD. Hal ini dibuktikan dari baru diserahkannya Draft Ranperda Pembentukan SOTK BPBD oleh pihak eksekutif ke legislatif pada desember 2009, dan ditetapkannya perda pembentukan BPBD pada September 2010. Dengan kata lain waktu yang dibutuhkan dari proses input sampai output Perda No.10 Tahun 2010 tentang pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman menghabiskan waktu lebih kurang dua tahun. Sedangkan kalau dirujuk dari waktu keluarnya undang-undang yang mengamanahkan pembentukan BPBD malah menghabiskan waktu lebih dari 3 tahun sampai lahirnya perda sebagai syarat dibentuknya organisasi dan tata kerja BPBD di Kota Pariaman. Sementara itu, Kota Padang yang mempunyai tingkat kerawanan yang hampir sama dengan Kota Pariaman karena lokasi daerahnya yang berdekatan, sudah membentuk BPBD pada Januari 2009 dengan keluarnya Perda No 18 tahun 2008 pada Desember 2008 silam.

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk melihat proses dan dinamika yang terjadi dalam pembuatan Perda No.10 Tahun 2010 tentang pembentukan SOTK BPBD di Kota Pariaman, dan penyebab keterlambatan pembentukan perda yang dirasa cukup *urgen* harus segera terbentuk di Kota Pariaman sebagai daerah rawan bencana.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya terdapat beberapa permasalahan penelitian antara lain:

1. Bagaimanakah formulasi kebijakan perda No.10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Pariaman?
2. Apa penyebab keterlambatan perumusan perda pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan formulasi kebijakan perda No.10 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Pariaman?
2. Mendeskripsikan dan menganalisis penyebab keterlambatan perumusan Perda Pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Kegunaan secara teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber kajian mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Pariaman.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi Pemerintah Daerah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan masukan serta sumbang saran bagi Pemerintahan Daerah Kota Pariaman

melahirkan atau merumuskan kebijakan-kebijakan daerah salah satunya terkait pembentukan perda SOTK BPBD Kota Pariaman.

## 2. Bagi Ilmu Pengetahuan

Agar dapat menjadi masukan untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman terutama bagi penulis dan juga kepada para praktisi dan *stakeholders* serta memberikan khasanah keilmuan yang luas.

## 3. Bagi Penulis

Menyelesaikan proses pendidikan Strata II di Pascasarjana Universitas Andalas.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan dengan penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zikri Alhadi pada tahun 2011 mahasiswa Pascasarjana Fisipol Universitas Indonesia dengan judul penelitian yaitu upaya BPBD Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.

Penelitian ini mefokuskan untuk melihat bagaimana upaya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat Kota Padang dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami, serta menganalisis faktor-faktor yang digunakan untuk menjelaskan manajemen pra bencana khususnya peningkatan kesiapsiagaan masyarakat serta menjembatani dengan kondisi faktual yang terjadi terkait dengan bencana gempa yang begitu sering terjadi di Kota Padang dan masih terus mengancam hingga saat ini. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk mengetahui upaya BPBD Kota Padang untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa dan tsunami.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe deskriptif. Sumber data primer adalah dari proses wawancara yang dilakukan pada BPBD Kota Padang dan Kogami dengan melibatkan sejumlah jajaran masing-masing institusi tersebut. Sedangkan data sekunder didapat dari buku-buku, selebaran-



selebaran, dan informasi dari internet tentang penanganan bencana gempa dan tsunami dan kajian kesiapsiagaan masyarakat di Kota Padang.

Hasil penelitian di atas adalah BPBD Kota Padang secara garis besar sudah mulai memperhatikan faktor kesiapsiagaan sebagai unsur penting dalam penanggulangan bencana, namun mayoritas program yang dibuat masih pada tahap perencanaan dan belum dimulai. Paradigma penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kota Padang masih banyak terfokus pada tahapan tanggap darurat. Selain itu, masih tergantungnya Pemerintah Kota Padang kepada LSM juga menjadi kendala tersendiri yang memperlihatkan bahwa kapasitas Pemerintah Kota Padang dalam meningkatkan kesiapsiagaan masih perlu ditingkatkan lagi.

Kesulitan yang ditemukan penulis disini adalah tidak menemukan relevansi penelitian terdahulu yang cukup relevan, karena keterbatasan penulis. Adapun perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah kalau penelitian yang dilakukan penulis lebih melihat pada tahapan formulasi kebijakan pembentukan perda SOTK BPBD nya, akan tetapi pada penelitian terdahulu lebih menfokuskan pada tahapan implementasi perda dan bagaimana BPBD tersebut melakukan tupoksinya sesuai perda. Sedangkan kesamaannya adalah sama-sama menyorot tentang BPBD serta penelitian sama-sama berada pada daerah rawan bencana.

Selanjutnya pada bab ini, akan diuraikan beberapa konsep dan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Adapun konsep dan teori yang akan dipaparkan dalam bab II ini antara lain:

## 2.2 Konsep Kebijakan Publik

Beberapa definisi kebijakan publik menurut para ahli:

- a. Thomas R Dye menyatakan bahwa kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda<sup>8</sup>.
- b. Robert Eyestone mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu unit pemerintah dengan lingkungannya<sup>9</sup>.
- c. Carl I.Friedrick mendefenisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.<sup>10</sup>
- d. Menurut Amara Raksasatya menyatakan kebijakan publik dalam kata kebijaksanaan adalah sebagai taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu kebijaksanaan membentuk 3 elemen yaitu:
  1. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai;
  2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan;

---

<sup>8</sup> Riant Nugroho Dwijowijoto, 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo. Hal : 3

<sup>9</sup> Budi Winarno 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo hal 17

<sup>10</sup> . Riant Nugroho.opcit. hal.4

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.<sup>11</sup>

Jadi kebijakan publik menurut pendapat penulis adalah berbagai aktifitas yang dilakukan dan diolah oleh pemerintah dalam rangka memenuhi dan mengatur kebutuhan masyarakat yang sifatnya mengikat.

### 2.3 Proses Kebijakan Publik

Proses Kebijakan Publik adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktifitas politik tersebut nampak dari serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan<sup>12</sup>.

Sedangkan aktifitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, evaluasi kebijakan adalah aktifitas yang lebih bersifat intelektual.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> M. Irfan Islamy.2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara, Hal : 17-18

<sup>12</sup> William N Dunn.2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.hal 22

<sup>13</sup> AG Subagsono.2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.8.



Gambar 2  
Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, 1994:17

Dalam penyusunan agenda kebijakan ada tiga kegiatan yang perlu dilakukan yakni<sup>14</sup>:

1. Membangun persepsi dikalangan *stakeholder* bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai masalah, sebab bisa jadi suatu gejala oleh suatu masyarakat tertentu dianggap masalah, tetapi oleh sebagian masyarakat yang lain bukan dianggap sebagai masalah.
2. Membuat batasan masalah

<sup>14</sup> Ibid hal.11

3. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisir kelompok-kelompok yang ada di masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

Pada tahap formulasi dan legitimasi kebijakan analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif kebijakan, membangun dukungan, dan melakukan negosiasi sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

Ramlan Surbakti mengartikan kebijakan publik sebagai interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu<sup>15</sup>. Orientasi dari sebuah kebijakan hendaknya tetap memprioritaskan untuk kebaikan dari masyarakat di atas kepentingan aktor politik yang bermain dalam pengambilan keputusan. Bentuknya dapat berupa perlindungan terhadap masyarakat. Terkait penanggulangan bencana, sesuai dengan amanah Undang-Undang No.24 Tahun 2007, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana, bentuk tanggung jawab itu dapat diaplikasikan dengan melakukan tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana terhadap masyarakat.

Dari semua tahapan proses kebijakan publik, penulis mencoba menfokuskan penelitian pada proses formulasi kebijakan, hal ini disebabkan

---

<sup>15</sup> Philipus dan Nurul Aini.2004.*Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.95

karena keterlambatan proses pembentukan perda SOTK BPBD berlangsung pada tahapan formulasi, dimana pihak eksekutif dan legislatif yang bertanggung jawab mulai dari penyusunan draft ranperda hingga pengesahan perda menghabiskan waktu yang cukup lama untuk sebuah pembuatan kebijakan publik.

## 2.4 Formulasi Kebijakan Publik

Formulasi kebijakan publik berkaitan dengan pembuatan keputusan. Pengambilan keputusan dalam proses kebijakan publik menurut Ramesh dan Howlet adalah pengambilan keputusan kebijakan publik. Sedangkan menurut Anderson menyatakan perumusan kebijakan menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan, serta siapa yang berpartisipasi dan terlibat, individu atau kelompok.<sup>16</sup>

Menurut Charles Lindblom dan beberapa ahli lain, dalam memahami beberapa proses perumusan kebijakan kita perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau berperan serta dalam proses pembentukan kebijakan baik aktor-aktor yang resmi maupun aktor-aktor yang tidak resmi.<sup>17</sup> Aktor-aktor atau pemeran serta dalam proses pembentukan kebijakan dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Yang termasuk ke dalam pemeran serta resmi adalah birokrasi, presiden(eksekutif), legislatif, dan yudikatif. Sedangkan yang termasuk ke dalam pemeran serta tidak

<sup>16</sup> Sri Suwitri.2008.*Konsep dan dasar kebijakan publik*. Semarang Pusdodakarya Undip Hal:69

<sup>17</sup> Budi Winarno.log cit. Hal :90



resmi meliputi: kelompok-kelompok kepentingan, partai politik, dan warganegara individu<sup>18</sup>.

Dalam pengambilan keputusan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah keputusan/kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan kebijaksanaan, Menurut Nigro dan Nigro ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan<sup>19</sup>:

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar. Artinya adalah administrator sebagai pembuat keputusan harus mempertimbangkan alternatif-alternatif yang akan dipilih berdasarkan tidak hanya berdasarkan rasional semata akan tetapi pembuatan keputusan tidak dapat dipisahkan dari dunia nyata, sehingga adanya tekanan-tekanan dari luar akan berpengaruh terhadap pembuatan keputusan tersebut.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama. Kebiasaan lama suatu organisasi sering diikuti oleh organisasi dan diwarisi oleh para administrator yang baru dan mereka sering segan mengkritik atau menyalahkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berlaku atau dijalankan oleh pendahulunya.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi. Lingkungan sosial para pembuat keputusan juga berpengaruh terhadap pembuatan keputusan.
- d. Adanya pengaruh keadaan masa lalu. Pengalaman latihan dan pengalaman pekerjaan terdahulu berpengaruh pada pembuatan keputusan. Misalnya, sering pembuatan keputusan tidak melimpahkan sebagian wewenang dan

---

<sup>18</sup> Ibid, hal 123

<sup>19</sup> Irfan Islamy .log cit hal 25-26

tanggung jawabnya kepada orang lain karena khawatir wewenang dan tanggung jawab itu disalah gunakan.

Berdasarkan faktor yang dijelaskan diatas bahwa ada berbagai hal yang menyebabkan terhambatnya atau sulitnya merumuskan sebuah kebijakan publik. James Anderson menambah beberapa faktor lain yang merupakan faktor penting dalam perumusan kebijakan publik berupa nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan publik adalah<sup>20</sup> :

a. Nilai-nilai politik

Pembuat keputusan mungkin menilai alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan pada kepentingan partai politik beserta kelompoknya. Keputusan yang dibuat didasarkan pada keuntungan politik yang dipandang sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan partai atau tujuan-tujuan kelompok kepentingan.

b. Nilai-nilai organisasi

Para pembuat keputusan terutama organisasi-organisasi badan administratif mempengaruhi anggotanya dalam membuat keputusan menerima dan bertindak berdasarkan nilai-nilai organisasi yang telah ditentukan.

c. Nilai-nilai pribadi

Usaha untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi, atau kedudukan sejarah seseorang merupakan kriteria yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>20</sup> Budi winarno.op cit.hal.133-135

d. Nilai-nilai kebijakan

Para pembuat keputusan politik mungkin bertindak dengan baik atas dasar persepsi mereka tentang kepentingan masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan mengenai apa yang merupakan publik secara moral atau pantas.

e. Nilai-nilai ideologi

Ideologi merupakan seperangkat nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan yang berhubungan secara logis memberikan gambaran dunia yang disederhanakan dan merupakan pedoman rakyat untuk melakukan tindakan.

Proses perumusan kebijaksanaan negara bukan merupakan perkara mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan banyak faktor dan hal-hal yang mempengaruhi proses perumusan itu. Setiap pembuatan keputusan sangat berbeda dengan keputusan yang lain. Oleh karena itu ada 6 proses yang dilakukan oleh para pembuat keputusan dalam melakukan perumusan kebijakan :

1. Perumusan masalah kebijaksanaan negara

Menurut David G Smith masalah dalam bentuk formal adalah kondisi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan pada rakyat dan dicari cara penanggulangannya, akan tetapi tidak semua permasalahan itu menjadi problema publik. Problema publik adalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan-ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi (privat). Anderson menggambarkan bahwa suatu problema akan menjadi suatu problema kebijakan apabila problema-



problema itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan tindakan terhadap problema itu.

## 2. Penyusunan Agenda Pemerintah

Suatu agenda pemerintah (governmental agenda) tidak seharusnya dipandang sebagai daftar formal dari berbagai masalah-masalah yang harus diperbincangkan oleh pembuat keputusan, tetapi ia semata-mata menggambarkan problema-problema atau isu-isu dimana pembuat keputusan merasa harus memberikan perhatian yang aktif dan serius padanya.

Menurut Cobb dan Elder, ada 3 syarat isu kebijakan dapat masuk dalam agenda pemerintah :

- a) Isu itu memperoleh perhatian yang luas setidaknya dapat menimbulkan kesadaran masyarakat;
- b) Adanya persepsi dan pandangan/pendapat publik yang luas bahwa beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah itu;
- c) Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah itu adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari unit pemerintah untuk memecahkannya.

## 3. Perumusan Usulan Kebijaksanaan Negara

Perumusan usulan kebijaksanaan negara adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah. Ada beberapa kegiatan dibawah ini yang termasuk pada perumusan usulan kebijaksanaan negara adalah <sup>21</sup>:

---

<sup>21</sup> Irfan Islamy op.cit hal 92-94

a. Mengidentifikasi alternatif;

Sebelum pembuat kebijaksanaan merumuskan usulan kebijaksanaan, maka terlebih dahulu harus melakukan identifikasi terhadap alternatif-alternatif untuk kepentingan pemecahan masalah tersebut. Diantara pembuat keputusan ada kemungkinan timbul perbedaan persepsi dalam mengidentifikasi alternatif kebijaksanaan tersebut. Dengan demikian perlu kriteria tertentu untuk melakukan identifikasi secara benar dan jelas.

b. Mendefenisikan dan merumuskan alternatif;

Mendefenisikan dan merumuskan alternatif ini bertujuan agar masing-masing alternatif yang telah dikumpulkan oleh pembuat kebijaksanaan itu nampak jelas pengertiannya.

c. Menilai alternatif;

Menilai alternatif adalah kegiatan pemberian bobot (harga) pada setiap alternatif, sehingga nampak dengan jelas bahwa setiap alternatif mempunyai nilai kebaikan dan kekurangan.

d. Memilih alternatif yang memuaskan;

Proses pemilihan alternatif yang memuaskan bukanlah semata-mata bersifat rasional tetapi juga emosional, artinya bahwa pembuat kebijakan akan menilai alternatif-alternatif kebijaksanaan sebatas kemampuan rasionya dengan mengantisipasi dampak positif dan dampak negatifnya dan ia membuat pilihan alternatif tersebut bukan hanya untuk kepentingan dirinya saja, akan tetapi juga untuk kepentingan pihak-pihak yang akan memperoleh pengaruh, akibat dan konsekuensi dari pilihan itu.

#### 4. Pengesahan Kebijaksanaan Negara

Proses pembuatan keputusan dapat dipandang suatu analisa baik dari sudut proses perseorangan (individual process) yang membuat sekaligus mengesahkan adalah orang itu sendiri, atau proses bersama (collective process) dimana terlibat berbagai macam pihak dari berbagai macam institusi dalam proses pembuatan keputusan dan pengesahannya.

Selain beberapa kegiatan yang dilakukan dalam perumusan suatu kebijakan seperti yang telah diuraikan diatas, menurut Thomas R Dye pengaruh opini massa/pendapat masyarakat terhadap penetapan kebijakan publik sangatlah kecil sebagaimana dijelaskan<sup>22</sup>: *“many surveys reveal the absence of any knowledge or opinion about public policy on the part of masses of citizens. This suggest that mass opinion has little influence over the content of public policy. How can mass opinion be said to affect public policy when there is no mass opinion on a great many policy question? Studies suggesting that the masses of people have little knowledge of, interest in, or opinion about a great many policy question clearly imply that public opinion has little impact, on the content of public policy”*. (Banyak survei yang mengungkapkan ketidaktahuan masyarakat atau ketidak ikutsertaan mereka dalam berpendapat terkait kebijakan publik. Hal ini memberi kesan bahwa opini masa hanya memiliki sedikit sekali pengaruh terhadap konten kebijakan publik. Bagaimana mungkin opini massa ini dianggap mampu mempengaruhi kebijakan publik apabila tidak ada opini masa/pendapat masyarakat dalam banyak pertanyaan terkait penetapan kebijakan itu sendiri.

---

<sup>22</sup> Thomas R.Dye. 1978. *Understanding publik policy*. Prantice- Hall New Jersey. Hal.297



Banyak studi memberi kesan bahwa masyarakat tidak tahu banyak, atau tidak tertarik atau punya pendapat tentang sangat banyak persoalan kebijakan, dimana hal ini jelas secara tidak langsung menyatakan bahwa opini publik hanya berpengaruh kecil terhadap kebijakan publik).

Fakta ini juga ditemukan oleh *Warren E. Miller* dan *Donald Stokes* bahwa sangat kecil sekali korelasi antara pengambilan suara yang dilakukan anggota kongres(DPR) dengan perilaku (keikutsertaan) dari para konstituen/pemilih/masyarakat dalam isu-isu kesejahteraan sosial, dan lebih rendah lagi korelasinya pada isu-isu kebijakan asing. Para anggota *congress* hanya melakukan voting berdasarkan pandangan mayoritas masyarakat terhadap isu-isu yang berkaitan dengan hak sipil.

## 2.5. Model Perumusan Kebijakan Publik<sup>23</sup>

Model digunakan karena adanya eksistensi masalah publik yang kompleks. Model adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan dinyatakan dalam bentuk konsep/teori, diagram, grafik atau persamaan matematis. Thomas R Dye telah mengemukakan tipologi dengan beberapa macam variasi analisa model kebijakan publik antara lain:

### a. Model Elit –Massa: Preferensi Penguasa

Model ini merupakan abstraksi dari suatu pembuatan kebijakan yang identik dengan perspektif elite politik. Lapisan kelompok sosial: 1) lapisan atas dengan jumlah yang sangat kecil (elit) yang selalu mengatur; 2) lapisan bawah

<sup>23</sup> Ibid hal 37-50

(massa) dengan jumlah yang sangat besar sebagai yang diatur. Kebijakan yang diambil mencerminkan kehendak atau nilai-nilai elit yang berkuasa. Isu kebijakan yang akan masuk agenda perumusan kebijakan merupakan kesepakatan dan juga hasil konflik yang terjadi di antara elit politik sendiri.

Masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang seharusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat/administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Elit politik selalu ingin mempertahankan status quo, maka kebijakannya menjadi konservatif. Perubahan kebijakan bersifat inkremental maupun *trial and error* yang hanya mengubah atau memperbaiki kebijakan sebelumnya.

Namun, tidak berarti bahwa kebijakan yang dibuat tidak mementingkan aspirasi masyarakat. Sampai level tertentu, mereka tetap membutuhkan dukungan massa, sehingga mereka juga harus memuaskan sebagian kepentingan masyarakat. Tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat dianggap terletak di tangan elit, bukan di tangan masyarakat. Di Indonesia peranan elit dalam kehidupan politik cukup menonjol. Model ini dapat menjadi salah satu alat analisis untuk mengupas proses perumusan kebijakan.

#### **b. Model Inkremental**

Para pembuat kebijakan pada dasarnya tidak mau melakukan peninjauan secara konsisten terhadap seluruh kebijakan yang dibuatnya dan lebih suka berbuat secara inkremental. Disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Tidak punya waktu, intelektualitas, maupun biaya untuk penelitian terhadap nilai-nilai sosial masyarakat yang merupakan landasan bagi perumusan tujuan kebijakan.
- b. Adanya kekhawatiran tentang bakal munculnya dampak yang tidak diinginkan sebagai akibat dari kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya.
- c. Adanya hasil-hasil program dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan demi kepentingan tertentu.
- d. Menghindari konflik jika harus melakukan proses negosiasi yang melelahkan bagi kebijakan baru.

**c. Group Theory**

Model kelompok merupakan abstraksi dari proses pembuatan kebijakan dimana beberapa kelompok kepentingan berusaha untuk mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dengan demikian pembuatan kebijakan terlihat sebagai upaya untuk menanggapi tuntutan dari berbagai kelompok kepentingan dengan cara bargaining, negosiasi, dan kompromi.

Tuntutan-tuntutan yang saling bersaing di antara kelompok-kelompok yang berpengaruh dikelola. Sebagai hasil persaingan antara berbagai kelompok kepentingan pada hakikatnya adalah keseimbangan yang tercapai dalam pertarungan antar kelompok dalam memperjuangkan kepentingan masing-masing pada suatu waktu. Agar supaya pertarungan ini tidak bersifat merusak, maka sistem politik berkewajiban untuk mengarahkan konflik kelompok.



Kelompok kepentingan yang berpengaruh diharapkan dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan. Tingkat pengaruh kelompok ditentukan oleh jumlah anggota, harta kekayaan, kekuatan organisasi, kepemimpinan, hubungan yang erat dengan para pembuat keputusan, kohesi intern para anggota, dan sebagainya. Model kelompok dapat dipergunakan untuk menganalisis proses pembuatan kebijakan yaitu menelaah kelompok-kelompok apakah yang saling berkompetisi untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan dan siapakah yang memiliki pengaruh paling kuat terhadap keputusan yang dibuat. Pada tingkat implementasi, kompetisi antar kelompok juga merupakan salah satu faktor yang menentukan efektifitas kebijakan dalam mencapai tujuan.

**d. Model Rasional: Kebijakan sebagai Laba Sosial Maksimum**

Kebijakan rasional diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi. Hasil kebijakan harus memberikan keuntungan bagi masyarakat yang telah membayar lebih, dan pemerintah mencegah kebijakan bila biaya melebihi manfaatnya. Banyak kendala rasionalitas, dan model menolong untuk mengidentifikasinya. Karakteristik rasionalitas sangat banyak dan bervariasi. Untuk memilih kebijakan rasional, pembuat kebijakan harus :

- 1) Mengetahui semua keinginan masyarakat dan bobotnya,
- 2) Mengetahui semua alternatif yang tersedia,
- 3) Mengetahui semua konsekuensi alternatif,
- 4) Menghitung rasio pencapaian nilai sosial pada setiap alternatif,
- 5) Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

Asumsi rasionalitas adalah preferensi masyarakat harus dapat diketahui dan dinilai/bobot. Harus diketahui nilai-nilai masyarakat secara komprehensif. Informasi alternatif, kemampuan menghitung secara akurat tentang rasio biaya dan manfaat.

**e. Model Teori Sistem**

Pendekatan sistem diperkenalkan oleh **David Easton** yang melakukan analogi Dengan sistem biologi. Pada dasarnya sistem biologi merupakan proses interaksi antara organisme dengan lingkungannya, yang akhirnya menciptakan kelangsungan dan perubahan hidup yang relatif stabil. Ini kemudian dianalogikan dengan kehidupan sistem politik. Pada dasarnya terdapat 3 komponen utama dalam pendekatan sistem, yaitu: input, proses, output.

Proses tidak berakhir disini karena setiap hasil keputusan yang merupakan keluaran sistem politik akan mempengaruhi lingkungan. Selanjutnya perubahan lingkungan inilah yang selanjutnya akan mempengaruhi demands dan support dari masyarakat. Salah satu kelemahan dari model ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seringkali terjadi bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah memberi kesan telah dilakukannya suatu tindakan, yang sebenarnya hanya untuk memelihara ketenangan/kestabilan. Persoalan yang muncul dari pendekatan ini adalah dalam menentukan tujuan itu sendiri.

Dari beberapa model kebijakan publik yang telah dipaparkan di atas, berdasarkan permasalahan penelitian, adapun model yang diambil untuk menganalisis keterlambatan pembentukan sebuah badan pemerintah adalah model

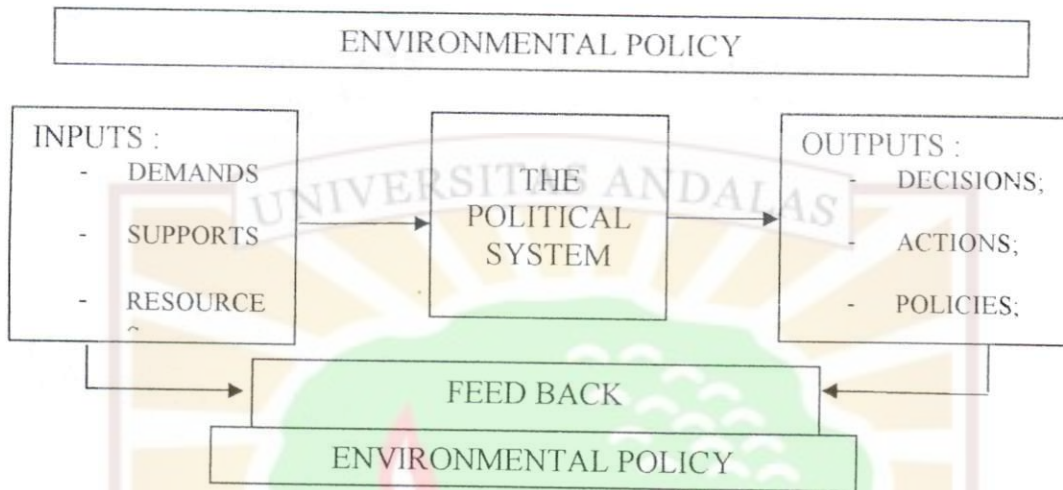
teori sistemnya **Easton**. Karena pada model ini dapat diketahui bagaimana proses formulasi kebijakan, sehingga penulis dapat menganalisis dari setiap tahapan mulai dari proses input, sistem politik hingga terbentuknya sebuah kebijakan. Selanjutnya dari tahapan-tahapan tersebut akan dilakukan analisis penyebab keterlambatan dibentuknya sebuah kebijakan publik.

Model sistem politik ini diangkat oleh David Easton "*The Political System*". Model ini berdasarkan konsep pada teori informasi (*inputs, withinputs, outputs, dan feedback*) dan memandang kebijaksanaan negara sebagai suatu rangkaian sistem politik terhadap kekuatan lingkungan (sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, geografis dan sebagainya).

Konsep sistem politik mempunyai arti sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas-aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi merubah tuntutan (*demand*), dukungan-dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resource*) semua ini adalah masukan-masukan (*inputs*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (*outputs*). Dengan singkat dikatakan bahwa model sistem politik berfungsi merubah inputs menjadi outputs.



Gambar 3  
Model Sistem Politik



Sumber: Buku Irfan Islami "Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara"

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tuntutan-tuntutan (*demands*) timbul apabila individu-individu atau kelompok-kelompok setelah memperoleh respon dari peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang ada dilingkungannya berupaya mempengaruhi proses pembuatan kebijakan negara.

Tuntutan dapat berasal dari dalam sistem politik yaitu birokrasi dan pemerintah atau dapat pula berasal dari luar sistem politik (anggota masyarakat, kelompok kepentingan, dan sebagainya). Dukungan (*supports*) dan sumber-sumber (*resources*) diperlukan untuk menjang tuntutan yang telah dibuat tadi.

Sistem Politik terdiri dari badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif : partai-partai politik, kelompok kepentingan, media massa, anggota masyarakat, tokoh masyarakat, struktur birokrasi, prosedur, mekanisme politik, sikap dan perilaku pembuat keputusan dan sebagainya semuanya berinteraksi dalam suatu kegiatan atau proses untuk mengubah inputs menjadi *outputs*.

Kebijaksanaan negara adalah merupakan hasil (*outputs*) dalam kegiatan politik. Pengalokasian nilai-nilai keputusan pemerintah kepada anggota masyarakat dengan segala konsekwensinya baik berupa dampak positif yang diharapkan maupun dampak negatif. Lingkungan (*Environment*) yang berupa keadaan sosial, politik, kebudayaan, geografi, dan lainnya.<sup>24</sup>

## 2.5 Budaya politik<sup>25</sup>

Menurut Gabriel Almond budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan benegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, **Gabriel Almond** mengklasifikasikan tipe budaya politik sebagai berikut :

- a. **Budaya politik parokial** (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah).

<sup>24</sup> M Irfan Islami. *Ibid* 9. Hal : 45-46

<sup>25</sup> [http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB\\_I\\_BUDAYA\\_POLITIK\\_DI\\_INDONESIA?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB_I_BUDAYA_POLITIK_DI_INDONESIA?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

- b. **Budaya politik kaula** (*subyek political culture*), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relatif maju (baik sosial maupun ekonominya) tetapi masih bersifat pasif.
- c. **Budaya politik partisipan** (*participant political culture*), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut di atas. Tentang klasifikasi budaya politik di dalam masyarakat lebih lanjut adalah sebagai berikut.

No	Budaya Politik	Uraian / Keterangan
1.	Parokial	<p>a. Frekuensi orientasi terhadap sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek <i>input</i>, obyek-obyek <i>output</i>, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati nol.</p> <p>b. Tidak terdapat peran-peran politik yang khusus dalam masyarakat.</p> <p>c. Orientasi parokial menyatakan alpanya harapan-harapan akan perubahan yang komparatif yang diinisiasikan oleh sistem politik.</p> <p>d. Kaum parokial tidak mengharapkan apapun dari sistem politik.</p> <p>e. Parokialisme murni berlangsung dalam sistem tradisional yang lebih sederhana dimana spesialisasi politik berada pada jenjang sangat minim.</p> <p>f. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan normatif dari pada kognitif.</p>



2.	<b>Subyek/Kaula</b>	<p>a. Terdapat frekuensi orientasi politik yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi terhadap obyek-obyek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai partisipan yang aktif mendekati nol.</p> <p>b. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah</p> <p>c. Hubungannya terhadap sistem politik secara umum, dan terhadap output, administratif secara esensial merupakan hubungan yang pasif.</p> <p>d. Sering wujud di dalam masyarakat di mana tidak terdapat struktur <i>input</i> yang terdiferensiansikan.</p> <p>e. Orientasi subyek lebih bersifat afektif dan normatif daripada kognitif.</p>
3.	<b>Partisipan</b>	<p>a. Frekuensi orientasi politik sistem sebagai obyek umum, obyek-obyek <i>input</i>, <i>output</i>, dan pribadi sebagai partisipan aktif mendekati satu.</p> <p>b. Bentuk kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem politik secara komprehensif dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif (aspek <i>input</i> dan <i>output</i> sistem politik)</p> <p>c. Anggota masyarakat partisipatif terhadap obyek politik</p> <p>d. Masyarakat berperan sebagai aktivis.</p>

Kondisi masyarakat dalam *budaya politik partisipan* mengerti bahwa mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki

kemauan untuk mendiskusikan hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik pemerintahan yang tidak *fair*.

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan pemerintah, yang ditunjukkan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu hal secara politik, dan tingkat *efficacy* atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki setidaknya kekuatan politik yang ditunjukkan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (*trust*) antar warga negara. Oleh karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat secara politik.

*Budaya Politik subyek* lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap mengikuti berita-berita politik, tetapi tidak bangga

terhadap sistem politik negaranya dan perasaan komitmen emosionalnya kecil terhadap negara. Mereka akan merasa tidak nyaman bila membicarakan masalah-masalah politik.

Demokrasi sulit untuk berkembang dalam masyarakat dengan budaya politik subyek, karena masing-masing warga negaranya tidak aktif. Perasaan berpengaruh terhadap proses politik muncul bila mereka telah melakukan kontak dengan pejabat lokal. Selain itu mereka juga memiliki kompetensi politik dan keberdayaan politik yang rendah, sehingga sangat sukar untuk mengharapkan partisipasi politik yang tinggi, agar terciptanya mekanisme kontrol terhadap berjalannya sistem politik.

*Budaya Politik parokial* merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, yang didalamnya masyarakat bahkan tidak merasakan bahwa mereka adalah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

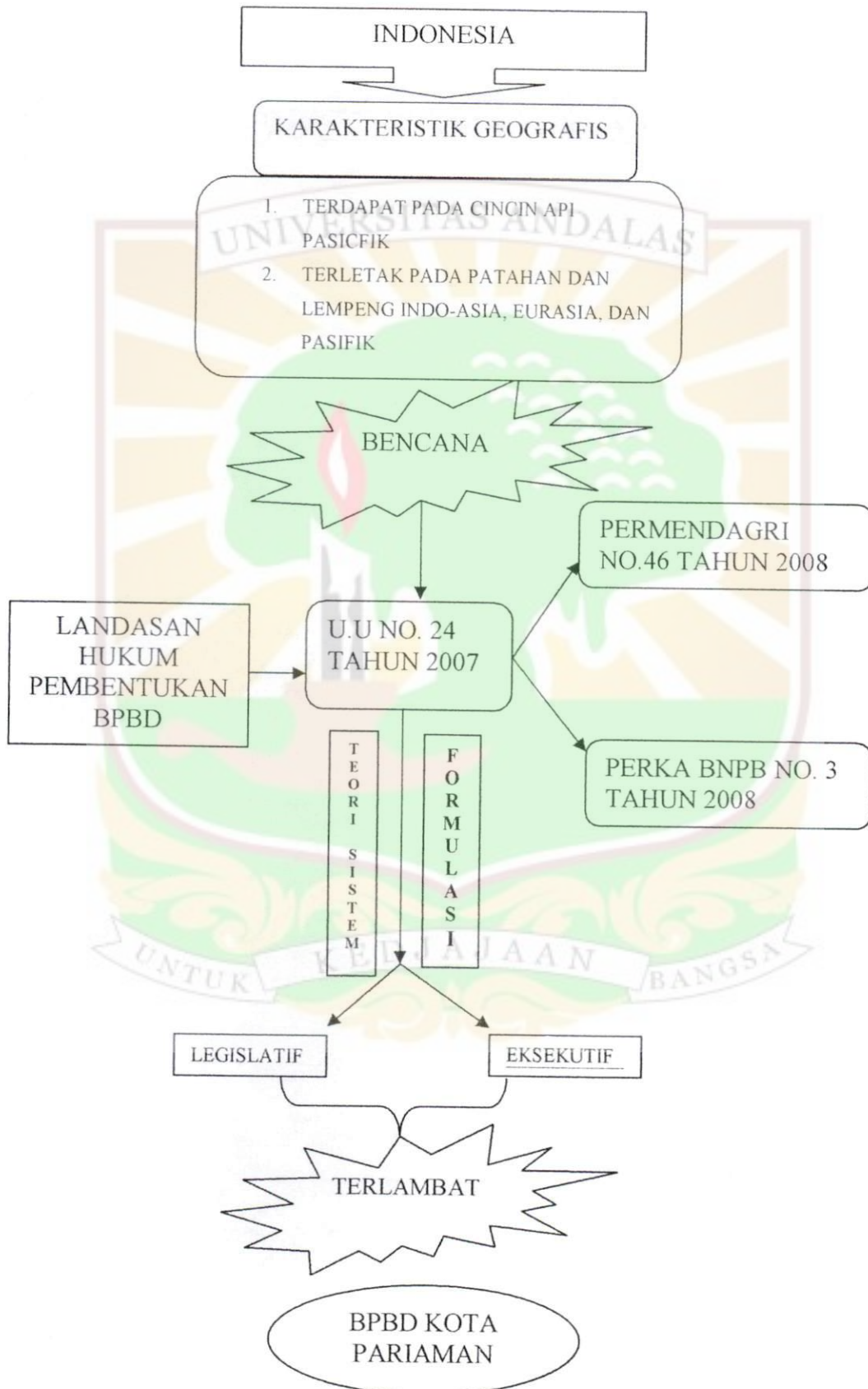
Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi politik. Oleh karena



itu terdapat kesulitan untuk mencoba membangun demokrasi dalam budaya politik parokial, hanya bisa bila terdapat institusi-institusi dan perasaan kewarganegaraan baru. Budaya politik ini bisa ditemukan dalam masyarakat suku-suku di negara-negara belum maju, seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.



## 2.7 Skema Penelitian



Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang mewakili wilayah yang paling rentan terhadap bencana. Hal ini disebabkan karena Indonesia berada pada cincin api pasifik, dimana terdapat 452 gunung berapi 128 diantaranya tergolong aktif. Di samping itu, posisi Indonesia juga berbatasan dengan tiga lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik yang menjadikan Indonesia menjadi negara rawan bencana, khususnya gempa sepanjang jalur 1.200 km dari barat sampai timur Indonesia.

Kondisi di atas menuntut pemerintah untuk melahirkan kebijakan terkait penanggulangan bencana. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait. Lahirnya aturan tersebut, salah satunya mengamanahkan pembentukan badan penanggulangan bencana di daerah satu tahun pasca ditetapkannya undang-undang di atas.

Pariaman sebagai salah satu daerah yang mempunyai tingkat resiko bencana cukup tinggi di Sumatra Barat baru membentuk BPBD di penghujung tahun 2010 berdasarkan perda No.10 tahun 2010 tentang pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman. Keterlambatan ini menarik untuk dicermati dan dilakukan analisis untuk melihat sejauhmana pemerintah daerah ikut andil dalam melindungi masyarakat khususnya di daerah rawan bencana.



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan dan Desain Penelitian

Salah satu bagian penting dalam penelitian adalah menyusun rencana mengenai penelitian yang akan dilakukan. Desain penelitian (*research design*) merupakan sebuah rencana yang memperlihatkan bagaimana peneliti mencapai tujuan yang akan dilakukannya. Dalam penelitian kualitatif, unsur utama dari desain penelitian terdiri dari latar belakang penelitian, tujuan penelitian, setting penelitian, perspektif teoritik dan kajian pustaka, serta metode yang digunakan.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong<sup>26</sup>, metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Alasan pemilihan metode ini karena peneliti ingin melihat secara *real* permasalahan yang terjadi dengan wawancara langsung yang dilakukan kepada informan dan mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan hingga terbentuknya badan penanggulangan bencana daerah di Kota Pariaman.

#### 3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini di Kota Pariaman. Alasan pemilihan lokasi ini adalah karena Pariaman merupakan salah satu daerah yang cukup besar potensi

---

<sup>26</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia, hal 3

bencana, akan tetapi berdasarkan pantauan penulis daerah ini tergolong lambat dalam pembentukan perda SOTK BPBD yang menjadi syarat dibentuknya badan yang bertanggung jawab dalam perlindungan masyarakat terhadap bencana.

### 3.3 Peranan Peneliti

Dalam penelitian ini peranan peneliti ialah sebagai instrument penelitian, artinya ia bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Dengan kata lain peneliti menjadi segalanya dalam proses penelitian. Peneliti akan mengumpulkan informasi dan memaparkannya secara akurat dan berimbang sehingga tidak timbul penafsiran yang negatif terhadap hasil penelitian.

### 3.4 Unit Analisis

Unit analisis merupakan lingkup analisis terhadap sebuah fenomena yang diteliti. Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah Lembaga. Dalam hal ini dilakukan oleh eksekutif dan legislatif Kota Pariaman.

### 3.5. Teknik Pemilihan Informan

Menurut Koentjaraningrat, informan adalah individu atau orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan keterangan dari penelitian<sup>27</sup>. Alasan pemilihan informan adalah aktor-aktor tersebut mengetahui seluk beluk penanggulangan bencana, ikut dalam pengambilan keputusan terkait

---

<sup>27</sup> Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, PT. Gramedia, 1997, hal 162.

penanggulangan bencana, serta masyarakat yang menjadi korban langsung akibat dampak bencana tersebut. Adapun Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Purposive sampling digunakan apabila anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitiannya<sup>28</sup>.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah :

1. Hardje Robert Winerungan selaku Kabid Humas BNPB Jakarta
2. Priyaldi S.Sos dan M.Yasin S.Tp mewakili Tim Pansus 1 DPRD Kota Pariaman
3. Ir. Armen MM selaku Sekretaris Daerah Kota Pariaman
4. Linda Osra SH,MH selaku Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kota Pariaman.
5. Alrinaldi SH,MH selaku Kasubag perundang-undangan Setda Kota Pariaman
6. Riki Zakaria SH selaku Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Pariaman
7. Hanibal selaku Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman.
8. Azwir selaku anggota Tim Satlak PB
9. Syamsuardi S.Ag selaku Staf BKD Kota Pariaman.
10. Muhammad Emirul Bahri MM selaku anggota BPBD Kota Padang

<sup>28</sup> Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara, 1995, hal 47.



### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang hasil penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi penelitian secara lisan dari informan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada informan. Teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara tidak berstruktur. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, namun dalam pikiran peneliti telah tersimpan cadangan masalah atau topik yang akan ditanyakan kepada informan<sup>29</sup>.

Setelah wawancara dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah menuliskan hasil wawancara menjadi catatan yang lebih lengkap dan terurai, dan terakhir dilakukan tindak lanjut dari hasil wawancara yang telah didapat, apakah itu dengan mencari informan baru atau melakukan triangulasi data dari sumber atau informan lain.

#### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel, surat-surat, notulen, dan

---

<sup>29</sup> Sanapiah Faisal, (1999) *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang:YA3 Malang), Hal. 6

lainnya. Menurut Lincoln dan Cuba<sup>30</sup>, sumber data dari dokumen, rekaman dan catatan cukup bermanfaat sebagai sumber data yang stabil dan akurat sebagai cerminan situasi dan kondisi yang sebenarnya, disamping ia telah tersedia sehingga murah memperolehnya.

### 3.7 Uji Pembuktian (Triangulasi) Data

Untuk menjamin keabsahan data, hendaklah data yang telah didapatkan kemudian diuji kembali dengan metode *triangulasi*. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, Crasweel menyebuntukan ada beberapa cara untuk meastikan keabsahan data. Dimana strategi-strategi yang dilakukan adalah:

1. Triangulasi data
2. Pemeriksaan anggota atau informan
3. Pengamatan jangka panjang dan berulang di lokasi penelitian
4. Pemeriksaan rekan sejawat
5. Metode penelitian partisipatif
6. Klasifikasi prasangka peneliti.

Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti tidak mungkin menggunakan semua strategi tersebut, adapun yang peneliti lakukan adalah:

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal. 81

1. Triangulasi data yang digunakan yaitu triangulasi sumber data, yaitu membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Adapun aktor yang dilibatkan adalah anggota BNPB Jakarta sebagai badan yang terkait penanggulangan bencana.

2. Pemeriksaan rekan sejawat

Untuk memperkuat keabsahan data yang ditemukan di lapangan ada baiknya penulis melakukan *cross check* dengan rekan sejawat yaitu dengan anggota BPBD Kota Padang.

### 3.8 Analisis Data

Data yang peneliti dapatkan akan diklasifikasikan untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah ini. Kemudian peneliti akan menganalisanya dengan menggunakan etik dan emik. Dimana etik merupakan pengetahuan peneliti tentang masalah penelitian dan emik merupakan ungkapan yang disampaikan informan berupa pendapat atau informasi menurut pandangannya sendiri<sup>31</sup>.

Dalam upaya memperkaya data dan lebih memahami fenomena sosial yang diteliti, terdapat usaha untuk mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam suatu penelitian (Singarimbun, 1995). Akan tetapi, pada penelitian ini, hanya satu pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.

---

<sup>31</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992, hal 59.



Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada kerangka analisis yang telah disusun.

### 3.9 Proses Penelitian

Proses ini dimulai dengan melakukan survey awal di Kota Pariaman pada bulan September 2010, alasan pemilihan lokasi ini karena ketika itu belum terbentuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD). Padahal undang-undang No.24 tahun 2007 telah mengamanahkan pembentukan BPBD satu tahun pasca ditetapkannya undang-undang.

Pariaman sebagai salah satu daerah yang sering merasakan bencana gempa atau lebih dikenal dengan daerah rawan bencana tergolong lambat dalam membentuk BPBD Kota Pariaman. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui apa penyebab keterlambatan pembentukan badan tersebut.

Awalnya peneliti mewawancarai Sekretaris Pansus I DPRD Kota Pariaman Bapak Priyaldi pada bulan November 2010 selaku pihak yang terlibat langsung dalam pembahasan ranperda BPBD sebagai pihak legislatif. Selanjutnya dilakukan wawancara dengan Bapak Sekda Kota Pariaman Bapak Ir. Armen pada bulan Desember, satu hari sebelum penulis melakukan seminar kolokium di Pascasarjana Unand.

Pada bulan Januari kebetulan penulis sedang ada kegiatan di Jakarta, kesempatan ini juga digunakan untuk melakukan wawancara, dimana saat itu dapat menemui Kabid Humas BNPB yang sedang tidak ada kegiatan keluar. Perawakannya yang ramah sehingga banyak pembahasan tentang penanggulangan

bencana di seluruh Indonesia, beliau juga menawarkan diri untuk di undang jikalau ada pelatihan atau seminar di Kota Pariaman terkait bencana.

Pada bulan Februari, penulis melanjutkan pencarian data dengan menemui Bapak Yasin S.Tp selaku anggota pansus DPRD juga, beliau menjabarkan alasan pemilihan Tipe A oleh legislatif dalam sudut pandang selaku wakil rakyat. Beliau juga menjelaskan bagaimana pandangan yang salah oleh eksekutif terkait efisiensi anggaran.

Penelitian menjadi tidak fokus dan sedikit vakum, karena kesibukan penulis mempersiapkan pernikahan, hingga kehamilan yang cukup membuat penulis tidak bisa fokus untuk melanjutkan penelitian ini. Hampir Sembilan bulan penulis tidak melanjutkan penelitian, hingga di awal Desember 2011 penulis memulai lagi untuk melanjutkan penelitian tersebut.

Awal Desember, penelitian dipusatkan dengan pencarian data ke pihak Eksekutif, dimana anggota yang bertanggungjawab dalam perumusan hingga penyerahan Ranperda adalah bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Kota Pariaman. Saat itu yang ditemui adalah Ibu Linda Osra selaku Kabag Hukum dan Organisasi, Bapak Alrinaldi selaku Kasubag Perundang-undangan, dan Bapak Riki Zakaria selaku Kasubag Bantuan Hukum. Dari situlah penulis mendapat gambaran bagaimana proses yang terjadi dari awal diserahkannya surat edaran untuk membentuk BPBD hingga diserahkannya draft Ranperda oleh Eksekutif ke Legislatif.

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Letak Geografis Kota Pariaman

Kota Pariaman merupakan hamparan dataran rendah yang landai terletak di pantai barat Sumatera dengan ketinggian antara 2 sampai dengan 35 meter di atas permukaan laut. Adapun luas daratan Kota Pariaman adalah seluas 73,36 km<sup>2</sup> dengan panjang pantai  $\pm$  12,7 km serta luas perairan laut 282,69 km<sup>2</sup> dengan 6 buah pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Bando, Pulau Gosong, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso dan Pulau Kasiak.

Kota Pariaman merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang sangat dipengaruhi oleh angin barat dan memiliki bulan kering yang sangat pendek. Curah hujan pertahun mencapai angka sekitar 4.055 mm (2006) dengan lama hari hujan 198 hari. Suhu rata-rata 25,34 °C dengan kelembaban udara rata-rata 85,25 dan kecepatan angin rata-rata 1,80 km/jam<sup>32</sup>.

#### 4.2 Batas-batas Wilayah:

Apabila dilihat dalam peta Kota Pariaman, beberapa daerah di Kota Pariaman berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini disebabkan karena Kota Pariaman merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman tahun 2002 silam.

---

<sup>32</sup> [www.pariaman.go.id](http://www.pariaman.go.id)



Adapun batas-batas wilayah Kota Pariaman adalah sebelah utara Kota Pariaman berbatasan dengan daerah kecamatan V Koto Kp. Dalam Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan pada bagian selatan, Kota Pariaman berbatasan langsung dengan kecamatan Nan Sabaris Kabupaten Padang Pariaman. Sementara di sebelah timur, Kota Pariaman berbatasan dengan kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Hanya pada wilayah barat yang berbatasan dengan Samudra Hindia<sup>33</sup>.

#### **4.3 Jumlah Kecamatan Kota Pariaman**

Kota Pariaman pada awalnya hanya terdiri dari 3(tiga) kecamatan sejak berdirinya Kota Pariaman pada Tahun 2002 yaitu kecamatan Pariaman Utara, kecamatan Pariaman Tengah, dan kecamatan Pariaman Selatan. Namun sejak tahun 2010, kecamatan Pariaman Tengah dimekarkan jadi 2(dua) kecamatan, yaitu kecamatan Pariaman Tengah dan kecamatan Pariaman Timur.

Sehubungan dengan data-data terkait gempa yang terjadi di Kota Pariaman pada September 2009 lalu, penulis hanya menuliskan data 3 kecamatan, dikarenakan daerah Pariaman Timur ketika itu belum terbentuk.

#### **4.4 Demografis Penduduk**

Dari keseluruhan wilayah, Kota Pariaman memiliki 55 (lima puluh lima) desa dengan 16 kelurahan. Dengan rincian, Pariaman Utara sebanyak 21(dua puluh satu) desa, Pariaman Tengah sebanyak 13 (tiga belas) desa, dan Pariaman

<sup>33</sup> *Pariaman dalam Angka 2010*. Bappeda dan BPS Kota Pariaman.hal.6

Selatan sebanyak 21 (dua puluh satu) desa. Sedangkan Pariaman tengah memiliki 16 kelurahan. Terkait adanya istilah desa di sebuah kota otonom memang banyak ditemukan di Kota Pariaman karena tidak semua daerah mau menggunakan istilah kelurahan, hanya daerah di kecamatan Pariaman tengah yang menjadi pusat kota Pariaman menggunakan istilah kelurahan.

Adapun jumlah penduduk yang ada di Kota Pariaman berjumlah 79.360 jiwa. Sebanyak 24.240 jiwa bermukim di Pariaman Utara, 35.270 jiwa bermukim di Pariaman Tengah, sementara di Pariaman Selatan bermukim 19.840 jiwa. Dengan perbandingan yang tipis didapati angka 38.720 jiwa jumlah perempuan dan 40.630 jiwa jumlah laki-laki yang keseluruhannya dikepalai oleh 17.180 kepala keluarga<sup>34</sup>.

#### **4.5 Data Kerusakan Bencana Gempa 30 September 2009**

Efek yang ditimbulkan oleh gempa pada tahun 2009 dapat dikatakan sangat besar, terbukti dari data yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pariaman pada tahun 2010. Ada banyak kerusakan yang diakibatkan gempa tersebut, di antaranya kerusakan rumah penduduk, kerusakan sekolah, kerusakan fasilitas kesehatan, infrastruktur, dan gedung pemerintahan pun tidak sedikit yang rusak berat akibat gempa. Berikut beberapa data terkait kerusakan tersebut.

---

<sup>34</sup> Ibid hal.43

### a. Kerusakan Rumah Penduduk

Sebagian besar rumah penduduk di Kota Pariaman memang sudah dibuat dari beton, namun belum banyak yang menggunakan besi sebagai penguat sehingga ditemukan banyak rumah penduduk yang rata dengan tanah akibat tidak ada penyangga yang memadai.

Tabel 1  
Data Kerusakan Rumah Penduduk

No	Kecamatan	*RR	%	**RS	%	***RB	%	JML
1	PARIAMAN UTARA	982	7.3	1,388	10.4	2,761	20.	5,131
2	PARIAMAN TENGAH	1,200	9.4	1,459	10.9	1,642	12.	4,363
3	PARIAMAN SELATAN	687	5.1	1,113	8.3	2,111	15.	3,911
<b>JUMLAH</b>		<b>2,869</b>	<b>22</b>	<b>3,960</b>	<b>29.6</b>	<b>6,514</b>	<b>48</b>	<b>13,40</b>

Sumber: Presentasi Pemerintah Kota Pariaman, 28 Desember Tahun 2009

Ket:

\*RR : Rusak Ringan

\*\*RS : Rusak Sedang

\*\*\*RB : Rusak Berat

Pemerintah Kota Pariaman mengeluarkan informasi data kerusakan akibat gempa bumi September 2009 setelah melakukan pendataan menyeluruh pada tiga kecamatan dengan menerapkan tiga alat ukur kerusakan, yaitu rusak ringan(RR), rusak sedang(RS) dan rusak berat(RB). Adapun persentase kerusakan keseluruhan yang didapat adalah: RR sebanyak 22%, RS sebanyak 30% dan RB sebanyak 48%.



Dari Total 13.405 rumah yang rusak, Pariaman Utara memiliki angka kerusakan paling banyak yaitu sejumlah 5.131 rumah dengan rincian 982 buah rusak ringan, 1.388 buah rusak biasa, dan 2.761 buah rusak berat. Sementara kecamatan Pariaman tengah mengalami kerusakan sebanyak 4.363 rumah dengan rincian 1.200 buah rusak ringan, 1.459 buah rusak sedang, dan 1.642 buah rusak berat. Adapun kecamatan Pariaman Selatan menderita kerusakan rumah paling sedikit, yaitu sekitar 3.911 rumah dengan rincian 687 buah rusak ringan, 1.113 buah rusak sedang, dan 2.111 buah rusak berat.

#### b. Kerusakan Rumah sekolah.

Rumah sekolah sebagai sarana publik juga mengalami kerusakan yang cukup parah dikarenakan sebagian besar masih dibangun dengan struktur yang belum bisa terbilang lebih aman gempa.

Tabel 2  
Data Kerusakan Rumah Sekolah

No	Kecamatan	RR	%	RS	%	RB	%	JML
1	PARIAMAN UTARA	15	12	11	7	15	21	41
2	PARIAMAN TENGAH	20	16	6	5	26	20	52
3	PARIAMAN SELATAN	11	7	5	4	18	14	34
	<b>JUMLAH</b>	<b>46</b>	<b>36</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>59</b>	<b>47</b>	<b>127</b>

Sumber: Presentasi Pemerintah Kota Pariaman, 28 Desember Tahun 2009

Ket:

RR : Rusak Ringan  
RS : Rusak Sedang  
RB : Rusak Berat

Dari 127 buah sekolah yang dimiliki Kota Pariaman, 36% mengalami rusak ringan (12% di Pariaman Utara, 16 % di Pariaman Tengah, dan 7% di Pariaman Selatan), 17% mengalami rusak sedang (17% di Pariaman Utara, 5% di Pariaman Tengah, dan 4% di Pariaman Selatan) dan 47% mengalami rusak berat (21% di Pariaman Utara, 20% di Pariaman Tengah, dan 14% di Pariaman Selatan).

Adapun angka kerusakan perkecamatan adalah: Pariaman Utara mengalami kerusakan rumah sekolah sebanyak 41 buah, dengan 15 buah rusak ringan, 11 buah rusak sedang, dan 15 buah rusak berat. Sedangkan Pariaman Tengah mengalami kerusakan rumah sekolah sebanyak 52 buah, dengan 20 buah rusak ringan, 6 buah rusak sedang, dan 26 buah rusak berat. Sementara itu Pariaman Selatan mengalami kerusakan rumah sekolah sebanyak 34 buah, dengan 11 buah rusak ringan, 5 buah rusak sedang, dan 18 buah rusak berat.

Tabel 3  
Data Kerusakan Ruang Kelas

<b>KERUSAKAN RUANG KELAS</b>		
a.	Rusak berat	321 kelas
b.	Rusak Sedang	92 kelas
c.	Rusak Ringan	155 kelas
<b>JUMLAH</b>		<b>568 kelas</b>

Sumber: Presentasi Pemerintah Kota Pariaman, 28 Desember Tahun 2009

Adapun kerusakan ruang kelas dengan klasifikasi rusak berat adalah sejumlah 321 kelas dan rusak sedang sejumlah 92 kelas, sementara yang rusak

ringan sejumlah 155 kelas, sehingga total keseluruhan untuk ruang kelas yang rusak di Kota Pariaman adalah sebanyak 568 kelas.

**c. Kerusakan Fasilitas Kesehatan (Puskesmas, Pustu, Polindes, Rumah Dinas Kesehatan)**

Hampir semua fasilitas kesehatan di Kota Pariaman yang terkena efek gempa. Sesuai data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Kota Pariaman pada tahun 2010, Pariaman memiliki 6 buah Puskesmas, 12 Puskesmas Keliling dan 12 Puskesmas Pembantu.

Tabel 4  
Data Kerusakan Fasilitas Kesehatan

No	Kecamatan	RR	%	RS	%	RB	%	JML
1	PARIAMAN UTARA	2	5.5	4	11	9	25	15
2	PARIAMAN TENGAH	2	5.5	4	11	2	5.5	8
3	PARIAMAN SELATAN	7	19	4	11	2	5.5	13
<b>JUMLAH</b>		<b>11</b>	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>36</b>	<b>36</b>

Sumber: Presentasi Pemerintah Kota Pariaman, 28 Desember Tahun 2009

Ket:

RR : Rusak Ringan

RS : Rusak Sedang

RB : Rusak Berat

Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kota Pariaman mencakup Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pustu, Polindes, dan rumah dinas kesehatan. Fasilitas tersebut di atas juga tak luput dari bahaya gempa. Sehingga data kerusakan yang didapat juga menunjukkan angka cukup besar yaitu sejumlah 36



buah untuk seluruh Kota Pariaman. Dengan persentasi 31% rusak ringan, 33% rusak sedang, dan 36% rusak berat.

Di kecamatan Pariaman Utara saja ada 15 fasilitas kesehatan yang rusak, dengan uraian 2 buah rusak ringan, 4 buah rusak sedang, dan 9 buah rusak berat. Sementara di Pariaman Tengah terdapat terdapat 2 buah fasilitas kesehatan yang rusak ringan, 4 buah yang rusak sedang, dan 2 buah yang rusak berat. Adapun di Pariaman Selatan terdapat 7 buah yang rusak ringan, 4 buah yang rusak sedang dan 2 buah yang rusak berat.

#### d. Kerusakan Fasilitas Rumah Ibadah

Jumlah penduduk yang beragama Islam di Kota Pariaman sebanyak 74.856 orang pada tahun 2009. Mereka beribadah di 61 Mesjid dan 197 Mushalla yang tersebar di Kota Pariaman<sup>35</sup>.

Tabel 5  
Data Kerusakan Rumah Ibadah

No	Kecamatan	RR	%	RS	%	RB	%	JML
1	PARIAMAN UTARA	22	10	29	14	21	10	72
2	PARIAMAN TENGAH	37	17	14	7	12	6	63
3	PARIAMAN SELATAN	15	7	32	15	31	15	78
	JUMLAH	74	35	75	35	64	30	213

Sumber: Presentasi Pemerintah Kota Pariaman, 28 Desember Tahun 2009

Ket:

RR : Rusak Ringan

RS : Rusak Sedang

RB : Rusak Berat

<sup>35</sup> BPS Kota Pariaman, *Pariaman dalam Angka*, 2010

Data tabel di atas dapat dilihat bahwa hampir semua rumah ibadah dapat dipastikan mengalami kerusakan akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan yang mencapai 35%, dan kerusakan sedang yang juga mencapai 35%, sedangkan rusak berat hanya 30%.

Dalam jumlah keseluruhan 258 rumah ibadah, di Pariaman Utara rusak sebanyak 72 buah, di Pariaman tengah 63 buah, sedangkan di Pariaman Selatan sebanyak 78 buah rumah ibadah. Adapun 45 buah rumah ibadah tidak terkena dampak gempa.

#### **e. Kerusakan pada Sektor Ekonomi**

Pada sektor ekonomi, Kota Pariaman juga mengalami beberapa kerugian yang diakibatkan gempa tersebut. Salah satunya pada sub sektor pertanian yang mencatat adanya kerusakan jaringan usaha tani seluas 300 Ha. Pada Sub sektor perikanan terdapat tempat pelelangan ikan yang juga mengalami rusak berat sebanyak 2 unit. Sedangkan pangkalan pendaratan ikan rusak sedang 1 unit, sementara tambak ikan rusak sedang seluas 2 Ha.

Adapun pada sub sektor industri, ada beberapa kerusakan yang dilaporkan, pada industri kecil misalnya, terdapat 26 unit rusak berat, dan rusak sedang sebanyak 5 unit, dan rusak ringan 2 unit. Pada sub sektor perdagangan, ada beberapa unit bangunan di pasar yang mengalami kerusakan, diantaranya rusak berat 10 unit, rusak sedang 2 unit, dan rusak ringan 2 unit.

Sementara pada sub sektor pariwisata, ada beberapa bangunan gedung/objek wisata yang rusak berat sebanyak 1 unit, dan rusak sedang 3 unit. Adapun motel/penginapan mengalami kerusakan ringan sebanyak 18 unit. Rumah

makan/ restoran pun tak luput dari kerusakan, terdapat sekitar 20 unit rusak berat, rusak sedang 32 unit, dan rusak ringan 42 unit.

#### **f. Kerusakan pada Sektor Infrastruktur**

Pada sektor transportasi terdapat beberapa kerusakan jalan propinsi dengan status rusak sedang sepanjang 150 meter, dan kerusakan jalan kota yang rusak sedang sepanjang 3.500 meter. Adapun kerusakan jembatan sebanyak 1 unit rusak berat, dan rusak ringan sebanyak 12 unit. Kerusakan Terminal juga terdapat rusak ringan sebanyak 1 unit.

Pada sub sektor sumber daya air, terdapat beberapa irigasi teknis yang rusak berat yaitu sepanjang 275 meter, dan rusak sedang sepanjang 100 meter, dan rusak ringan 2.750 meter. Drainase kota Pariaman juga mengalami rusak berat sepanjang 160 meter, dan rusak sedang sepanjang 850 meter.

#### **g. Kerusakan Fasilitas Pemerintahan (Kantor)**

Tabel 6  
Data Kerusakan Fasilitas Pemerintah

No	Kecamatan	RR	%	RS	%	RB	%	JML
1	PARIAMAN UTARA	2	2.9	5	7.1	11	16	18
2	PARIAMAN TENGAH	5	7.1	19	27	16	23	40
3	PARIAMAN SELATAN	2	2.9	2	2.9	8	11	12
	<b>JUMLAH</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>26</b>	<b>37</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>70</b>

Sumber: Presentasi Pemerintah Kota Pariaman, 28 Desember Tahun 2009



Ket:

RR : Rusak Ringan

RS : Rusak Sedang

RB : Rusak Berat

Tabel ini menjelaskan data kerusakan fasilitas pemerintahan yang juga cukup signifikan jumlahnya. Secara umum hanya 13% bangunan yang rusak ringan, sementara 37% rusak sedang dan 50% rusak berat. Dari total 70 bangunan pemerintah yang terdata mengalami kerusakan, 18 buah berada di daerah Pariaman Utara, 40 buah berada di daerah Pariaman Tengah, dan 12 buah di daerah Pariaman Selatan. Dalam angka, terdapat 9 buah bangunan yang rusak ringan, dan 26 buah yang rusak sedang, sementara 35 buah rusak berat.

Dari data-data di atas cukup memberikan gambaran besarnya kerusakan materil yang telah ditimbulkan oleh bahaya bencana gempa. Pariaman sebagai daerah yang pernah menjadi pusat gempa pada September 2009 harus mengambil pelajaran ke depannya bagaimana tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah antisipasi bencana, sehingga jumlah kerusakan bisa diminimalisir.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Proses Formulasi Kebijakan

##### A. Proses *input*

Proses *input* dalam formulasi suatu kebijakan seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka dapat berupa tuntutan-tuntutan baik itu yang bersumber dari dalam sistem politik seperti birokrasi, dan aparat pemerintah, maupun juga dari luar sistem politik seperti masyarakat, kelompok kepentingan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses perumusan perda pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman, *input* hanya berasal dari dalam sistem politik tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat.

Berdasarkan temuan penulis, pada beberapa kebijakan yang bersifat top down dimana adanya tuntutan dari pemerintah pusat untuk menginstruksikan pembuatan kebijakan kepada pemerintah daerah, maka perumusan kebijakan hanya dilakukan oleh aktor pemeran resmi yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Temuan ini sejalan dengan pendapat *Warren E. Miller* dan *Donald Stokes* bahwa sangat kecil sekali keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan publik, disebabkan karena ketidaktahuan masyarakat atau lemahnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan publik. Seringkali keterlibatan masyarakat hanya terhadap isu-isu terkait dengan hak-hak sipil, selebihnya menjadi wewenang *congress*(DPR).

Begitu juga dengan kebijakan terkait pembentukan perda SOTK BPBD, dimana kebijakan ini mengangkut penambahan suatu perangkat daerah, sehingga

tidak melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Pemko Pariaman pernah melakukan hearing dengan masyarakat salah satunya pada pembuatan perda pekat dan redistribusi daerah. Karena perda ini mengatur atau mengurangi sebagian hak dan kewajiban masyarakat, sehingga agar tidak menimbulkan konflik dikemudian hari maka diperlukan masukan dari masyarakat.

Secara sederhana bisa disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik lebih kepada kebijakan yang bersifat *bottom up*. Dimana partisipasi tersebut muncul ketika ada hak-hak masyarakat sipil yang dikurangi atau terganggu keberadaannya, sehingga memunculkan tuntutan dari masyarakat. Intensitas ini bisa meningkat juga dipengaruhi oleh budaya politik yang berkembang ditengah masyarakat. Pada masyarakat yang sudah cukup maju dan berpengetahuan biasanya diiringi dengan budaya politik yang bersifat partisipan, dimana keterlibatan masyarakat sangat tinggi dalam penentuan kebijakan publik. Mereka mempunyai keyakinan bahwa mereka mampu mempengaruhi pembuatan kebijakan publik.

Menurut analisa penulis, budaya politik yang berkembang di masyarakat Kota Pariaman lebih bersifat kaula. Hal ini ditandai oleh pola hubungan yang cukup pasif antara pemerintah dan masyarakat. Di samping itu masih terlihat lemahnya input dari masyarakat terhadap munculnya kebijakan publik. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BPBD, akan tetapi disisi lain, masyarakat sudah mulai mempunyai kesadaran politik untuk menyampaikan aspirasi mereka pada kebijakan tertentu. Meskipun tidak ada penerapan budaya



politik yang murni dari masing-masing tipe tersebut, akan tetapi setidaknya cukup menggambarkan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam sebuah sistem politik.

Terkait dengan pembentukan BPBD, adapun aturan-aturan yang menjadi dasar/acuan pembentukan dan keberadaan sebuah badan penanggulangan bencana di daerah antara lain:

A. Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Aturan yang ditetapkan pada 26 April 2007 ini menjadi acuan hukum utama yang mengamanahkan pembentukan BPBD bagi tiap-tiap daerah di Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 18 ayat 1 bahwa *"Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah"*. Ini berarti bahwa setiap daerah baik itu yang termasuk daerah rawan bencana maupun yang tidak rawan bencana harus membentuk BPBD sebagai koordinator dalam penanggulangan bencana di daerah-daerah.

Kemudian pada pasal lainnya juga dijelaskan bahwa *"Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan badan penanggulangan bencana daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk"*. Selain adanya keharusan untuk membentuk sebuah badan penanggulangan bencana di daerah, pemerintah daerah juga diberi batas waktu satu tahun untuk menyegerakan pembentukan BPBD tersebut terhitung setelah undang-undang tersebut disahkan. Hal ini tidak lepas dari banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia dengan penanganan yang belum maksimal, sehingga mengakibatkan jumlah korban dan kerugian yang tidak

sedikit. Sehingga pemerintah meminta kepada daerah-daerah untuk segera membentuk BPBD.

B. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Aturan selanjutnya adalah PP No.21 tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2008. Seharusnya aturan penjelasan ini sudah ada selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah disahkannya undang-undang, akan tetapi aturan ini baru keluar 10 bulan pasca ditetapkannya undang-undang di atas, sehingga menjadi salah satu kendala dalam pembentukan perda SOTK BPBD.

Pada aturan ini ada acuan terkait keberadaan BPBD sebagaimana yang tertuang pada pasal 6 ayat 4 bahwa *"penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota"*. Ini berarti bahwa bagi daerah yang telah membentuk BPBD, yang bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana di daerah adalah BPBD, sehingga tim satlak yang sebelumnya menjadi penanggungjawab bencana di daerah harus dibubarkan, agar tidak terjadi ketumpang tindihan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.

C. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Keluarnya Permendagri No.46 tahun 2008 pada 22 Oktober 2008 sangat membantu pemerintah daerah untuk membentuk BPBD. Hal ini dikarenakan aturan ini berisikan panduan yang cukup spesifik dalam membentuk perda SOTK BPBD, sehingga memudahkan daerah-daerah yang ingin membentuk untuk



menyegerakan pembentukan BPBD melalui perda pembentukan SOTK BPBD tersebut.

Dalam permendagri di atas ada aturan yang menyebutkan bahwa *"Pembentukan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah*. Dengan kata lain, yang harus diupayakan terlebih dahulu oleh pemerintah Kota Pariaman adalah penyusunan Perda Pembentukan SOTK BPBD sebagai syarat dibentuknya badan penanggulangan bencana di daerah, sehingga tanpa adanya aturan tersebut, BPBD belum bisa dibentuk. Hal ini juga dikuatkan dalam PP No.41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pada pasal 2 juga disebutkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan oleh peraturan daerah.

D. Peraturan Kepala(Perka) Badan Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 3 tahun 2008 tentang pedoman pembentukan badan penanggulangan bencana daerah.

Selanjutnya yang menjadi aturan penjelas pembentukan BPBD adalah Perka BNPB No.3 tahun 2008 yang disahkan pada 11 November 2008. Aturan ini juga banyak berkontribusi memandu daerah-daerah dalam membentuk sebuah lembaga baru yang sedikit berbeda dengan lembaga teknis lainnya. Selain itu, aturan ini juga menjelaskan tentang penetapan dan kategori tipe bencana di daerah.

Beberapa aturan-aturan hukum di atas, menjadi dasar acuan hukum pembentukan BPBD bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia. Acuan hukum tersebut yang nantinya akan diolah sebagai bahan masukan dalam penyusunan perda pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman.



Dalam proses kebijakan publik, langkah awal yang dilakukan adalah penyusunan agenda. Secara konseptual, agar suatu masalah bisa masuk ke dalam agenda pemerintah, masalah tersebut harus menjadi masalah publik. Masalah publik bisa muncul ketika ada reaksi atau tindakan dari masyarakat untuk memperjuangkan ketidakpuasan mereka atas hak-hak publik agar dicarikan solusinya. Pada kasus kebijakan ini, tidak diperlukan adanya perjuangan masyarakat agar suatu masalah bisa masuk ke dalam agenda pemerintah. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dibuat merupakan tuntutan dari pemerintah pusat, sehingga yang dibutuhkan hanyalah telaahan staf sebagai bahan rekomendasi bagi otoritas pembuat kebijakan untuk meyakini bahwa kebijakan ini layak masuk dalam agenda pemerintah untuk ditindak lanjuti proses perumusannya.

Selanjutnya pada tahapan formulasi kebijakan pihak eksekutif terlebih dahulu melakukan penyusunan draft ranperda bersama-sama dengan SKPD yang ada tentang pembentukan SOTK BPBD. Isi draft tersebut yang akan dijadikan dasar tuntutan kepada pihak legislatif untuk mengesahkan pembentukan Perda SOTK BPBD berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh pihak eksekutif.

Adanya tuntutan dari pihak eksekutif untuk meminta pihak legislatif agar melakukan pembahasan hingga pengesahan perda pembentukan SOTK BPBD menjadi bagian dalam proses input. Peraturan ini tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan di atasnya, akan tetapi boleh dikembangkan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan eksekutif dalam penyusunan draft Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman antara lain:

1. Diterimanya surat edaran mendagri oleh Pemko Pariaman yang memerintahkan dibentuknya BPBD (**19 Desember 2008**)

Pemerintah Kota Pariaman telah menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/3936/SJ, tanggal 19 Desember 2008, terkait pembentukan BPBD di daerah. Edaran ini untuk menindaklanjuti amanah Undang-Undang No.24 Tahun 2007 yang menuntut dibentuknya sebuah badan penanggulangan bencana di daerah. Akan tetapi surat edaran ini selama empat bulan lebih tidak direspon oleh pemerintah Kota Pariaman, karena keberadaan badan ini ketika itu belum menjadi kebutuhan daerah. Alasan ini seringkali dikemukakan oleh anggota eksekutif melihat kondisi wilayah Pariaman beberapa waktu terakhir yang bisa dikatakan hampir tidak ada bencana.

2. Pembentukan Tim Aksistensi(**7 Mei 2009**)

Pihak eksekutif baru mulai merespon surat edaran tersebut lebih kurang 5(lima) bulan setelah surat edaran tersebut diterima. Sesuai dengan PP No.41 tahun 2007 bahwa penambahan badan/dinas dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah. Pada PP tersebut dijelaskan bahwa penambahan perangkat daerah yang dibentuk untuk melakukan urusan pilihan, berdasarkan pertimbangan adanya urusan yang secara nyata ada sesuai dengan kondisi, kebutuhan, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, saat itu pemko Pariaman belum merasa perlu dibentuknya BPBD, karena beberapa tahun terakhir Pariaman hampir tidak ada bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan



gempa. Sehingga persepsi yang muncul adalah Kota Pariaman belum merasa BPBD sebagai kebutuhan daerah yang harus diprioritaskan pembentukannya.

Selain itu, melihat kondisi Kota Padang yang telah membentuk BPBD pada Januari 2009 dengan menggunakan Perda No.18 tahun 2008, disertai dengan telaahan dan tinjauan staf, akhirnya **Walikota** pun mulai merespon terkait pembentukan Perda SOTK BPBD dengan mengeluarkan SK pembentukan tim Aksistensi Pembahasan Ranperda BPBD tertanggal 7 Mei 2009 yang terdiri dari instansi:

- Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
- Inspektorat
- Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset (DPPKA)
- Hukum dan Organisasi Setda Kota
- Pekerjaan Umum (PU)
- Pengadilan dan Kejaksaan Negeri
- Sosial Tenaga Kerja

Keterlambatan pembentukan tim ini sebagai bentuk respon dari pemko Pariaman diakui oleh Kabag Hukum dan Organisasi Setda Kota Pariaman **Ibu Linda Osra SH. MH** sebagaimana dijelaskan<sup>36</sup>:

“Saat itu kami memang belum memfokuskan untuk membentuk BPBD karena masih banyak aturan-aturan lain yang mesti diselesaikan, lagiian saat itu juga belum ada bencana, sehingga kebutuhan untuk membentuk badan tersebut masih kita tunda sampai waktu yang kita rasa pas. Proses penyusunan draft ini telah kami mulai semenjak tahun 2009 bersama dengan tim penyusunan Ranperda. Disini kami tidak melihat keterlambatan pembentukan BPBD di Kota Pariaman, karena pembentukan sebuah badan harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah

<sup>36</sup> Wawancara langsung dengan Ibu Linda Osra di kantor Setda Kota Pariaman tanggal 2 Desember 2011 pada pukul 10.15 WIB



yang bersangkutan, toh daerah lain masih banyak yang belum membentuk. Disamping itu pembentukan sebuah badan baru dengan eselonisasi yang berbeda tentunya memerlukan pengkajian dan tinjauan yang mendalam”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masih terdapatnya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah tentang urgensi keberadaan sebuah badan seperti BPBD. Kalau kita lihat perkembangannya, saat ini pemerintah(pusat) telah cukup sadar bahwa selama ini mereka bergerak setelah terjadinya bencana, sehingga mengakibatkan banyak korban yang berjatuh dan jumlah kerugian yang tidak sedikit. Dengan keluarnya undang-undang penanggulangan bencana, pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan preventif berupa antisipasi/siapsiaga sebelum terjadinya bencana, sehingga dengan adanya tindakan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Akan tetapi belum semua daerah mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya keberadaan BPBD di daerahnya, seperti misalnya Kota Pariaman, saat itu sebagian aparat pemerintah masih mempunyai pandangan bahwa kebutuhan badan tersebut hanya ketika terjadi bencana, sehingga mereka belum merasa keberadaan badan ini sebagai sebuah kebutuhan daerah yang harus disegerakan.

### 3. Rapat Tim Aksistensi( 13 Mei 2009)

Enam hari pasca dikeluarkan SK Walikota, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah pihak eksekutif mengadakan rapat dengan tim aksistensi pembahasan Ranperda pada tanggal 13 Mei 2009 bertempat di kantor Walikota Pariaman. Rapat ini dilakukan untuk meminta masukan dari setiap instansi terkait tentang keberadaan badan penanggulangan di Kota Pariaman yang berasal dari

instansi BKD, Inspektorat, DPPKA, Hukum dan Organisasi Setda Kota, PU, Pengadilan dan Kejaksaan Negeri serta Sosnaker.

Pada rapat ini dibahas mengenai berbagai informasi yang dibutuhkan mengenai pembentukan sebuah lembaga BPBD. Dan mengingat belum lengkapnya informasi tentang hal tersebut maka tim sepakat untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan beberapa instansi terkait. Konsultasi pembentukan SOTK BPBD diagendakan ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negri, dan Departemen Keuangan pada tanggal 24-28 Agustus 2009.

Pada rapat ini juga dibahas tipe bencana apa yang akan ditetapkan untuk wilayah Kota Pariaman. Namun pada rapat awal ini masih belum ada keputusan tipe karena harus melakukan kajian terlebih dahulu dan juga konsultasi. Selain itu juga dibahas mengenai estimasi kesiapan anggaran daerah dalam pembentukan BPBD tersebut.

Selanjutnya selama kurang lebih tiga (3) bulan tidak ada lagi rapat terkait pembahasan draft ranperda. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Kota Pariaman saat itu disibukkan oleh banyaknya penyusunan Draft Ranperda lain seperti: Restribusi izin mendirikan bangunan, pengelolaan barang milik daerah, pajak hiburan, restribusi pelayanan pasar dan lain sebagainya.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubag Perundang-undangan **Bapak Riki Zakaria SH**, dijelaskan bahwa pembahasan penyusunan Draft Ranperda **memang sengaja kami undur**, karena kalau dipaksakan pembentukan badan pada tahun ini, jelas tidak mungkin karena **tidak ada**



anggaran pada tahun tersebut. Dengan kata lain, bahwa pembentukan badan harus dilakukan setelah adanya anggaran yang dibebankan kepada APBD Kota Pariaman. Pembentukan BPBD baru mulai dianggarkan pada APBD 2010, agar keberadaan badan ini bisa segera dibentuk dan dioperasikan.

4. Konsultasi Ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan RI di Jakarta (24-28 Agustus 2009)

Berdasarkan surat tugas Sekretaris Daerah Kota Pariaman No.128 Tahun 2009 tertanggal 21 Agustus 2009 menugaskan kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi dan Plt. Kasubag Organisasi dan Aparatur bagian Hukum dan Organisasi Setdako Pariaman untuk mengkonsultasikan Pembentukan SOTK BPBD Ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan RI di Jakarta.

Adapun hasil Konsultasi yang diperoleh dari ke tiga instansi di atas ditambah dengan konsultasi dengan kepala BNPB antara lain<sup>37</sup>:

1. Bahwa dalam pasal 3 dan 6 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 masih mendatangkan beberapa pertanyaan, diantaranya :
  - a. Secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah sesuai perintah pasal 18

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa. Ini berarti bahwa secara ex-officio

<sup>37</sup> Laporan Hasil Konsultasi ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan RI, dan BNPB di Jakarta



dijabat oleh Sekda sehingga menyebabkan terjadinya Pejabat Pengguna Anggaran Ganda yang dijabat Sekretaris Daerah, sedangkan pada pelaksanaannya Sekda tetap mendapatkan satu tunjangan.

- b. Pembentukan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota perlu mendapat rekomendasi kembali dari Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2007 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pembentukan SOTK BPBD harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Ini jelas bertentangan dengan surat edaran yang dikirim mendagri bahwa pembentukan BPBD boleh dalam bentuk perwako, sehingga mesti dilakukan konsultasi.

Dari beberapa hal tersebut diatas, didapat hasil konsultasi sebagai berikut :

- (1) BPBD secara ex-officio dijabat oleh sekretaris daerah telah sesuai perintah pasal 18 undang-undang nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang berbunyi badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.
- (2) BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekda menyebabkan terjadinya Pejabat Pengguna anggaran ganda yang dijabat sekretaris daerah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada sekretaris daerah sesuai pasal 18 ayat (2) huruf b undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai satu-satunya Pejabat eselon IIa di Kabupaten/Kota, yang pada pelaksanaannya tetap mendapatkan satu tunjangan.

- (3) Pembentukan BPBD Kota Pariaman dalam bentuk perwako sesuai surat edaran Departemen Dalam Negeri RI Nomor 061/2926/SJ Tanggal 19 Desember 2008 tentang tindak lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP No. 41 tahun 2007 perlu mendapat Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Pada hakekatnya tidak sesuai dengan pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana sehingga sebaiknya langkah yang diambil tetap merumuskan sesuai tuntutan undang-undang.
- (4) Pembentukan BPBD Kota Pariaman dalam bentuk perwako disinyalir akan menimbulkan banyak masalah dikemudian hari terutama menyangkut keberadaan organisasi dan juga masalah anggaran badan itu sendiri.

Ex-officio adalah pemegangan sebuah jabatan oleh seorang pejabat instansi yang diperoleh karena kekuasaan atau pengaruh dari jabatan tersebut, bukan karena pemilihan atau penunjukan<sup>38</sup>. Penetapan sekda sebagai pimpinan BPBD akan memudahkan nantinya untuk melakukan koordinasi dengan lembaga teknis lainnya ketika terjadi bencana besar yang melibatkan SKPD lain. Seringkali yang terjadi di lapangan adalah ketika yang meminta atau menginstruksikan memiliki tingkat eselonisasi yang sama, masing-masing kepala dinas/badan enggan untuk melaksanakannya, karena adanya sifat egosentris jabatan.

Terkait dengan pembentukan BPBD yang mensyaratkan dalam bentuk perda telah sesuai dengan tuntutan UU No.24 Tahun 2007 dan PP No.41 tahun 2007. Perlunya dibentuk aturan dalam bentuk Perda bukan perwako dengan dasar

<sup>38</sup><http://www.bussinessdictionary.com/definition/ex-officio.html>



pertimbangan bahwasanya badan ini merupakan sebuah organisasi perangkat daerah yang terdiri dari beberapa jumlah personil yang perlu pembiayaan untuk tunjangan struktural, tunjangan daerah(tunda), dan biaya operasional lainnya. Kita ketahui bahwa yang berwenang dalam pengesahan anggaran adalah DPRD, bagaimana jadinya kalau pembentukan badan tanpa persetujuan pihak legislatif, dikhawatirkan mereka tidak mengeluarkan anggaran untuk badan tersebut, karena dibentuk tanpa persetujuan mereka. Oleh sebab itu, perlu dibentuk dalam perda agar adanya persetujuan legislatif bersama dengan pihak eksekutif.

Selanjutnya, dilakukannya konsultasi di atas cukup menjawab beberapa kerancuan yang ditemukan dalam aturan perundangan yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil konsultasi tersebut akan memudahkan tim aksistensi dalam menyusun dua draft ranperda terkait penanggulangan bencana dan pembentukan SOTK BPBD.

#### **5. Penyelesaian Draft Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman**

**( 10 September 2009)**

Pada 10 September 2009 pihak eksekutif yang diwakili oleh tim aksistensi berhasil merampungkan draft ranperda pembentukan SOTK BPBD. Akan tetapi karena diluar prediksi terjadi bencana besar yakni gempa 30 September 2009 penyerahan draft ranperda ke legislatif terpaksa ditunda. Karena yang menjadi fokus pemko saat itu adalah penanganan darurat bencana. Dengan kata lain, faktor alam seperti bencana gempa juga menjadi salah satu faktor penyebab terlambatnya penyerahan ranperda pembentukan SOTK BPBD ke pihak legislatif.



6. Penyerahan Draft Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman kepada DPRD Kota Pariaman (**2 Desember 2009**)

Pada tanggal 2 Desember 2009, baru dikirimkan surat oleh Walikota Pariaman No.180/6297/HUK/2009 kepada Ketua DPRD Kota Pariaman perihal penyampaian 2 rancangan peraturan daerah Kota Pariaman tentang penanggulangan bencana dan pembentukan SOTK BPBD, dengan rekomendasi eksekutif untuk pemilihan kategori tipe bencana B untuk Kota Pariaman.

Berdasarkan analisa penulis secara keseluruhan pada proses di eksekutif ini ditemukan bahwa lebih kurang lima bulan Pemerintah Kota Pariaman baru mulai merespon sebuah surat edaran Mendagri untuk membentuk sebuah badan yang bernama BPBD, dan tidak kurang tujuh bulan waktu yang dibutuhkan pihak eksekutif untuk membahas hingga menyusun draft Ranperda pembentukan SOTK BPBD. Rentang waktu yang tidak sebentar ini, membuktikan bahwa menurut pemerintah Kota Pariaman pembentukan BPBD ketika itu belum menjadi kebutuhan daerah untuk diprioritaskan pembentukannya di Kota Pariaman, selanjutnya pembentukan badan ini juga terkendala karena belum ada anggaran untuk pembentukan BPBD pada APBD 2009.

Pemerintah sebagai pemangku kebijakan harusnya menyadari bahwa keberadaan mereka adalah untuk melindungi masyarakat, termasuk perlindungan terhadap bencana. Pengalaman bencana yang menimpa Kota Pariaman dan kajian para ahli yang menyebutkan bahwa Kota Pariaman mempunyai tingkat resiko bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi hendaknya dijadikan dasar untuk menyegerakan pembentukan BPBD. Upaya ini tentunya dengan harapan agar ke

depannya masyarakat lebih sadar akan bahaya bencana, dan siap hidup berdampingan dengan bencana.

Persepsi yang sering berkembang ketika itu di tengah masyarakat kita adalah baru bergerak ketika telah terjadi bencana. Seolah kita hanya menunggu kapan bencana itu terjadi tanpa berbuat apa-apa sebelum bencana melanda. Padahal hampir semua masyarakat menyadari bahwa daerah mereka rawan bencana, terbukti dengan terjadinya bencana gempa yang cukup besar hampir setiap tahunnya sejak 2004, di samping bencana banjir, tanah longsor dan sebagainya. Akan tetapi ini tidak membuat kita, khususnya pemerintah lebih waspada untuk melakukan tindakan antisipasi agar ke depannya ketika terjadi bencana korban jiwa maupun kerusakan bisa dikurangi.

Selain pembentukan badan ini diamanahkan oleh undang-undang, jelas perlindungan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana harus menjadi pertimbangan utama. Kita mengetahui bahwa bencana tidak bisa diprediksi kapan dan dimana terjadinya, akan tetapi setidaknya kita mampu berupaya bagaimana mengelola bencana sehingga kerusakan dan korban bencana bisa diminimalisir.

Pada proses input ini penulis tidak menemukan adanya dukungan baik itu dari masyarakat, LSM, maupun kelompok kepentingan lainnya. Hal ini disebabkan karena kebijakan yang dibuat bersifat *top down* yang merupakan tuntutan dari pemerintah pusat, sehingga pada perumusan kebijakan tidak melibatkan masyarakat, hanya melibatkan pemerintahan daerah dalam hal ini berasal dari Pemko Pariaman dan DPRD Kota Pariaman. Hal ini juga telah dilakukan diskusi dengan pihak legislatif bahwa kebijakan yang mereka bentuk



terkait pembentukan perangkat daerah sehingga kami memang tidak melibatkan masyarakat, seperti pada kebijakan yang bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas)

Bentuk lain dari input adalah *resources* (sumberdaya). Ini terkait ketersediaan sumberdaya berupa personel (aparatur) yang akan menempati badan, serta kondisi keuangan daerah dan sumberdaya lain yang mungkin menunjang pembentukan sebuah badan. Bagaimana ketersediaan sumberdaya di sebuah daerah, hendaklah menjadi bahan masukan dan pertimbangan baik oleh eksekutif maupun legislatif nantinya dalam membahas dan memutuskan sebuah kebijakan.

Hal ini penting diketahui karena pembentukan sebuah badan seperti BPBD membutuhkan personel yang tidak sedikit. Penentuan jumlah personel yang akan menduduki jabatan tersebut nantinya juga akan berpengaruh kepada jumlah anggaran keuangan yang akan tersedot. Oleh sebab itu perundang-undangan telah menuntut daerah untuk lebih cermat dalam menganalisis badan penanggulangan bencana yang akan dibentuk. Besarnya beban kerja, kondisi keuangan daerah dan kebutuhan daerah akan sebuah badan hendaknya dijadikan acuan dalam penetapan tipe bencana di daerah.

## **B. Sistem Politik**

Berdasarkan konsep yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka bahwa sistem politik merupakan seperangkat lembaga dengan segala aktifitasnya untuk merubah tuntutan menjadi sebuah kebijakan yang bersifat otoritatif. Di dalam sistem politik tentunya akan berlangsung proses politik di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik.



Disini dapat kita lihat bahwa proses ini dimulai ketika draft Ranperda pembentukan SOTK BPBD telah diserahkan pihak eksekutif kepada pihak legislatif agar ditindak lanjuti dalam bentuk pembahasan hingga pengesahan berupa perda. Pada proses ini terjadi berbagai aktifitas untuk mengubah input menjadi output sebagaimana yang dijelaskan dalam Teori Sistem.

Adapun proses pembahasan ranperda hingga pengesahan perda oleh Pihak Legislatif antara lain<sup>39</sup>:

### **1. Penyerahan Draft Ranperda oleh Eksekutif ke Legislatif**

**(2 Desember 2009)**

Proses ini berlangsung ketika pihak eksekutif menyampaikan dua draft Ranperda terkait penanggulangan bencana dan pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD Kota Pariaman kepada DPRD Kota Pariaman selaku pihak legislatif pada tanggal 2 Desember 2009. Berhubung kesibukan di akhir tahun untuk penyelesaian anggaran tahunan, Pemko Pariaman baru menyampaikan nota penjelasan Ranperda pada awal tahun 2010.

### **2. Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda oleh Walikota Pariaman**

**(15 Januari 2010)**

Pada tanggal 15 Januari 2010 bertempat di ruang rapat utama DPRD Kota Pariaman dilaksanakan penyampaian nota penjelasan oleh Walikota Pariaman tentang Ranperda yang telah dibuat. Ada 10 Ranperda yang akan dibahas saat itu, namun yang terkait dengan penanggulangan bencana ada pada poin 1 dan 2 yaitu:

#### **a. Penanggulangan Bencana**

<sup>39</sup> Hasil Notulen Rapat DPRD Kota Pariaman dalam pembahasan Ranperda BPBD

- b. Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman.

Dua ranperda ini nantinya yang akan menjadi syarat dibentuknya BPBD Kota Pariaman. Dengan terjadinya bencana gempa yang berpusat di Pariaman dengan 8,7 SR, diharapkan pihak eksekutif dan legislatif menyadari bahwa Kota Pariaman butuh dibentuknya BPBD sebagai badan yang bertanggungjawab dalam penanganan pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Karena seperti yang terjadi ketika gempa September lalu, ketiadaan BPBD menyebabkan tidak adanya badan yang bertanggung jawab penuh dalam penanggulangan bencana, sehingga harus dibentuknya tim tanggap darurat sementara di Kota Pariaman.

### **3. Pembentukan Pansus I (20 Januari 2010)**

Menindaklanjuti masuknya draft ranperda dari eksekutif, dilakukan pertemuan untuk mengakomodir pandangan umum anggota fraksi mengenai ranperda tersebut pada tanggal 18 Januari 2010. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2010 dilakukan rapat paripurna pembentukan Pansus I terkait penanggulangan bencana. Rapat Paripurna ini menunjuk beberapa anggota sebagai berikut:

Ketua : Mulyadi

Wakil Ketua : Muhammad Yasin S.Tp

Sekretaris : Priyaldi S.Sos

Anggota : Yusrizal, SE

Ibnu Hajar, SH

Amrizal Tanjung

Dengan dibentuknya tim ini, diharapkan diperoleh kajian-kajian terkait bagaimana pembentukan SOTK BPBD, dan dilakukan pembahasan yang akurat agar ditetapkan perda SOTK BPBD sebagai syarat dibentuknya BPBD di Kota Pariaman.

#### **4. Studi Banding Pansus I Ke Kota Yogyakarta dan Kab.Sleman<sup>40</sup>** **(26-29 Januari 2010)**

Terkait tugas yang diterima pansus I untuk menyelesaikan dan meninjau 2 (dua) Ranperda tersebut, anggota Pansus I melakukan rapat pada tanggal 25 Januari 2010 dengan agenda pembahasan 2 buah Ranperda terkait penanggulangan bencana dan pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman. Rapat ini merumuskan beberapa hal diantaranya : Penentuan status eselon yang akan menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD apakah eselon IIIa atau eselon IIB. Selain itu rapat juga membahas pelaksanaan studi banding ke kota Yogyakarta dan Kulon Progo pada tanggal 26-29 Januari 2010. Study banding ini diikuti oleh semua anggota pansus I dan perwakilan dari sekwan.

Menurut hemat penulis pelaksanaan studi banding ini terkesan tergesa-gesa karena dilakukan 1hari setelah rapat pertama Pansus I dilakukan. Hal ini tentu saja berdampak pada kurang matangnya perencanaan kegiatan dan pengelolaan informasi terkait ranperda yang sedang dibahas. Hal ini terbukti dengan fakta yang ditemukan pada saat studi banding bahwa kedua daerah Yogyakarta dan Sleman bahkan belum sama sekali membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Padahal menurut agendanya studi banding dilakukan untuk melihat

---

<sup>40</sup> Laporan Studi banding Pansus I ke Sleman dan Yogyakarta



bagaimana proses pembentukan BPBD dan bentuk penanganan bencana. Sementara itu menurut pantauan penulis, pada tanggal dilakukannya studi banding sudah ada beberapa daerah yang membentuk BPBD seperti Kabupaten Jepara dan Kudus di Jawa Tengah.

#### **5. Konsultasi Pansus I dengan BPBD Provinsi Sumbar dan BPBD Kota Padang (4 Februari 2010)**

Proses pembahasan Ranperda yang dilakukan oleh pansus I masih memerlukan peninjauan dan konsultasi kepada instansi-instansi terkait. Substansi yang paling pokok untuk ditinjau tim pansus adalah penetapan kategori bencana untuk Kota Pariaman, dimana pihak eksekutif dengan berbagai kajiannya memilih Tipe bencana B. Selanjutnya instansi yang akan ditinjau untuk pendalaman materi terkait pembentukan perda SOTK BPBD adalah BPBD Provinsi Sumatra Barat dan BPBD Kota Padang. Ketika itu yang telah membentuk BPBD adalah Kota Padang, Kabupaten Mentawai dan BPBD Provinsi Sumbar.

Konsultasi ini dilakukan pada tanggal 4 Februari 2010 dengan melibatkan pihak eksekutif dari kesbanglinmas dan bagian hukum Kota Pariaman. Dari hasil konsultasi itu diperoleh keterangan bahwa berhubung daerah Pariaman mempunyai tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi terbukti dengan banyaknya korban dan kerusakan yang ditimbulkan akibat bencana gempa 30 September 2009 yang lalu, sehingga BPBD propinsi maupun BPBD Kota Padang menyarankan dalam pembentukan klarifikasi SOTK BPBD Kota Pariaman sebaiknya memilih Tipe A.

## 6. Konsultasi Pansus I ke BNPB dan Departemen Sosial RI

(14 s/d 17 Februari 2010)

Masih dalam rangka peninjauan dan pengumpulan informasi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Pansus I adalah Konsultasi ke BNPB dan Departemen Sosial RI pada tanggal 14 s/d 17 Februari 2010. Dimana setelah melakukan sharing dengan BNPB terkait kondisi kerawanan bencana di Kota Pariaman, BNPB menyarankan kepada Pemko Pariaman dalam menentukan klarifikasi Tipe Bencana untuk lebih memilih Tipe A. Hal ini akan berdampak kepada besarnya jumlah bantuan yang dianggarkan oleh BNPB sebagai dana stimulan ketika terjadi bencana sebesar 5,6 Milyar untuk Tipe A dan 1,2 Milyar untuk Tipe B. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk penanggulangan bencana jika terjadi bencana.

Hal ini dibenarkan oleh **Bapak Priyaldi S.Sos** selaku Sekretaris Pansus yang ikut dalam pertemuan dengan BNPB seperti dijelaskan<sup>41</sup>:

*"Apak jo kawan-kawan didewan ko labiah mamilih tipe A sabob bantuan nan bakal ditarimo tu sampai 5,6 Milyar, babeda jo tipe B tu hanyo 1,2 Milyar. Ko kan jaleh mauntuangkan awak, apolagi nanti pitih tu juo untuk mambantu masyarakat awak"*

*"Kami dari tim Pansus lebih memilih Tipe bencana A karena jumlah bantuan yang diterima nantinya mencapai 5,6 Milyar, sedangkan Tipe B hanya 1,2 Milyar. Jelas ini lebih menguntungkan kita, apalagi daerah kita memang rawan bencana. Ini kan untuk masyarakat juga nantinya".*

Terkait jumlah bantuan yang menjadi salah satu pertimbangan untuk penetapan klarifikasi tipe bencana yang dikemukakan oleh tim pansus setelah melakukan konsultasi, pihak eksekutif mencoba melakukan klarifikasi langsung

<sup>41</sup> Wawancara langsung penulis dengan sekretaris Pansus I Bpk Priyaldi S.Sos di rumah kediaman beliau di desa Sikapak Jati Pariaman pada tanggal 5 November 2010 pada pukul 13.10 WIB



kepada institusi terkait tentang kebenaran informasi bantuan tersebut seperti yang disampaikan oleh Sekda Kota Pariaman (**Ir. Armen MM**)<sup>42</sup>:

“Kami bukan tidak sepakat masalah tipe yang diajukan oleh dewan tapi menurut saya pemilihan tipe A untuk Kota Pariaman dirasa belum tepat. Kita kan tahu daerah Pariaman tidaklah luas, apalagi kalau masalah kegiatan bencana kan sifatnya insidentil, ndak setiap waktu. Nanti yang bekerja juga dinas-dinas terkait, ndak bisa diserahkan ke BPBD saja. Kita kan perlu pertimbangkan efektifitas dan efisiensi juga, berapa dana yang akan habis kalau dinasnya gemuk. Ini kan kurang rasional aja menurut saya. Kalau masalah bantuan yang dibilang anggota dewan itu jelas tidak benar, kami sudah coba klarifikasi ke BNPB kok, mereka sudah kirimkan suratnya ke kita”.

Ternyata kebenaran mengenai jumlah bantuan dana dari BNPB untuk klasifikasi BPBD Kabupaten/Kota adalah tidak berdasarkan tipe bencana sebagaimana yang tercantum dalam surat BNPB No. B 344/BNPB/V/2010, sebagai balasan dari surat Walikota Pariaman No.180/1586/HUK-2010 bahwa pemberian bantuan dana yang dikoordinasikan BNPB terkait dana pemulihan pasca bencana (dana rehab/rekon) mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian dengan menggunakan metode *Damage and Lost Assesment* (DaLA) dan *Post Disaster Need Assesment*(PDNA)<sup>43</sup>. Dengan kata lain pemberian bantuan dana dari BNPB pusat dapat kami sampaikan bahwa penetapan klasifikasi BPBD tidak ada relevansinya dengan pemberian dana bantuan.

<sup>42</sup> Wawancara langsung dengan Bpk Sekda Kota Pariaman Ir.Armen di Pandopo Walikota Pariaman pada tanggal 08 Desember 2010 pada pukul 08.30 WIB

<sup>43</sup> Surat Balasan BNPB kepada Walikota Pariaman terkait klasifikasi hubungan antara tipe bencana dengan jumlah bantuan, tertanggal 2 Mei 2010



Perbedaan informasi yang diperoleh oleh eksekutif dan legislatif menuntut penulis untuk melakukan klarifikasi langsung ke BNPB. Sebagaimana disampaikan oleh *Bapak Hardje Robert Winerungan* (Kabid Humas BNPB)<sup>44</sup>:

“Jumlah bantuan bencana yang akan diberikan kepada daerah yang mengalami bencana sebenarnya tidak harus berdasarkan tipe bencana yang sudah ditentukan, tapi berdasarkan kondisi kerusakan dan tingkat keparahan yang dialami daerah bencana tersebut. *Lha*, wong dananya kan dikeluarkan dari APBN jadi *ndak* ada keharusan mengikuti tipe bencana. *Lagian* yang saya tahu sekarang kan sudah otonomi, jadi daerahlah yang menentukan tipe rawan bencana daerah mereka masing-masing mengacu pada undang-undang tentunya”.

Menurut analisa penulis, jumlah bantuan janganlah di jadikan dasar acuan untuk menentukan tipe bencana. Kalaulah benar jumlah bantuan didasarkan kepada tingkat kerusakan bencana, maka kita tetap upayakan pengelolaan bantuan harus cepat dan tepat sasaran. Tidak ada satu daerah pun yang mau diterpa bencana, akan tetapi bagaimana kita bekerja sama agar masyarakat tetap merasa aman meskipun berada di zona bencana. Bantuan seperti yang disampaikan di atas hanya berupa dana stimulan bagi daerah yang terkena bencana bukan untuk dianggarkan kepada daerah setiap tahunnya. Ini berarti bahwa hanya daerah yang terkena bencana yang akan memperoleh bantuan pusat sesuai dengan besarnya jumlah korban dan kerusakan materil di daerah yang bersangkutan.

#### **7. Konsultasi Pansus I dengan Pemda Padang Pariaman (18 Maret 2010)**

Proses pembahasan ranperda terkait pembentukan BPBD terus berlanjut dengan dilakukannya konsultasi oleh Pansus I ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Maret 2010. Sebagai daerah yang sama-sama merasakan besarnya efek dari gempa 30 September 2009, daerah Padang Pariaman telah lebih dahulu

<sup>44</sup> Wawancara langsung penulis dengan Bapak Hardje Robert Winerungan Kabid Humas BNPB di kantor BNPB pada tanggal 3 Januari 2011 pada pukul 11.35 WIB

membentuk BPBD meski belum adanya kelengkapan struktural layaknya sebuah badan. Dari konsultasi yang dilakukan dengan Pemda Padang Pariaman, Kota Pariaman disarankan untuk menyegerakan pembentukan BPBD, karena daerah ini termasuk daerah rawan bencana. Pemda Padang Pariaman mengaku siap bekerja sama dengan Pemko Pariaman dalam hal penanggulangan bencana.

#### **8. Rapat Pansus dengan Eksekutif (20 Maret 2010)**

Setelah dilakukan beberapa kali peninjauan dan konsultasi oleh Pansus I, tindak lanjut dari pembahasan ranperda tersebut adalah pelaksanaan Rapat Pansus I dengan melibatkan pihak eksekutif pada tanggal 20 Maret 2010. Beberapa instansi terkait yang diikutsertakan dalam rapat adalah:

1. Badan Kesbanglinmas Kota Pariaman
2. Biro Hukum dan Organisasi Setda Kota Pariaman
3. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Pariaman

Adapun agenda rapat adalah pemaparan hasil peninjauan yang telah dilakukan oleh Pansus I dan penyampaian hasil telaahan staf oleh pihak Eksekutif. Pemaparan hasil peninjauan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, sedangkan hasil telaahan staf tersebut antara lain berisikan<sup>45</sup>:

1. Draft Ranperda yang diajukan eksekutif kepada DPRD Kota Pariaman terkait organisasi dan tata kerja BPBD adalah klasifikasi B.

Sebagaimana dijelaskan dalam draft Ranperda pasal 18 bahwa Kepala pelaksana BPBD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a, adalah jabatan struktural eselon III.a. sedangkan untuk Kepala sub bagian

<sup>45</sup> Hasil telaahan staf Bag. Hukum dan Organisasi Setda Kota Pariaman



dan kepala seksi BPBD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, adalah jabatan struktural eselon IV.a

2. Setelah dilakukan pembahasan Ranperda dimaksud di atas, Pansus I DPRD Kota Pariaman mengusulkan supaya SOTK BPBD adalah klasifikasi A.

Sebagaimana dijelaskan pada draft ranperda setelah pembahasan pasal 20 bahwa kepala pelaksana BPBD Kota Pariaman adalah jabatan struktural eselon II.b dan sekretaris serta kepala bidang BPBD Kota Pariaman adalah jabatan struktural eselon III.b. Kepala Sub bagian dan kepala seksi BPBD Kota Pariaman dan kepala UPTB adalah jabatan struktural eselon IV. Kepala sub bagian pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b

3. Draft Ranperda yang diajukan eksekutif kepada DPRD Kota Pariaman sebagaimana dimaksud poin 1 di atas yaitu klasifikasi B dengan berdasar kepada:

- a. Beban kerja BPBD tidak terlalu berat disebabkan hanya berfungsi jika terjadi bencana.
- b. Biaya operasional tidak terlalu besar karena hanya terdiri dari 7 jabatan struktural yang terdiri dari kepala badan pelaksana, kasubag tata usaha, tiga kepala seksi, kepala UPTD, dan kasubag tata usaha badan, sedangkan untuk Tipe A terdiri dari 16 jabatan struktural yaitu kepala badan pelaksana, sekretaris badan, tiga kepala bidang, tiga kasubag, enam kepala seksi, kepala UPTD, dan kasubag tata usaha badan tentunya akan mengeluarkan biaya operasional yang jauh lebih besar.



- c. Wilayah kota pariaman relatif kecil dan jumlah penduduk tidak terlalu besar.
  - d. Adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kota Pariaman
  - e. Kebutuhan terhadap BPBD tidak terlalu urgen disebabkan bencana tidak setiap saat terjadi dan tidak dapat diprediksi.
4. Sementara itu Pansus I DPRD kota Pariaman mengusulkan supaya BPBD adalah klasifikasi A dengan berdasarkan pada:
- a. Kota Pariaman merupakan kota yang sangat rawan bencana
  - b. Besarnya peluang bencana di Kota Pariaman seperti bencana gempa, tsunami, dampak gunung meletus dan terutama bencana banjir disebabkan sebagian wilayah berdataran rendah dan banyak terdapat sungai.
  - c. Jika terjadi bencana pada daerah dengan klasifikasi A maka akan mendapat bantuan dana dari BNPB sebesar 5,6 Milyar, sedangkan pada daerah dengan klafisikasi B hanya mendapat bantuan dana sebesar 1,2 Milyar.

Hasil rapat Pansus I dengan eksekutif memunculkan dua keinginan yang berbeda dalam penentuan tipe bencana yang nantinya akan diterapkan di Kota Pariaman. Pihak eksekutif maupun legislatif tentunya mempunyai pertimbangan masing-masing terkait tipe apa yang paling tepat untuk diterapkan. Pemilihan tipe A atau tipe B akan berdampak kepada perbedaan jumlah personel yang cukup signifikan, seperti pada tipe A yang mengharuskan daerah untuk menempatkan 16 orang yang akan menduduki jabatan struktural, sementara pada tipe B hanya

dibutuhkan 7 jabatan struktural. Ini tentunya akan berimbas kepada jumlah anggaran yang nantinya akan dikeluarkan untuk membayarkan tunjangan daerah, tunjangan struktural, biaya operasional dan sebagainya.

Perbedaan ini mesti disikapi secara rasional oleh pemangku kebijakan. Jangan sampai penentuan tipe ini didasari atas kepentingan pihak-pihak tertentu sehingga mengenyampingkan tujuan utama dibentuknya badan tersebut. Seperti yang disampaikan dalam hasil rapat di atas, kedua-dua tipe tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Akan tetapi pandangan yang perlu diluruskan menurut penulis disini adalah jangan ada spekulasi bahwa badan ini hanya berfungsi ketika terjadi bencana. Undang-undang telah mengatur bahwa keberadaan badan ini berfungsi sebelum terjadi bencana, ketika bencana, dan sesudah terjadi bencana. Akan tetapi, pertimbangan efisiensi struktural anggota yang akan berimbas ke APBD Kota Pariaman perlu ditinjau ulang karena daerah kita baru tertimpa bencana, dengan kerugian yang tidak sedikit.

#### **9. Rapat Pansus I (9 Juli 2010)**

Hampir 4 bulan pansus I tidak lagi melakukan pembahasan Ranperda. Berdasarkan laporan sementara Pansus I, hal ini disebabkan karena belum adanya titik temu dalam penentuan tipe bencana, dan dalam penentuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan tergabung ke BPBD. Pansus I akhirnya kembali mengadakan rapat Pansus pembahasan ranperda pembentukan SOTK BPBD pada tanggal 9 Juli 2010. Rapat tersebut hanya dihadiri oleh tiga anggota pansus yaitu : Priyaldi S.Sos, Mulyadi S.Tp, dan Yusrizal SE. hal ini berbeda sekali dengan pelaksanaan study banding yang dihadiri oleh semua anggota pansus I. Sedikitnya



kehadiran anggota pansus dalam rapat pansus mengindikasikan kurangnya rasa tanggung jawab selaku pihak yang dibebankan untuk melakukan peninjauan ranperda, padahal waktu yang telah dihabiskan sudah enam bulan sejak dimulainya pembahasan ranperda.

Adapun hasil rapat pansus I antara lain :

1. Demi kelancaran tugas BPBD, pansus mengusulkan penggabungan Pemadam Kebakaran ke dalam BPBD.
2. Meminta pengusulan perpanjangan waktu ke Ketua DPRD terkait pembahasan Ranperda.
3. Mengagendakan rapat pansus dengan SKPD terkait pada tanggal 12 Juli 2010.
4. Meluruskan kembali pandangan bahwa penentuan tipe bencana A oleh pansus bukan tersangkut soal dana bantuan, akan tetapi lebih kepada pertimbangan hajat hidup orang banyak.

#### **10. Hearing antara Pansus I dengan pihak eksekutif (12 Juli 2010)**

Berdasarkan hasil rapat pansus tanggal 9 Juli 2010, Pansus I DPRD Kota Pariaman melakukan hearing dengan dinas instansi terkait dalam pembahasan Ranperda SOTK BPBD. Pertemuan ini kembali diadakan karena belum adanya kata sepakat antara eksekutif dan legislatif khususnya dalam penetapan tipe bencana.

Pihak eksekutif dihadiri oleh:

1. Asril R (Mewakili Asisten 1 Setdako Pariaman)
2. Linda Osra SH, MH ( Kabag Hukum Setdako Pariaman)



3. Indra Syamsu (Bappeda, Kota Pariaman)
4. Budi Utama (Kesbang Linmas)
5. Benyamin (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja)
6. Hertati Taher (BKD Kota Pariaman)
7. Rita Masri (BKD Pariaman)
8. Ridwan N. (Setwan DPRD Kota Pariaman)
9. Hasan Basri Majid (Setwan DPRD Kota Pariaman)

Pihak legislatif atau Pansus I DPRD Kota Pariaman dihadiri oleh:

1. Muhammad Yasin, S.Tp
2. Priyaldi, S.sos
3. Yusrizal, SE

Salah satu yang dibahas dalam rapat ini adalah mengenai surat Walikota Pariaman No:180/2230/Huk-2010 yang dipaparkan oleh Linda Osra, SH, MH sebagai berikut:

- bahwa besar bantuan penanggulangan gempa didasarkan besar kecil dampak gempa, bukan berdasarkan klasifikasi tipe SOTK BPBD (A dan B)

- Bahwa tipe klasifikasi (sesuai pasal 20 Permendagri No. 46 tahun 2008) ditentukan antara lain:

- a. Beban Kerja
- b. Kemampuan Keuangan
- c. Kebutuhan

Hal ini ditanggapi oleh anggota Pansus I Yusrizal, SE yang mengatakan bahwa sebenarnya kami dilegislatif tidak mempermasalahkan bantuan dana, akan

tetapi ini lebih kepada kepentingan masyarakat banyak. Kita bisa saksikan sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidur ditenda, ini menandakan bahwa penanganan bencana benar-benar belum serius. Perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemilihan Tipe A adalah agar proses penanganan dapat dilakukan dengan lebih serius. Ditambahkan juga oleh Muhammad Yasin, S.Tp bahwa tipe A ditujukan untuk memaksimalkan peran pemerintah khususnya di daerah, untuk lebih memperhatikan nasib rakyat yang terkena bencana. Sebagaimana ditegaskan kembali oleh anggota Pansus **M.Yasin S.Tp** bahwa<sup>46</sup>:

“masalah bantuan tidak jadi soal bagi kami, tapi yang terpenting disini adalah masalah hajat hidup orang banyak yang mesti dipikirkan, masak mau membandingkan masyarakat demi efisiensi, kan tidak logis itu”.

Belum adanya kesepakatan antara eksekutif dengan legislatif, pihak pansus berpendapat bahwa perlunya kehadiran Walikota Pariaman agar ada tindak lanjut menuju kata sepakat, berhubung proses pembahasan yang berlarut-larut dan belum menemukan titik temu. Akan tetapi dua kali surat yang telah dikirimkan legislatif kepada Walikota Pariaman terkait pembahasan ranperda belum pernah bisa dihadiri oleh walikota tersebut.

Anggota badan kepegawaian pada rapat ini mencoba memberikan gambaran ketersediaan personel berdasarkan data BKD yaitu:

- untuk eselon II b tersedia sebanyak 24 orang
- untuk eselon III a tersedia sebanyak 99 orang

dengan kata lain bagi kami di BKD pemilihan Tipe A atau Tipe B tidak jadi masalah karena pegawai untuk mengisi jabatan cukup.

<sup>46</sup> Wawancara langsung dengan Bpk M.Yasin dikediamannya di Kamp.Baru Pariaman pada tanggal 17 Februsari 2011 pukul 20.30 Wib

Berlarutnya proses pembahasan menuju disahkannya perda, semakin memperlambat terbentuknya BPBD. Padahal semua menyadari bahwa kota Pariaman sebagai daerah rawan bencana butuh sebuah badan yang lebih fokus dalam penanganan bencana, terlebih daerah tersebut baru merasakan dampak besar bencana gempa. Masyarakat sering merasa tidak aman, karena getaran gempa masih sering dirasakan, meski dengan skala yang tidak terlalu besar. Terlebih dengan adanya isu-isu gempa dan tsunami yang disebarkan oleh pihak-pihak ilegal. Hendaknya ini jadi pertimbangan bagi pihak-pihak pemangku kebijakan untuk lebih arif dalam pengambilan keputusan

#### **11. Rapat akhir Pansus I (26 Agustus 2010)**

Tanggal 26 Agustus 2010 diadakan rapat terakhir pansus untuk mengambil kata sepakat penentuan klasifikasi tipe bencana A untuk wilayah Kota Pariaman. Hal ini diambil berdasarkan peninjauan mendalam dan berbagai pertimbangan yang telah dirumuskan oleh pansus I. Rapat kali ini berbeda dengan rapat sebelumnya yang dihadiri oleh semua anggota pansus. Dengan adanya kesepakatan ini, secara tidak langsung tugas dari Pansus I telah selesai.

Masing-masing pihak baik itu dari eksekutif maupun legislatif telah sama-sama berupaya untuk melakukan penilaian dan peninjauan dalam rangka merumuskan sebuah kebijakan publik untuk membentuk BPBD di Kota Pariaman. Meskipun demikian keputusan terakhir tetap berdasarkan hasil rapat paripurna yang ditetapkan oleh legislatif sebagai lembaga yang berwenang untuk mengesahkan perda.



**12. Laporan Pansus I kepada Fraksi-Fraksi Mengenai Pembahasan  
Ranperda Pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman  
(28 Agustus 2010)**

Berdasarkan hasil Rapat Pansus I DPRD Kota Pariaman yang diadakan pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2010 jam 11.00 WIB, tanggal 28 Agustus 2010 diserahkanlah laporan hasil tinjauan pansus I ke fraksi-fraksi. Laporan tersebut memutuskan bahwa Pansus I menyepakati dalam menentukan klarifikasi tipe SOTK BPBD Kota Pariaman adalah Tipe A dengan alasan :

- Pertimbangan hasil studi banding ke Yogyakarta dan Sleman, menuntut adanya badan yang lebih besar dalam penanggulangan bencana.
- Beberapa kali konsultasi yang merekomendasikan untuk membentuk Tipe A karena pertimbangan tingkat kerawanan bencana Kota Pariaman.

Berdasarkan hal di atas Pansus I memutuskan merekomendasikan SOTK BPBD Kota Pariaman dengan Tipe A, namun demikian untuk keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada keputusan akhir fraksi-fraksi( Stemmotivering) DPRD Kota Pariaman.

Disamping itu pihak eksekutif juga menyertakan hasil pertimbangan pemilihan klasifikasi Tipe B untuk SOTK BPBD Kota Pariaman berupa Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Pada pasal 20 dinyatakan bahwa penentuan klasifikasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat 1 ditetapkan berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan.

Selanjutnya kami jelaskan secara lebih terperinci penentuan klasifikasi BPBD kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan Permandagri Nomor 46 Tahun 2008 Pasal 20 tersebut yaitu :

- a. Beban kerja, mencakup jumlah penduduk dan luas wilayah.
- b. Kemampuan Keuangan Daerah, mencakup biaya yang akan disediakan APBD untuk :
  - Pemberian tunjangan Jabatan struktural (eselonering)
  - Tunjangan Daerah baik yang punya jabatan struktural maupun staf pegawai.
  - Honor tenaga dari unsur Pengarah (instansi terkait dan tenaga professional)
  - Biaya operasional rutin dan kegiatan
  - Biaya pengadaan sarana dan prasarana kantor dan lapangan
  - Penyediaan dana pakai yang harus disediakan dalam APBD
- c. Kebutuhan, mencakup potensi Kerawanan Bencana.

Adapun pemilihan klasifikasi tipe bencana tipe B oleh eksekutif berdasarkan pertimbangan berikut:

1. *Untuk Beban Kerja*, yang menjadi indikatornya adalah jumlah penduduk dan luas wilayah, semakin banyak jumlah penduduk dan semakin luas wilayah suatu daerah, Semakin berat beban kerja yang harus dipikul oleh SOTK BPBD dan semakin sedikit jumlah penduduk dan semakin kecil luas wilayah suatu daerah, semakin ringan beban kerja yang harus dipikul oleh SOTK BPBD.

Berpedoman pada paparan diatas, untuk Kota Pariaman, data untuk jumlah penduduk dan luas wilayah Kota Pariaman, dapat dikategorikan jumlah penduduk dan luas wilayahnya "Kecil", maka untuk penentuan Klasifikasi Tipe untuk SOTK BNPB Kota Pariaman, cenderung masuk kategori untuk *Tipe B*

2. Indikator kedua untuk penentuan kalsifikasi Tipe SOTK BPBD yaitu *kemampuan Keuangan Daerah*. Untuk indikator ini dapat dijelaskan, ada beberapa kewajiban Kota Pariaman dalam penyediaan dana yang harus dianggarkan dalam APBD Kota Pariaman diantara adalah :

- a. **Pemberian tunjangan jabatan struktural** (eselonering), untuk lebih detailnya pembahasan tentang pemberian tunjangan jabatan structural ini dapat diperbandingkan untuk kedua tipe (A dan B) sebagai berikut:

- Untuk Tipe A, tunjangan struktural yang harus disediakan dan dianggarkan di APBD adalah sebagai berikut:

- Tunjangan eselon II/b →  $1 \times 12 \text{ bulan } 2.025.000 = 24.300.000$
- Tunjangan eselon III/b →  $4 \times 12 \text{ bulan } 980.000 = 47.040.000$
- Tunjangan eselon IV/a →  $10 \times 12 \text{ bulan } 540.000 = 64.800.000$
- Tunjangan eselon IV/b →  $1 \times 12 \text{ bulan } 490.000 = 5.880.000$

Untuk tipe A → tunjangan 16 eselon (1 tahun) = **142.020.000**

- Untuk Tipe B, tunjangan jabatan structural (eselonering) yang harus disediakan APBD adalah sebagai berikut:

- Tunjangan eselon III/a →  $1 \times 12 \text{ bulan } 1.260.000 = 15.120.000$
- Tunjangan eselon IV/a →  $5 \times 12 \text{ bulan } 540.000 = 32.400.000$



- Tunjangan eselon IV/b → 1x12 bulan 490.000 = 5.880.000

Untuk Tipe B → tunjangan 7 eselon (1 tahun) = **53.880.000**

Dari perincian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tunjangan jabatan struktural yang harus diberikan untuk kedua tipe yaitu Tipe A dan Tipe B sangat signifikan perbedaannya yaitu dengan selisih anggaran sebesar **Rp.88.140.000**.

**b. Pemberian tunjangan Daerah**, untuk lebih jelas tentang pemberian tunjangan jabatan struktural ini dapat diperbandingkan untuk kedua tipe (A dan B) sebagai berikut:

- Untuk Tipe A, tunjangan daerah yang harus disediakan dan dianggarkan di APBD adalah sebagai berikut:

- Tunjangan eselon II/b → 1x12 bulan 2.500.000 = 30.000.000
- Tunjangan eselon III/b → 4x12 bulan 1.250.000 = 60.000.000
- Tunjangan eselon IV/a → 10x12 bulan 750.000 = 90.000.000
- Tunjangan eselon IV/b → 1x12 bulan 500.000 = 6.000.000
- Tunda staf +UPTB sebanyak 34X12 bln 300.000 = 122.400.000

Untuk tipe A → tunjangan daerah selama 1 tahun = **308.400.000**

- Untuk Tipe B, tunjangan daerah yang harus disediakan APBD adalah sebagai berikut:

- Tunjangan eselon III/a → 1x12 bulan 1.500.000 = 18.000.000
- Tunjangan eselon IV/a → 5x12 bulan 750.000 = 45.000.000
- Tunjangan eselon IV/b → 1x12 bulan 500.000 = 6.000.000
- Tunda staf +UPTB sebanyak 24X12 bln 300.000 = 86.400.000

Untuk Tipe B → tunjangan daerah selama 1 tahun = **155.400.000**

Dari perincian diatas dapat disimpulkan bahwa tunjangan tunjangan daerah yang harus diberikan untuk kedua tipe yaitu Tipe A dan Tipe B juga sangat signifikan yaitu dengan selisih anggaran sebesar **Rp.153.000.000**.

**c. Honor dari tenaga unsur pengarah** yang terdiri dari pejabat pemerintah daerah terkait dan anggota masyarakat professional dan ahli, diatur dalam undang-undang No. 24 tahun 2007, pasal 22 ayat (2) tentang penanggulangan bencana. Untuk besaran honor dari unsur pengarah tersebut di sediakan di APBD Kota Pariaman adalah berdasarkan kemampuan daerah dan dibayarkan setiap bulan. Untuk tenaga professional, cara pengisiannya adalah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh DPRD (Pasal 22 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana), dan masa kerjanya adalah selama 5 tahun (Pasal 57 PP No. 8 tahun 2008 tentang badan penanggulangan bencana). Adapun jumlah unsur ini adalah sebagai berikut.

- Dari instansi : sebanyak 5 Orang
- Dari professional / Ahli : sebanyak 4 Orang

**d. Biaya Operasional Rutin dan kegiatan**, untuk biaya ini dapat dijelaskan bahwa semakin gemuk dan besar struktur Organisasi Kota Pariaman maka semakin besar pula dana yang harus disediakan APBD untuk biaya Operational. Begitu juga sebaliknya. Dasar pertimbangan itulah makanya kita memilih tipe B untuk BPBD Kota Pariaman.

**e. Biaya Pengadaan sarana dan prasarana kantor dan lapangan.**

Untuk biaya ini juga berlaku perbandingan lurus seperti di atas.

- f. **Penyediaan dana siap pakai.** Dana ini juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Adapun kesimpulan dari hasil pertimbangan pihak eksekutif terkait penentuan tipe bencana adalah dari poin A sampai F di atas dapat disimpulkan bahwa apabila Kota Pariaman memilih tipe A untuk struktur SOTK BPBD maka biaya yang harus dikeluarkan dari APBD Kota Pariaman sangat besar, ditambah lagi kemampuan keuangan daerah juga harus jadi pertimbangan, oleh sebab itu pemerintah kota Pariaman memilih tipe B untuk klasifikasi SOTK BPBD Kota Pariaman.

Keberadaan sebuah badan yang akan dibentuk tentunya tidak bisa dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah. Karena bergeraknya sebuah badan sangat dipengaruhi oleh anggaran yang tersedia di daerah tersebut. Kita ketahui bahwa yang hanya dibiayai oleh APBN hanya belanja rutin berupa gaji pegawai, sedangkan selebihnya dibebankan kepada APBD. Makanya perka BNPB No.3 tahun 2008 menegaskan bahwa penentuan tipe bencana sangat bergantung kepada kesiapan keuangan daerah masing-masing.

### **C. Output**

*Output* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka merupakan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh pihak pemangku kebijakan yang sifatnya otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat. Keputusan dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi (*stemmotivering*), nantinya akan menjadi titik tolak untuk memutuskan



arah kebijakan penetapan perda. Setelah hasil rapat paripurna diperoleh kemudian diserahkan kembali ke eksekutif untuk dimintakan kembali pandangannya. Ketika tidak terdapat lagi hal-hal yang dipermasalahkan terkait pasal demi pasal dalam keputusan rapat paripurna, barulah keputusan itu diundangkan oleh eksekutif menjadi perda. Perda inilah yang nantinya disebut sebagai output.

Sebelum disahkannya sebuah keputusan masing-masing pihak pembuat kebijakan akan berupaya untuk memperjuangkan bagaimana kebijakan yang keluar nantinya sesuai dengan keinginan dari pembuat kebijakan itu sendiri. Pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah eksekutif yang diwakili oleh tim aksistensi yang merekomendasikan klasifikasi tipe bencana B. Sedangkan pihak lain yang juga terlibat dalam pembuatan kebijakan adalah legislatif dalam hal ini diwakili oleh Pansus I memilih untuk penentuan tipe bencana dengan klasifikasi A. Keputusan yang nantinya akan ditetapkan hanya salah satu dari dua alternatif kebijakan tersebut. Dengan kata lain, akan ada satu alternatif kebijakan yang akan ditolak menjadi keputusan dalam rapat paripurna.

Wewenang pengesahan kebijakan berada pada suara fraksi di DPRD. Jelang rapat *stemmotivering* pihak eksekutif maupun legislatif masih tetap pada pilihannya masing-masing. Tanggal 13 September 2010 diadakan rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi, dengan berbagai pertimbangan dan penilaian alternatif kebijakan, maka diambil keputusan dengan pemilihan Tipe A untuk klasifikasi bencana BPBD Kota Pariaman. Dengan tercapainya kesepakatan dalam rapat paripurna, konsekuensi dari pemilihan Tipe A seperti

yang dipaparkan pihak eksekutif di atas siap tidak siap harus terlaksana di Kota Pariaman.

Lahirnya Perda No.3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Perda No.10 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD Kota Pariaman yang ditetapkan tanggal 28 September 2010 menjadi bukti tertulis lahirnya kebijakan baru di Kota Pariaman. Berbagai harapan yang ditumpangkan sebagai efek dari lahirnya perda diharapkan benar-benar bisa membuat pelaksanaan penanggulangan bencana di Kota Pariaman lebih baik untuk kedepannya.

## **5.2 Penyebab Keterlambatan Perumusan Kebijakan Perda Pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman**

Setelah memperhatikan alur proses formulasi di atas dapat kita lihat beberapa penyebab sebuah peraturan daerah terlambat untuk ditetapkan. Penyebab tersebut dapat kita temukan dengan menganalisis setiap proses demi proses dalam formulasi kebijakan yang telah dipaparkan sebelumnya.

Berdasarkan temuan penelitian, adapun penyebab keterlambatan perumusan perda pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman antara lain:

1. Terdapatnya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Pariaman terkait urgensi keberadaan sebuah badan penanggulangan bencana.

Ketika keluarnya undang-undang No.24 Tahun 2007 oleh pemerintah pusat yang mengamanahkan pembentukan BPBD bagi seluruh daerah di Indonesia,



melihat semakin besarnya dampak-dampak bencana yang sering terjadi, belum tentu keinginan tersebut sejalan dengan pandangan pemerintah di daerah. Ada daerah yang rawan bencana, ada daerah yang tidak terdapat potensi bencana, masing-masing mereka punya pandangan yang tentu berbeda tentang urgensi sebuah BPBD.

Ini yang juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan penulis, dimana ketika dilakukan wawancara dengan beberapa anggota eksekutif, mereka berpandangan bahwa keberadaan BPBD belum menjadi kebutuhan daerah untuk segera diprioritaskan pembentukannya. Kalau kita lihat perkembangannya, saat ini pemerintah (pusat) telah cukup sadar bahwa selama ini mereka bergerak baru setelah terjadinya bencana, sehingga mengakibatkan banyak korban yang berjatuh dan kerugian yang tidak sedikit. Dengan keluarnya undang-undang penanggulangan bencana, pemerintah dituntut untuk melakukan tindakan preventif berupa antisipasi/siaga sebelum terjadinya bencana, sehingga dengan adanya tindakan tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Akan tetapi belum semua daerah mempunyai pandangan yang sama tentang pentingnya keberadaan BPBD di daerahnya, seperti halnya Kota Pariaman, saat itu sebagian aparat pemerintah masih mempunyai pandangan bahwa kebutuhan badan tersebut hanya ketika terjadi bencana, sehingga mereka belum merasa keberadaan badan ini sebagai sebuah kebutuhan daerah yang harus disegerakan.

Hal tersebut di atas dapat dibuktikan dengan baru diresponnya surat edaran mendagri 5(lima) bulan pasca diterimanya surat tersebut. Bentuk responnya



adalah keluarnya SK Walikota Pariaman tentang pembentukan Tim Aksistensi penyusunan draft ranperda pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman tanggal 7 Mei 2009.

2. Kerancuan antara undang-undang dengan aturan teknis di bawahnya.

Ada beberapa kerancuan dan kelemahan yang ditemukan dalam Undang-Undang No.24 Tahun 2007 yaitu pada:

- Aturan penjelas berupa Peraturan Pemerintah

Pasal 84 disebutkan bahwa "peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan undang-undang ini harus sudah diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya undang-undang ini. Akan tetapi PP yang lahir adalah PP No.41 Tahun 2007 yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah. Aturan ini ketika ditilik tidak ada pembahasan tentang kebencanaan, apalagi terkait pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah. PP ini lebih fokus membahas tentang dinas daerah dan lembaga teknis daerah dalam penerapan tugas dan fungsi di daerah.

Sedangkan PP No.21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana baru keluar 10 bulan pasca ditetapkannya undang-undang penanggulangan bencana. Hal ini akan menyulitkan daerah untuk melaksanakan tuntutan undang-undang untuk membentuk BPBD di daerah masing-masing seperti yang termaktub dalam pasal 83 ketentuan penutup bahwa: Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lambat 6 (enam) bulan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah terbentuk dan badan penanggulangan bencana daerah paling lambat 1 (satu) tahun sudah terbentuk. Bagaimana sebuah daerah

bisa melaksanakan tuntutan undang-undang sedang peraturan pelaksanaannya tidak jelas.

- Surat edaran Depdagri

Berdasarkan surat edaran Departemen Dalam Negeri RI terkait pembentukan BPBD boleh dalam bentuk Perwako. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri RI tersebut Nomor 061/2926/SJ Tanggal 19 Desember 2008 tentang tindak lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, pada hakekatnya tidak sesuai dengan pasal 25 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi :

“ Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan Penanggulangan bencana daerah diatur dengan peraturan daerah “.

Aturan ini membuat kerancuan dalam pelaksanaannya, bagaimana mungkin sebuah surat edaran dari lembaga resmi berbeda dengan aturan perundangan-undangan yang ada di atasnya. Hal ini tentunya menjadikan pemerintah daerah kebingungan, mana sebenarnya aturan yang benar. Ketidakpastian landasan hukum dan aturan teknis menjadi salah satu penyebab sebuah aturan terlambat untuk dilaksanakan.

3. Belum adanya kesiapan anggaran untuk menyegerakan pembentukan BPBD.

Selain belum adanya kesamaan pandangan tentang pentingnya sebuah BPBD, keterlambatan perumusan draft ranperda pembentukan SOTK BPBD juga disebabkan oleh belum tersedianya anggaran untuk pembentukan dan operasional BPBD di Kota Pariaman. Ini dapat dibuktikan dengan diundurnya pembahasan



penyusunan draft ranperda oleh pihak eksekutif selama lebih kurang 3 (tiga) bulan karena belum dianggarkannya biaya pembentukan BPBD pada APBD tahun 2009.

Pembentukan sebuah badan baru memang tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan anggaran di daerah. Apa jadinya jika BPBD dipaksakan dibentuk pada tahun 2009, sedangkan pada tahun tersebut belum ada anggarannya. Kita ketahui bahwa untuk biaya operasional, tunjangan, dan sebagainya di bebankan kepada APBD daerah masing-masing. Oleh sebab itu, pihak eksekutif sengaja untuk mengundur penyusunan draft ranperda, dan mengupayakan pengusulan pembentukan BPBD untuk dianggarkan pada tahun 2010.

#### 4. Perbedaan keinginan antara Eksekutif dan Legislatif dalam penentuan Tipe Bencana.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penentuan tipe bencana, Eksekutif lebih memilih Klasifikasi Bencana Tipe B dengan pertimbangan:

##### a. Beban Kerja yang sedikit

Terlihat dari perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah yang kecil)

##### b. Pertimbangan Kondisi Keuangan Daerah

Perbedaan Tunjangan Struktural untuk Tipe A dan Tipe B hampir Rp.100 juta/tahun, tunjangan daerah juga berselisih lebih dari Rp 150 Juta/tahun, belum lagi untuk biaya rutin, penyediaan sarana prasarana yang tidak sedikit akan berdampak kepada pengeluaran APBD yang cukup besar.

##### c. Kebutuhan Daerah

Daerah Kota Pariaman memang rawan bencana gempa akan tetapi tidak untuk bencana lain seperti gunung meletus(di Kota Pariaman tidak



terdapat gunung merapi), banjir, tanah longsor dengan potensi kejadian yang sangat kecil, sehingga tidak perlu aparaturnya yang banyak, karena gempa hanya bersifat insidental.

Sedangkan pemilihan Tipe A oleh Legislatif dengan pertimbangan:

- a. Daerah Kota Pariaman rawan bencana, terbukti dengan parahnya dampak yang ditimbulkan oleh bencana gempa bumi pada September 2009 di Kota Pariaman.
- b. Pertimbangan dari hasil konsultasi dengan instansi terkait untuk merekomendasikan Tipe A, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah pihak Legislatif melakukan konsultasi ke BPBD Propinsi Sumbar, BPBD Kota Padang, BNPB, Depdagri dan sebagainya diperoleh hasil rekomendasi tipe bencana A untuk Kota Pariaman.
- c. Tersedianya aparaturnya yang cukup berdasarkan data BKD Kota Pariaman. Tersedia aparaturnya yang cukup untuk memenuhi bagian yang akan ditempatkan pada BPBD yang akan dibentuk, sebagaimana laporan dari anggota BKD Kota Pariaman bahwa tersedia 24 orang untuk eselon II b dan sebanyak 99 orang untuk eselon III a.

Terdapatnya perbedaan keinginan dalam penetapan klasifikasi tipe bencana semakin memperlambat proses pengesahan perda pembentukan SOTK BPBD Kota Pariaman

Secara umum, adapun tahapan-tahapan dan rentang waktu yang dilakukan legislatif dalam pembahasan ranperda antara lain:

- Desember → Januari (Proses Penyerahan Ranperda hingga proses awal Legialatif)
- Februari → Maret (Konsultasi ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negri, Departemen Keuangan dan BNPB, BPBD Propinsi Sumbar, BPBD Kota Padang, Pemda Padang Pariaman)
- April → Juni (Hampir tidak ada kegiatan kecuali rapat pansus)
- Juli → September ( Rapat Pansus, Hearing dengan Eksekutif, hingga rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Akhir Fraksi)

Rentetan proses di atas menjelaskan kegiatan umum seperti apa gambaran pembahasan Ranperda SOTK BPBD oleh pihak Legislatif. Dapat dilihat bahwa proses pembahasan tersebut memakan waktu lebih kurang 9(sembilan) bulan.

Perbedaan keinginan dalam penentuan tipe bencana ini, menurut analisa penulis menjadi faktor utama terjadinya keterlambatan ditetapkan perda No.10 Tahun 2010 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Pariaman.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis sesuai hasil penelitian bahwa keterlambatan perumusan perda pembentukan SOTK BPBD disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah Kota Pariaman terkait urgensi keberadaan sebuah badan penanggulangan bencana dimana Pemko Pariaman belum merasa pembentukan BPBD sebagai sebuah kebutuhan daerah, sehingga proses pembentukan draft ranperdanya pun tidak disegerakan. Selain itu tertundanya pembahasan draft ranperda oleh Pemko Pariaman dikarenakan belum lengkapnya informasi terkait pembentukan BPBD, disertai dengan belum dianggarkannya pembentukan badan ini pada APBD 2009.

Secara umum, keterlambatan penetapan perda pembentukan SOTK BPBD lebih dominan terjadi pada tahapan proses politik dimana terdapat perbedaan keinginan antara pihak eksekutif dan legislatif dalam penentuan tipe bencana A Atau B untuk Kota Pariaman. Penetapan klasifikasi bencana akan berpengaruh kepada perbedaan jumlah aparatur yang akan ditetapkan dan tentunya akan berimbas kepada perbedaan jumlah anggaran yang cukup signifikan. Oleh sebab itu diperlukan penilaian dan pertimbangan yang cukup matang dalam memutuskan alternatif yang akan ditetapkan sebagai sebuah keputusan politik. Dengan berbagai pertimbangan diantaranya kondisi daerah yang sangat tinggi



resiko bencana dan pentingnya perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat maka ditetapkanlah tipe bencana A berdasarkan suara dari fraksi-fraksi di DPRD, berarti usulan alternatif kebijakan oleh pihak eksekutif ditolak oleh anggota fraksi sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan kebijakan publik.

Di samping itu, aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan perda pembentukan SOTK BPBD hanyalah aktor pemeran resmi, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif tanpa melibatkan aktor pemeran tidak resmi. Hal tersebut secara umum memang sering ditemui pada negara demokrasi bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan hanya pada kebijakan yang terkait hak-hak sipil. Kebijakan di atas mengatur tentang penambahan perangkat daerah, tidak terkait langsung pengaturan hak sipil, sehingga masyarakat tidak dilibatkan.

## 6.2 Saran

Dari hasil penelitian di atas, penulis menyarankan beberapa hal untuk menghindari keterlambatan dalam Perumusan Perda Pembentukan SOTK BPBD Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Hendaknya aturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan aturan undang-undang sebagai aturan tertinggi yang akan dijadikan acuan utama dalam melaksanakan tuntutan undang-undang.
2. Harus ada aturan yang mengatur dengan tegas masalah lamanya waktu pembahasan sebuah kebijakan publik, kalau bisa disertakan dengan sanksi tegas, sehingga kerugian yang muncul akibat sikap dan tindakan pembuat kebijakan dapat diminimalisir.

3. Masyarakat harus lebih cerdas dalam mencari informasi terkait kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, diharapkan setiap perumusan kebijakan harus disertai dengan partisipasi masyarakat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Erwan Purwanto. 2006, *Memahami Kompleksitas Manajemen Bencana, dalam Manajemen Bencana: Belajar dari Pengalaman Aceh*.
- Dunn, William N. 2009. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Dye, Thomas R. 1978. *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, New Jersey
- Faisal, Sanapiah. 1999, *Penelitian Kualitatif. Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3 Malang, Malang.
- Islamy, M. Irfan. 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.
- Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nugroho, Riant Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Philipus dan Nurul Aini. 2004, *Sosiologi dan Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Purnomo, Hadi-Ronny Sugiantoro, 2010, *Manajemen Bencana Respon dan Tindakan terhadap Bencana*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Subarsono, AG. 2005, *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Suwitri, Sri. 2008, *Konsep dan Dasar Kebijakan Publik*, Pusdodakarya Undip, Semarang.
- Usman, Husaini. 1995, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994, *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia, Jakarta.



Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*, Media Pressindo Yogyakarta.

[http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB\\_I\\_BUDAYA\\_POLITIK\\_DI\\_INDONESIA?&show\\_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://mjieschool.multiply.com/journal/item/10/BAB_I_BUDAYA_POLITIK_DI_INDONESIA?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem)

www.BNPB.com. *Dampak Bencana Gempa Sumatera Barat, 2009*

[www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8850](http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/8850)

[www.pariaman.go.id](http://www.pariaman.go.id)

Undang – Undang No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerahs

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana Nasional No 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dasar Pertimbangan Eksekutif dalam Penetapan Klasifikasi Tipe Bencana

Hasil Notulen Rapat DPRD Kota Pariaman dalam pembahasan Ranperda BPBD

Laporan Hasil Konsultasi ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Departemen Keuangan RI, dan BNPB di Jakarta

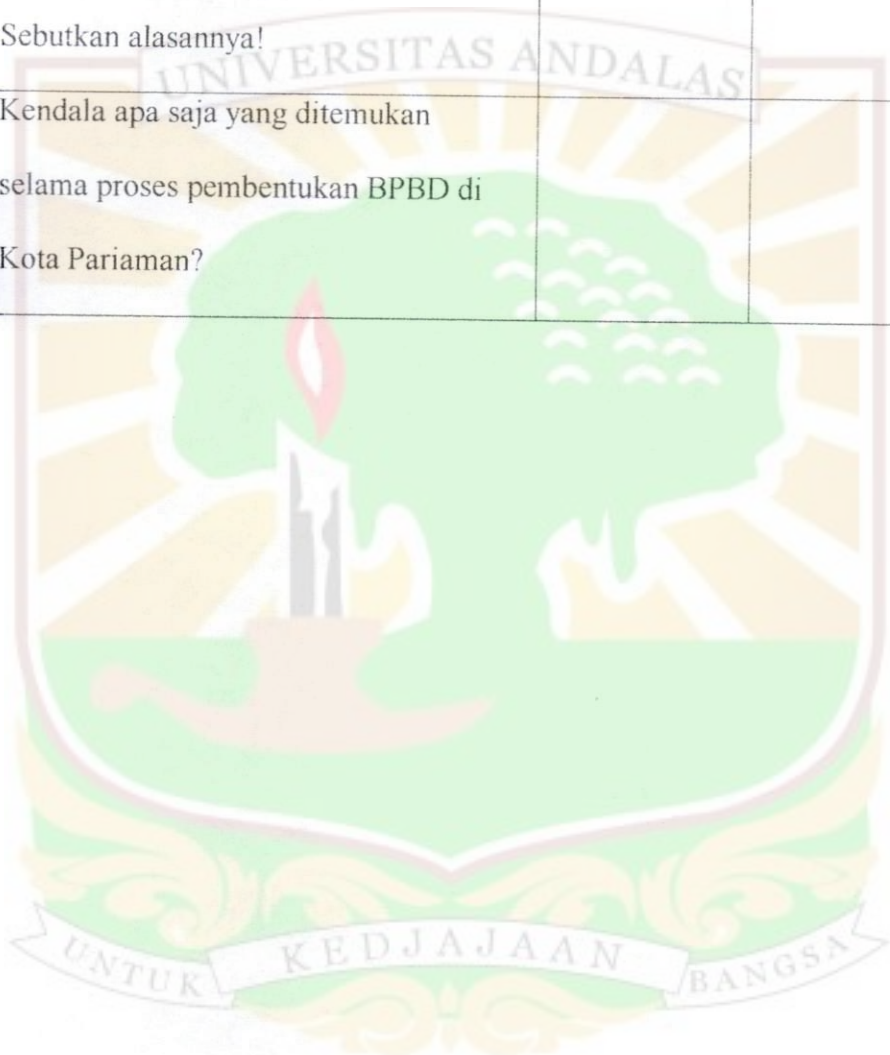
Laporan Studi banding Pansus I ke Sleman dan Yogyakarta

Telaahan Staf Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Pariaman

### DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

No.	Pertanyaan Penelitian	EKSEKUTIF	LEGISLATIF
1	Sebelum terbentuk BPBD, selama ini siapa yang bertanggung jawab terhadap penanggulangan bencana di Kota Pariaman?		
2	Bagaimana penanganan bencana yang telah berlangsung di Kota Pariaman?		
3	Apakah menurut Bapak/Ibu diperlukan BPBD di Kota Pariaman?		
4	Bagaimana mekanisme pembentukan BPBD di Kota Pariaman?		
5	Bagaimana kesiapan Pemko Pariaman dalam membentuk BPBD itu sendiri?		
6	Adakah tuntutan masyarakat untuk mendorong pembentukan BPBD tersebut?		
7	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait keberadaan BPBD sebagai SKPD baru di Kota Pariaman?		
8	Apa yang menyebabkan Perda pembentukan SOTK BPBD di Kota		

	Pariaman terlambat ditetapkan?		
9	Terkait klasifikasi tipe bencana, menurut Bapak/Ibu tipe apa yang paling tepat untuk diterapkan di Kota Pariaman?  Sebutkan alasannya!		
10	Kendala apa saja yang ditemukan selama proses pembentukan BPBD di Kota Pariaman?		





**KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

No. : 992 / H16.S2/ A/ 2010

Tentang

**PENGANGKATAN SUSUNAN KOMISI PEMBIMBING  
PROGRAM MAGISTER (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ANDALAS**

ATAS NAMA : **Ulya Fitri**  
NO. BP : **0821202057**  
PROGRAM STUDI : **PWD : Pemusatan Polokda**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

- Membaca** : Permohonan Pengesahan Susunan Komisi Pembimbing bagi : **Ulya Fitri**
- Menimbang** : bahwa permohonan tersebut di atas dapat disetujui dan perlu ditetapkan dengan surat keputusan :
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1990;  
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999;  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :  
a. Nomor 0429/0/1992;  
b. Nomor 0196/0/1995  
5. Surat Keputusan DIKTI No.361/DIKTI/Kep/1996;  
6. Surat Keputusan Rektor Unand No. 710/XIA/A/Unand-2004

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Bagi mahasiswa yang bernama : **Ulya Fitri** BP. **0821202057** adalah mahasiswa Program Magister (S2) Program Pascasarjana Universitas Andalas Padang, Program Studi : **PWD : Pemusatan Polokda**
- KEDUA** : Mahasiswa tersebut di atas mempunyai Susunan Komisi Pembimbing Terdiri dari :
1. **Prof.Dr.Afrizal,MA** (Ketua)
  2. **Dr.Sri Zulchairiyah,MA** (Anggota)
  3. (Anggota)
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan dan sesuai dengan peraturan Universitas Andalas yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan diperbaiki kembali, jika kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada Tanggal : 01 Nopember 2010  
DIREKTUR,



**Prof.Dr.Ir. H. Novirman Jamarun, M.Sc**  
**NIP. 19551106 198003 1 001**

Tembusan :

1. Ketua Komisi Pembimbing
2. Anggota Komisi Pembimbing
3. Ketua Program Studi **PWD : Pemusatan Polokda**
4. Mahasiswa Ybs.
5. Arsip.



# PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No.44 Telp (0751) 92202,91012 kode pos : 25538

### Surat Keterangan Selesai Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NOVIARDI SH  
Jabatan : Kabag Hukum dan HAM  
NIP : 19661104 198903 1 011

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ULYA FITRI S.IP  
BP : 0821202057  
Program Studi : POLOKDA Pascasarjana Unand  
Alamat : Jln.Kartini No.1 Pariaman

Mahasiswa yang bersangkutan di atas memang benar telah menyelesaikan penelitian di Kantor Sekretariat Kota Pariaman.

Pariaman, 13 Januari 2012



NOVIARDI,SH

NIP. 19661104 198903 1 011





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
[DPRD]  
KOTA PARIAMAN**

Jln Siti Manggopoh Pariaman Telp (0751 ) 690960

Nomor : /Pansus I/DPRD/III/ 2010  
Lampiran :  
Perihal : Perpanjangan Waktu  
Pembahasan Ranperda  
Pansus I

Pariaman, 9 Februari 2010

Kepada Yth :

Ketua DPRD Kota Pariaman  
di-

Pariaman

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Rapat Pansus I DPRD Kota Pariaman yang diselenggarakan pada tanggal 2 Februari dan 8 Februari 2010 Rapat memutuskan bahwa dipandang perlu perpanjangan waktu Pembahasan 2 buah Ranperda antara lain:

1. Penanggulangan Bencana;
2. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Perlu kami sampaikan pada Ketua DPRD Kota Pariaman bahwa Pansus I telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pemahaman dan pendalaman aturan-aturan pendukung berkaitan dengan korban bencana
2. Studi banding ke Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta
3. Konsultasi ke Badan Penanggulangan bencana Prop. Sumbar dan Kota Padang

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

UNTUK

KEDJAWAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PARIAMAN  
KETUA PANSUS I,

( MULYADI )



**LAPORAN KEGIATAN KUNJUGAN  
KERJA/STUDI BANDING**

**P**

**A**

**N**

**S**

**U**

**S**

**I**



**KE KABUPATEN SLEMAN DAN KOTA  
YOGYAKARTA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA JANUARI 2010**

**LAPORAN : HASIL KUNJUNGAN KERJA STUDY BANDING  
PANSUS I DPRD KOTA PARIAMAN KE KAB.  
SLEMAN DAN KOTA YOGYAKARTA PROPINSI  
YOGYAKARTA PADA TANGGAL 26 S/D 29  
JANUARI 2010**

**a. Pendahuluan**

Berdasarkan penyampaian pandangan umum Walikota Pariaman tentang 10 ( Sepuluh ) buah Ranperda tanggal 15 Januari 2010 diruangan Rapat Utama DPRD Kota Pariaman bahwa pembahasan 10 (sepuluh) Ranperda Kota Pariaman Tentang sebagai berikut:

1. Penanggulangan Bencana
2. Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman
3. Pengelolaan Barang Milik Daerah
4. Penyelenggaraan Adminitrasi Kependudukan
5. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Hiburan
7. Retribusi Pemberian Izin Penyelenggaraan komunikasi dan Informasi
8. Retribusi Pemakai Kekayaan Daerah
9. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
10. Retribusi Pelayanan Pasar

Pada tanggal 20 Januari 2010 dilaksanakan Rapat Paripurna pembentukan Pansus tentang 10 (sepuluh) buah Ranperda, maka terbentuklah Pansus I, Pansus II, dan Pansus III pada tanggal 15 s/d 18 Februari 2010 dilaksanakan Rapat Internal masing-masing Pansus

Pada Pansus I mendapat tugas dalam pembahasan Ranperda 2 (dua) buah yaitu :

1. Ranperda Penanggulangan Bencana
2. Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Pansus I DPRD Kota Pariaman, adalah sebagai berikut :

1. Mulyadi (Ketua Pansus )
2. Muhammad Yasin. S. Tp (Wakil Ketua Pansus)
3. Priyaldi. S. Sos (Sekretaris )
4. Amrizal Tanjung (Anggota)
5. Yusrizal. SE (Anggota)
6. Ibnu Hajar. SH (Anggota)



Pada tanggal 25 Januari 2010 lanjutan Rapat Pansus I dalam rangka pembahasan Ranperda Tentang Penanggulangan Bencana dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariama, Pembahasan Materi dalam Rapat Pansus I beberapa kesimpulan, untuk study banding Kunjungan kerja keluar Daerah sebagai berikut:

1. Kunjungan Kerja/ Study Banding dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 29 Januari 2010
2. Daerah yang dikunjungi adalah Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta Propinsi DIY
3. Topik Study banding tentang penanggulangan Bencana dan Organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana Daerah Kab. Sleman dan Kta Yogyakarta Propinsi DIY yang akan dilaksanakan di Kota Pariaman
4. Materi hasil Rapat Pansus I tanggal 25 Januari 2010, sebagai berikut:
  - a. Dasar Hukum lahirnya Perda tentang Penanggulangan Bencana (BPBD) di Daerah yang dikunjungi dan status Eselonnya Eselon III/a atau III/b
  - b. Mekanisme Proses pengajuan dari Walikota ke DPRD dan Pembatasan Jumlah orangnya serta alamat Pejabat BPBD
  - c. Pengelola dan pelaksana bantuan, pengawas dari Pemerintah Daerah atau Pemerintahan Daerah ( Walikota bersama DPRD)
  - d. Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing, Non Pemerintah, LSM dan lain-lain dalam penanggulangan Bencana
  - e. Pembantuan pelaksana pengelola Bencana, Sakorlak dan peran Muspida dalam menentukan Sakorlak
  - f. Konsultasi ke Pusat Yakni PNPB setelah dilaksanakan studi banding ke beberapa Daerah

#### **b. Tujuan Study Banding Pansus I**

Tujuan adalah untuk mencari bentuk format materi dan pengalaman Daerah alin dalam menanggulangi Bencana gempa bumi, dan Bencana lainnya, sehingga Ranperda yang sedang dibahas untuk ditetapkan menjadi Perda Penanggulangan Bencana akan lebih baik lagi, untuk mencapai kesempurnaannya dalam pelaksanaan Operasionalnya.

Alasan lokasi study banding Daerah Yogyakarta yang dikunjungi, karena Daerah tersebut merupakan Daerah yang telah ditimpa gempa tahun 2006 yang lau, banyak mengalami kerugian harta benda, nyawa dan sebagainya, dan bencana tersebut tidak menimbulkan Tsunam seperti sama dengan yang dialami



di Kota Pariaman 7,9 Skala Richter, sedangkan di Yogyakarta lebih kecil skalanya dari Pariaman (5,6)

#### **c. Peserta**

Pansus I dalam melaksanakan kegiatan Study Banding ke Daerah Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta, sesuai hasil keputusan Rapat Pansus I tanggal 25 Januari 2010 diikuti semua Anggota Pansus dan Pendamping

1. Mulyadi (Ketua Pansus )
2. Muhammad Yasin. S. Tp (Wakil Ketua Pansus)
3. Priyaldi. S. Sos (Sekretaris )
4. Amrizal Tanjung (Anggota)
5. Yusrizal. SE (Anggota)
6. Ibnu Hajar. SH (Anggota)
7. Drs. Lanefi (Pendamping)

#### **d. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

Hasil Keputusan Rapat Pansus I, kegiatan Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja mulai tanggal 26 s/d 29 Januari 2010 ke Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta Prop. DIY sebagai Berikut:

1. Rombongan berangkat dari Pariaman pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010, pada Jam 11.00 Wib sampai di Bandara (BIM) jam 13.00 dan berangkat ke Jakarta Jam 13.30 dengan Pesawat Lion Air(transit) dan sampai mendarat di Cengkareng (Jakarta) jam 15.00 Wib
2. Pada Jam 17.30 transit Rombongan Pansus I dengan Pesawat Lion Air menuju Yogyakarta dan sampai Jam 18.00 di Bandara Yogyakarta sebelum menuju Hotel makan malam di Bandara Yogyakarta jam 20.00
3. Pada malam itu menuju Kab. Sleman dan menginap di Hotel Ghanhes INN sesuai dengan saran Pemkab Sleman di Wilayah Daerah Sleman
4. Pagi Jam 08.00, hari rabu tanggal 27 Januari 2010, dihubungi kembali Pemkab Sleman ( Kasubag Umum ) untuk menerima Kunjungan Pansus I dengan Instansi Kab. Sleman dan setuju menerima Jam 09.00 Wib
5. Pertemuan dilaksanakan jam 09.30 wib dan langsung diterima oleh Asisten I Yulius Priyatno beserta SKPD terkait sebagai berikut

1. Dinas Sosial Tenaga Kerja
2. Badan Kesbang Linmas (trantib)
3. Kabag Organisasi

4. Dinas Kesehatan
5. Bagian Umum

Dari semua kegiatan dilanjutkan ke Lapangan/ lokasi Daerah Gempa serta Persiapan **Kunjungan Kerja** untuk besoknya di Kota Yogyakarta dan *Penginapan* pindah dari Hotel Ghadrea INN (Sleman) ke Hotel Grace Kota Yogyakarta

6. Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 Rombongan Pansus I DPRD Kota Pariaman berangkat dari hotel Grace jam 09.00 Wib menuju Kantor Walikota Yogyakarta pertemuan dimulai Jam 10.00 Wib disambut oleh Pemerintah Yogyakarta yang diwakili oleh Kepala Kantor Linmas dan Kebakaran beserta Staf diruangan Khusus Kepala Kantor dan berakhir sampai jam 12.30 Wib
7. dan sorenya melihat Kota Yogyakarta serta persiapan untuk berangkat menuju Jakart dan malamnya kembali ke Padang dengan Pesawat Lion Air

e. **Pelaksanaan Kegiatan Studi Banding**

Studi Banding Pansus I DPRD Kota Pariaman dilaksanakan selama 4 (empat) hari kegiatan, selama 2(dua) hari mengadakan pertemuan dan studi banding dengan Pemerintah Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta Propinsi DIY sebagai berikut:

1. Rombongan Pansus I DPRD Kota Pariaman ke Kab. Sleman diterima oleh Asisten Pemerintahan Setda Kab. Sleman denga SKPD terkait, dihadiri oleh Badan Kesbang linmas, Dinas Sosial tenaga kerja, Kabag Organisasi, Dinas Kesehatan dan Bag. Umum acara dimulai jam 09.30 Wib bertempat di Ruang Pertemuan Setda Kab. Sleman, Asisten memperkenalkan SKPD terkait, dan menyampaikan pemaparan wilayah Kab. Sleman dan termasuk Bencana Gempa yang terjadi di Daerah Kab. Sleman tahun 2006 yang lau serta penanganan secara Kelembagaan dan bantuan-bantuan yang diterima dan disalurkan scara nasional, kemudaina dilanjutkan dengan kat perkenalan oleh ketua Pansus I yakni Mulyadi dan menyampaikan maksud dan tujuan studi banding ke Daerah Bencana Gempa Bumi dan kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab secara tekhnis dan gambaran umum penanganan Bencana Gempa Bumi di Klab. Sleman, setelah pemaparan dan Tanya jawab dilakukan ternyata belum membentuk Lembaga atau



Badan yang menangani Khusus bencana alam terjadi, seperti Gempa Bumi, Gunung Merapi meletus, angin puting beliung dan tanah longsor dan sebagainya. Belum terlaksananya secara konkrit Undang-Undang 24 Tahun 2007 tetap tetapi penanggulangan bencana ( pasal 18 ayat b ) dengan PP 46 tahun 2008. akan tetapi Pedoman Organisasi dan Tata cara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Disetiap Propinsi dibentuk BPBD Propinsi dan disetiap Kab./Kota dapat dibentuk BPBD Kab./ Kota
  - b. Pembentukan BPBD Propinsi dan BPBD Kab./Kota ditetapkan dengan Perda
2. Lembaga yang menangani Bencana Alam perlindungan masyarakat dan penanggulangan Bencana selusuri dengan Perda No 09 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kab. Sleman yang secara umum tergambar SOTK Kab. Sleman perangkat Daerah Meliputi Sebagai berikut:
- a. Sekretaris Daerah
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Dinas
  - d. Badan
  - e. Masyarakat
  - f. RSUD
  - g. Kantor Satuan PP
  - h. Kecamatan
3. Badan Kesatuan Bangsa, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala –Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bapak Bupati melalui Sekda, Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat DPRD terdiri dari
    - Sub. Bag. Umum dan Kepegawaian
    - Sub. Bag. Keuangan
    - Sub. Bag. Perlengkapan dan Kepegawaian
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
    - Sub. Bid. Pembinaan Masyarakat



- Sub. Bid. Penghayatan Wawasan Kebangsaan
  - Sub. Bid. Potensi dan Operasional Perlindungan Masyarakat
  - d. Bidang Penanggulangan Bencana
    - Sub. Bid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
    - Sub. Bid. Operasional Penanggulangan Bencana
    - Sub. Bid. Rehabilitas dan Rekonstruksi
  - e. Bidang Penanggulangan Bahaya Kebakaran
    - Sub. Bid. Pemadam Kebakaran
    - Sub. Bid. Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
  - f. Unit Pelaksanaan Tekhnis
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
4. Penanganan secara Formal menurut (SOTK) hanya Eselon III yaitu Kepala Bidang Penanganan Bencana yang mempunyai 3 Sub. Bid. Namun Perencanaan **Perda** belum dapat di realisasikan hanya dalam bentuk naskah Akademi Universitas Gajah Mada (UGM). dalam pembiayaan penanganan bencana setiap SKPD yang terkait selalu mengalokasikan dana untuk bencana, bencana alam yang sering terjadi, disamping Gempa Bumi, gunung meletus, angin puting beliung, dan banjir lahar dan sebagainya

## 2. Studi Banding ke Kota Yogyakarta Propinsi DIY

Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 jam 09.00 Wib Pansus I langsung menuju Kantor Walikota Yogyakarta, dan disambut oleh Kepala Kantor Linmas dan Kebakaran di ruangan Pertemuan secara formal, Studi Banding, konsultasi dan koordinasi dengan Pemko Yogyakarta berjalan dengan baik diawali dengan Pemaparan Wilayah Yogyakarta, Tugas pokok dan fungsi serta Bencana Gempa yang terjadi dan penanganan secara Profesional, hal ini dapat digambarkan secara umum sebagai berikut :

1. Perda Tentang Penanganan Bencana menurut PP Nomor 46 Tahun tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, belum terlaksana menurut semestinya namun baru dalam bentuk Rancangan **Inisiatif** dari DPRD Kota Yogyakarta dan Ranperda tersebut dalam Proses Konfirmasi Sinkronisasi ke Propinsi yang di Koordinir oleh Bag. Umum
2. Lembaga yang menangani sekarang sesuai dengan Perda No 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan dan Tugas

pokok Lembaga Tekhnis Daerah Kota Yogyakarta Penanganan Bencana Alam oleh Lembaga/ Kantor Penanggulangan Kebaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat mempunyai Tugas Pokok Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanggulangan Kebaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat

3. Organisasi Kantor Penanggulangan Kebaran Bencana dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

- Sub. Bag. Tata Usaha
- Seksi Pencegahan dan Pengawas Kebaran
- Seksi Operasional
- Seksi Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat
- Kelompok Jabatan fungsional

4. Dalam Pelaksanaan Kegiatan penanggulangan Bencana Alam, fungsinya melekat pada SKPD masing-masing baik dalam Perumusan data, kegiatan simulasi, dan fisik lainnya serta pembagian kegiatan dalam pengganti

- Logistik Oleh Sosial Tenaga Kerja
- Komunikasi oleh Humas Pemko
- Kesehatan oleh Dinas Kesehatan
- Pendanaan oleh Keuangan

Dan SKPD lainnya yang terkait pertemuan, diakhiri dengan silaturahmi dengan tukar Cenramata antara Kedua Wilayah dengan sambutan yang cukup bersahabat dan Dokumentasi masing-masing

### Kesimpulan

1. Dalam Kegiatan studi banding Kunjungan Kerja Pansus I DPRD Kota Pariaman ke Kab. Sleman dan Kota Yogyakarta Prop. DIY telah berjalan dengan baik dan lancar. Namun materi Rancangan Perda Kota Pariaman sebagai berikut:

- Ranperda Tentang Penanggulangan Bencana
- Ranperda Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman

Belum dapat diselesaikan **Karena** Kedua Daerah Kunker/Studi Banding tersebut masih memakai SOTK lama atau belum menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2007 PP Nomor 46 Tahun 2008 tetap berpedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanganan Bencana Daerah



2. Tim Pansus I akan berkonsultasi terlebih dahulu ke Pusat yaitu BNPB/ Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri dan melanjutkan proses Ranperda ini sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh BANMUS atau kesepakatan kembali dalam Rapat Pansus

## Penutup

Demikian Laporan ini dibuat untuk bahan spserlunya dan Pedoman bagi yang memerlukan, Terima Kasih







# BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

## SEKRETARIAT UTAMA

Jl. Ir. H. Djuanda No. 36 Jakarta 10120  
Telp. (021) 344 2734, 344 3076, 345 8400, 350 7521; Fax. (021) 350 5075, 351 9737, 345 8500  
Website : <http://www.bnpb.go.id>

Jakarta, 3 Mei 2010

Nomor : B. 344/BNBP/V/2010  
Lamp. : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Bantuan dana dari BNPB untuk  
Klasifikasi BPBD Kabupaten/Kota

Kepada Yth.  
Walikota Pariaman  
Jalan Imam Bonjol No. 44  
Pariaman

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:180/1586/HUK-201 tanggal 12. April 2010 perihal Bantuan Dana Dari BNPB Pusat untuk Klasifikasi BPBD Kab/Kota dengan Tipe A, dapat kami sampaikan bahwa penetapan klasifikasi BPBD tidak ada relevansinya dengan pemberian dana bantuan.

Penetapan organisasi BPBD tetap mengacu pada Peraturan Menteri Nomor: 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, khusus penentuan klasifikasi BPBD Kabupaten/Kota adalah berdasarkan kemampuan kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan dilihat dari tingkat kerawanan daerah tersebut.

Adapun pemberian dana bantuan yang dikoordinasikan BNPB yaitu dana pemulihan pasca bencana (dana rehabilitasi dan rekonstruksi) mengacu pada penilaian kerusakan dan kerugian dengan menggunakan metode Damage and Lost Assessment ( DaLA) dan Post Disaster Needs Assessment ( PDNA)

Demikian untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya kami menyampaikan terimakasih.

Plt. Sekretaris Utama

Ir. Sugeng Triutomo, DESS

Tembusan Yth:  
Kepala BNPB (sebagai laporan)



## WALIKOTA PARIAMAN

Jalan Imam Bonjol No. 44 Telp. (0751) 92202, 91012 Kode Pos : 25538

Pariaman, 18 Mei 2010

Nomor : 180 / 2230/ HUK-2010  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Bantuan Dana Dari BNPB Tidak Berdasarkan Atas Klasifikasi Tipe BNPB Kab/ Kota.**

Kepada Yth :

- ① Ketua DPRD Kota Pariaman.
2. Ketua Komisi A DPRD Kota Pariaman.
3. Ketua Pansus II DPRD Kota Pariaman

di  
TEMPAT

Dengan hormat,

Sehubungan dengan masih belum tercapainya kesepakatan mengenai Klasifikasi Tipe tentang Ranperda Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pariaman, maka kami Pihak Eksekutif melakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Maka untuk itu kami sampaikan kepada Saudara bahwa penetapan klasifikasi BPBD tidak ada relevansinya dengan pemberian bantuan dana, yang mana hal dimaksud termasuk dasar bagi pihak Legislatif untuk menetapkan BPBD dengan Klasifikasi Tipe A, untuk penentuan klasifikasi BPBD Kab/Kota adalah berdasarkan beban kerja, kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan sebagaimana dijelaskan oleh Surat dari BNPB (Terlampir).

Sehubungan dengan hal diatas maka kami harapkan pertimbangan DPRD Kota Pariaman untuk dapat menyetujui BPBD Kota Pariaman dibentuk dengan tipe B.

Demikianlah disampaikan, atasnya perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala BNPB di Jakarta.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD ) KOTA PARIAMAN

Jln. Siti Manggopoh No Telp (0751) 690960 Manggung Pariaman

## NOTULEN RAPAT

Nomor : /02/Notulen - Pansus/DPRD/VII/2010

Pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Juli Dua Ribu Sepuluh. Pansus I DPRD Kota Pariaman telah melakukan Hearing dengan Dinas Instansi terkait dalam pembahasan RANPERDA, SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- A. Rapat Dipimpin oleh : Mulyadi ( Ketua Pansus I )
- B. Peserta yang hadir :
  - 1. Pansus I DPRD Kota Pariaman
    - a. Muhammad Yasin, S. Tp
    - b. Priyaldi, S. sos
    - c. Yusrizal, SE
  - 2. Exsekutif :
    - a. Asril R ( mewakili Asisten I Setdako Pariaman )
    - b. Linda Osra, SH, MH ( Kabag Hukum Setdako Pariaman )
    - c. Indra Syamsu ( Bapeda, Setdako Pariaman- )
    - d. Budi Utama ( Kesbang Linmas )
    - e. Benyamin ( Dinas Sosial dan Tenaga Kerja )
    - f. Hertati Taher ( BKD Kota Pariaman )
    - g. Rita Masri ( BKD Pariaman )
    - h. Ridwan N. ( Setwan Set DPRD Kota Pariaman )
    - i. Hasan Basri Majid ( Set DPRD Kota Pariaman )
- C. Yang Tidak Hadir :
  - a. Ibnu Hajar, SH ( izin )
  - b. Amrizal Tanjung ( izin )
- D. Jalan Rapat
  - 1. Salam dan kata pengantar disampaikan pimpinan Sidang Priyaldi Sekretaris Pansus I pada pukul 12.15 WIB.
  - 2. Pimpinan Rapat minta pada Asisten I yang diwakili oleh Asril R menjelaskan bahwa untuk memperjelas dan mendudukan masalah SOTK BPBD exsekutif melakukan konsultasi ke DEPDA GRI dan BNPB Pusat.



Sebagai masukan kesempurnaan RANPERDA tersebut untuk kejelasan selanjutnya diminta Kabag Hukum Setdako Pariaman menjelaskan hasil kunjungan berkaitan surat walikota.

3. Penjelasan Linda Osra, SH, MH Sehubungan Surat Walikota Nomor : 180 / 2230 / Huk – 2010 Bantuan Dana BNPB tidak berdasar atas klarifikasi Tipe BNPB Kab/Kota.
  - Bahwa basar bantuan penanggulangan gempa didasarkan besar kecil dampak gempa bukan klasifikasi tipe SOTK BPBD ( A dan B )
  - Bahwa Tipe klarifikasi SOTK BPBD ditentukan ( sesuai pasal 20 Permendagri No. 46 tahun 2008 ) antara lain :
    - a. Beban kerja
    - b. Kemampuan Keuangan
    - c. Kebutuhan
  - Bahwa SOTK BPBD tidak bisa ditambah/dirubah sesuai dengan SOTK yang ada yang tertera dalam Permendagri NO. 46 Tahun 2008. Sesuai dengan hasil kunjungan konsultasi pada DPRD Kota Pariaman.
4. Tanggapan Anggota
  1. Mulyadi
    - Masalah surat yang disampaikan walikota sebenarnya salah, penanganan penanggulangan bencana masuk pansus I bukan pansus II
    - Anggota dewan sebenarnya tidak mempermasalahkan tipe BPBD. Akan tetapi perlu kajian lebih dalam dan demi kepentingan masyarakat. Jika kita memilih tipe A penanggulangan bencana oleh Pusat.
  2. Yusrizal, SE
    - Pansus I berpendapat sampai sekarang banyak masyarakat yang tidur ditenda, ini menandakan bahwa penanganan bencana benar-benar belum serius. Coba kita lihat Pusat/Propinsi dan kita ikut bersama menanggulangi bencana masih berantakan apa lagi jika penanganan bencana oleh lembaga yang kecil Tipe B. Ini berakibat kehancuran, perlu dipertimbangkan Kota Pariaman adalah daerah siklus dilalui pusat gempa. Dan daerah pesisir pantai menilai Tipe SOTK BPBD malah Tipe.
    - Ada pendapat jika kita memilih Tipe A SOTK BNPB, setelah dibentuk petugas hanya duduk tidak ada yang dikerjakan. Ini perlu dipikirkan bencana bukan gempa saja bisa banjir bisa gelombang pasang dan sebagainya.
    - Penundaan SOTK BPB bukan dasar besar bantuan akan tetapi demi kepentingan masyarakat agar korban bencana bisa tertangani harus ada kajian lebih dalam.
    - Pemadam Kebakaran sebaiknya disatukan dengan BPBD karena tuga pemadam kebakaran 2 X 24 jam dan tenaga sudah terlatih.

- Dengan digabung Pemadam Kebakaran dan BPBD maka bantuan sosial lain jadi terputus.

### 3. Muhammad Yasin, S.Tp

- Belum ada kata searah antara Eksekutif dengan DPRD dan perlu pembahasan dengan pihak atas ( Wako ) ini pernah diundang tidak pernah hadir.
- Pansus I memilih SOTK BPBD dengan tipe A adalah dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat akibat musibah gempa bukan alasan dana yang diterima dari BNPB.
- Ada isu dengan masyarakat bahwa DPRD Kareh Angok, dalam menentukan Tipe A sejalan penentuan SOTK. BPBD ini tidak benar hanya demi kepentingan masyarakat yang diperjuangkan.

#### Tanggapan Eksekutif

##### 1. Kepala Kesabang Linmas

- Jelas aturan yang mengatur mengenai SOTK BPBD sudah jelas apa tipe A dan Tipe B yang dipilih. Jika berbicara masalah gempa Kota Pariaman masuk perlintasan pusat gempa. Sebagai dikemukakan BPBD provinsi ada 5 daerah di Sumbar yang rawan bencana gempa termasuk Kota Pariaman.
- Kalau dilihat kenyataan pembahasan SOTK, BPBD tidak ada titik temu antara eksekutif dan DPRD. Sebagai jalan keluar diadakan pertemuan pihak atas ( Wako ) dan pansus I.
- Keterlambatan penanganan gempa bukan alasan kelambanan perugas akan tetapi bantuan diunda pencairannya.

##### 2. Badan Kepegawaian Daerah

- Bagi Kepegawaian tidak jadi masalah apa Tipe A atau Tipe B, pegawai untuk mengisi jabatan cukup.  
Misalnya Eselon II b 24 orang  
Eselon III a 99 orang

Jika Pemadam Kebakaran digabung dengan BPBD Eselon jadi naik menjadi III A yang dulu IV a.

##### 3. Pemadam Kebakaran

Menerima keputusan yang ditetapkan apa di Departemen Sosial atau BPBD.

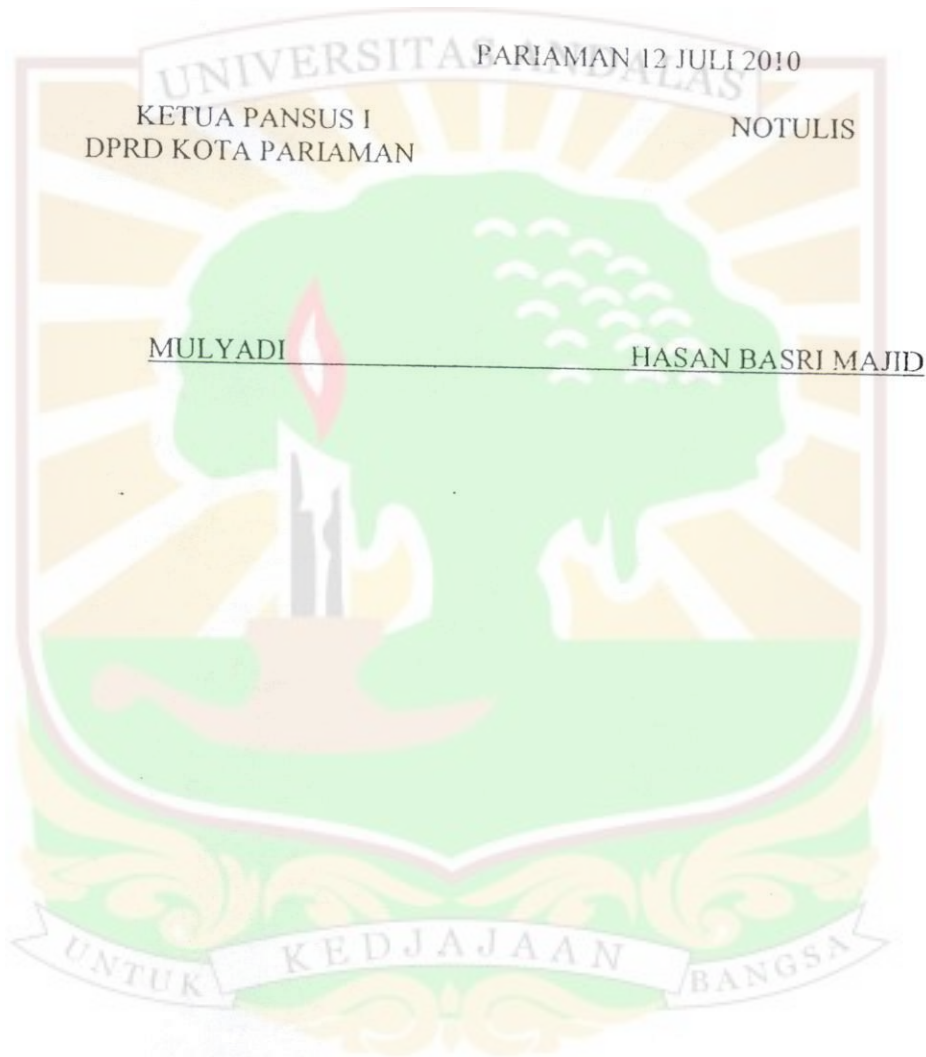
#### Kesimpulan

- Dari hasil pertemuan dapat disimpulkan bahwa SOTK penanggulangan Bencana Tipe A dengan alasan semua anggota pansus dan juga Eksekutif sebagian menyetujui secara tidak langsung.



2. Untuk pembahasan lanjutan Pansus I akan mengundang Exsekutif untuk sidang pembahasan lebih lanjut.
3. Demi pendalaman pembahasan SOTK BPBD, perlu dilakukan konsultasi dengan exsekutif ke Mendagri dan BNPB Pusat.
4. agar diusulkan perpanjangan waktu pembahasan RANPERDA SOTK BPBD Kota Pariaman.

Rapat ditutup pada pukul 4.30 Wib oleh Sekretaris Pansus DPRD Kota Pariaman.  
Demikian disampaikan untuk digunakan seperlunya.







# PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Imam Bonjol No. 44 Pariaman Telp.( 0751) 92202, Fax. 91012

### L A P O R A N

Konsultasi Pembentukan SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan Jakarta, 24 s/d 28 Agustus 2009

#### I. DASAR

Surat Tugas Sekretaris Daerah Kota Pariaman Nomor 128 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009 kepada Kepala Bagian Hukum & Organisasi dan Plt. Kasubag Organisasi & Aparatur Bagian Hukum & Organisasi Setdako Pariaman untuk mengkonsultasikan Pembentukan SOTK Badan Penanggulangan Bencana Daerah ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan RI di Jakarta

#### II. ISI LAPORAN

Terkait dengan pendahuluan di atas, maka dapat kami sampaikan/laporkan kepada Bapak sebagai berikut :

bahwa dalam Pasal 3 Dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Menimbulkan Banyak Penafsiran Yang mendatangkan banyak pertanyaan, diantaranya;

a. Secara Ex-Officio Dijabat Oleh Sekretaris Daerah;

bahwa Secara Ex-Officio Dijabat Oleh Sekretaris Daerah sesuai perintah pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi:

#### Pasal 18

(1) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk badan penanggulangan bencana daerah.

Badan penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; dan
- badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIA.

b. Secara Ex-Officio Dijabat Oleh Sekda menyebabkan terjadinya Pejabat Pengguna Anggaran Ganda Yang Dijabat Sekretaris Daerah;

bahwa Secara Ex-Officio Dijabat Oleh Sekda menyebabkan terjadinya Pejabat Pengguna Anggaran Ganda Yang Dijabat Sekretaris Daerah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Sekretaris Daerah sesuai pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai satu-satunya pejabat eselon IIA di kabupaten/kota, yang pada pelaksanaannya tetap mendapatkan satu tunjangan.



- c. Keberadaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu dikonsultasikan ke Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI apakah diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan PP 41 Tahun 2007, karena tim pengarah penanggulangan bencana bisa dibentuk melalui suatu keputusan walikota;

bahwa keberadaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah sesuai dengan Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; Pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berbunyi :

**(1) UNSUR PENGARAH PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 22**

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi:
  - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
  - b. memantau; dan
  - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

**(2) UNSUR PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 23**

- (1) Pembentukan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b merupakan kewenangan pemerintah daerah.
- (2) Unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. koordinasi;
  - b. komando; dan
  - c. pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- (3) Keanggotaan unsur pelaksana penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga profesional dan ahli.

- d. Pembentukan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota perlu mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri;

bahwa Pembentukan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk Peraturan Walikota perlu mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri yang suratnya sudah kami sampaikan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Dalam Negeri.



### III. KESIMPULAN

Dari beberapa hal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

- (1) BPBD Secara Ex-Officio Dijabat Oleh Sekretaris Daerah telah sesuai perintah pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 ~~tentang Penanggulangan Bencana~~ yang berbunyi badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIa.
- (2) BPBD Secara Ex-Officio Dijabat Oleh Sekda menyebabkan terjadinya Pejabat Pengguna Anggaran Ganda Yang Dijabat Sekretaris Daerah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada Sekretaris Daerah sesuai pasal 18 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 sebagai satu-satunya pejabat eselon IIa di kabupaten/kota, yang pada pelaksanaannya tetap mendapatkan satu tunjangan.
- (3) Keberadaan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dalam Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah diatur secara lebih rinci dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (4) Pembentukan BPBD Kota Pariaman dalam bentuk Perwako sesuai Surat Edaran Departemen Dalam Negeri RI Nomor 061/3936/SJ Tanggal 19 Desember 2008 Tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Penataan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007 perlu mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri **pada hakekatnya tidak sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana** yang berbunyi:  
" Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah **diatur dengan peraturan daerah** "
- (5) Organisasi dan Tata Kerja BPBD selain mendapat rekomendasi Menteri Dalam Negeri, kita juga perlu mendapat **rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman**, karena DPRD juga merupakan elemen penting pelaksanaan Otonomi Daerah yang dampaknya bisa lebih mudah untuk persetujuan anggaran Organisasi dan Tata Kerja BPBD dimaksud.
- (6) Pembentukan BPBD Kota Pariaman dalam bentuk Perwako disinyalir akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari terutama menyangkut keberadaan Organisasi dan juga masalah anggaran Badan itu sendiri;

### IV. SARAN

Dari Kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan kepada bapak, hal sebagai berikut :

- ✓ (1) Pembentukan BPBD Kota Pariaman dalam bentuk Perwako sebaiknya dibatalkan, dan tetap **mengacu kepada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana** yang menyatakan pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah **diatur dengan peraturan daerah** ". hal ini dikarenakan, disinyalir akan menimbulkan banyak masalah di kemudian hari terutama menyangkut anggaran Badan itu sendiri.
- ✓ (2) Dengan dibentuknya BPBD Kota Pariaman dalam bentuk Perda juga harus disertai dengan **pencabutan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tanggap darurat** penanggulangan bencana yang ada;
- (3) Dalam pengajuan Ranperda Tantang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Pariaman, juga harus disertai dengan **Ranperda tentang Penanggulangan Bencana**;



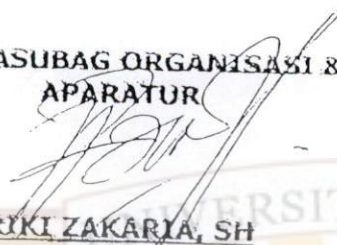
✓ (2) untuk pembahasan lebih lanjut mengenai pembentukan BPBD Kota Pariaman, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.

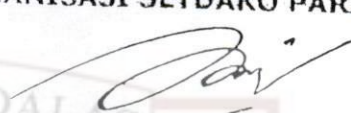
Demikian disampaikan, atas persetujuan dan pertimbangan bapak selanjutnya, saya ucapkan terima kasih.

Pariaman, 31 Agustus 2009  
Pejabat yang Melaporkan

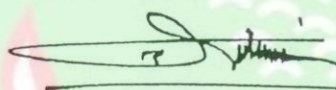
PLT. KASUBAG ORGANISASI &  
APARATUR

KEPALA BAGIAN HUKUM &  
ORGANISASI SETDAKO PARIAMAN

  
RIKI ZAKARIA, SH  
NIP. 19850520 200803 1 001

  
LINDA OSRA, SH. MH  
NIP. 19660514 199303 2 004

Mengetahui,  
ASISTEN TATA PRAJA

  
ASDI SYARIF, S.SOS  
NIP. 19511215 197903 1 004





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Jalan Siti Manggopoh No Telp. ( 0751 ) 690960 Pariaman

## NOTULEN RAPAT

Nomor : /Notulen/Pansus I/DPRD/2010

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Enam Agustus Tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Ruang Rapat Gabungan DPRD Kota Pariaman, telah dilaksanakan Rapat Pansus I dengan Tim Aksistensi Ranperda Kota Pariaman Tentang Pembahasan Lanjutan Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman.

- A. Rapat dipimpin oleh** : Priyaldi, S.Sos (Sekretaris Pansus I);
- B. Pansus I yang hadir** : 1. Mulyadi (Ketua Pansus I);  
2. Muhammad Yasin, S.Tp (Wakil Ketua Pansus I);  
3. Yusrizal, SE (Anggota Pansus I).  
4. Ibnu Hajar, SH (Anggota Pansus I)
- c. Anggota yang tidak hadir** : 1. Amirizal Tanjung (Anggota Pansus I).

### **D. Jalannya rapat :**

1. Salam dan Kata Pengantar oleh Pimpinan Rapat membuka secara resmi rapat pada pukul 11.00 Wib.
2. Pimpinan menjelaskan maksud rapat yaitu Pembahasan Lanjutan Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman.
3. Penyampaian rekomendasi dari Tim Aksistensi Ranperda yang disampaikan oleh Ketua Tim Aksistensi Ranperda, Ir. Armen, MM.

Pada dasarnya rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Aksistensi sama dengan rekomendasi yang sebelumnya yaitu mengenai Tipe BPBD yang cocok untuk Kota Pariaman yaitu Tipe B dengan alasan :

- Luas Daerah Kota Pariaman yang relatif kecil;
- Peran dan Fungsi BPBD dalam Penanggulangan Bencana  
Dalam hal penanggulangan bencana, BPBD hanya menjalankan fungsi administrasi saja. Penanganan langsung bencana tetap dikoordinir oleh Sekretariat Daerah dan Persoalan Teknis tetap dilaksanakan oleh SKPD terkait;
- Efisiensi Struktur Organisasi Kota terkait APBD Kota Pariaman.



4. Tanggapan dan Saran dari Pansus I DPRD Kota Pariaman :

a. Yusrizal, SE;

Berpendapat bahwa Tipe A merupakan tipe yang ideal untuk BPBD Kota Pariaman, tidak ada alasan untuk tidak memilih Tipe A mengingat letak kota yang berada di kawasan rawan bencana serta pesisir pantai.

b. Muhammad Yasin, S.Tp;

Tipe A merupakan tipe paling cocok untuk BPBD Kota Pariaman dengan alasan :

- Segala hal yang terkait penanggulangan bencana baik sebelum atau sesudah bencana merupakan tanggungjawab yang sangat besar, untuk itu diperlukan suatu badan yang mampu mengemban tanggungjawab tersebut.;
- Berdasarkan Laporan dari BKD Kota Pariaman terkait persoalan kualifikasi SDM diperoleh keterangan bahwa untuk pengisian struktur organisasi BPBD nantinya tidak terdapat kendala di bidang SDM (SDM yang ada memadai untuk hal tersebut);
- Persoalan efisiensi yang menjadi alasan Pihak Eksekutif untuk tidak memilih Tipe A dirasa tidak relevan, mengingat masalah penanggulangan bencana merupakan masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak.

c. Mulyadi;

Berpendapat bahwa Tipe yang cocok untuk BPBD Kota Pariaman adalah Tipe A, dimana Kota Pariaman merupakan kota yang terletak di kawasan rawan bencana yang sebagian besar penduduknya berdomicili di pesisir pantai. Jadi sangat tidak logis menjadikan persoalan efisiensi struktur organisasi terkait APBD sebagai alasan untuk tidak memilih Tipe A. Seharusnya efisiensi yang dilaksanakan adalah efisiensi yang menyentuh kepentingan masyarakat.

d. Priyaldi, S.Sos

Belum diperolehnya kesepakatan antara Pihak Eksekutif dengan Pihak Legislatif mengenai Pembahasan Ranperda SOTK BPBD Kota Pariaman terutama dalam penetapan Tipe BPBD. Maka untuk itu, direkomendasikan 2 (dua) solusi :

- Pada awal pembentukan BPBD Kota Pariaman dilaksanakan dengan memakai Tipe B, namun bila ke depannya Tipe B dirasa tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya maka Pihak Legislatif (DPRD) dapat menyurati Pihak Eksekutif untuk evaluasi kinerja dan bila dirasa perlu akan dilaksanakan perubahan tipe;



3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :
- Khusus kepada Sdr. Gubernur untuk mendayagunakan keberadaan BPBD Provinsi untuk memfasilitasi peran Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota yang bervariasi statusnya seperti Dinas, Kantor, UPT mengingat kebakaran merupakan salah satu jenis bencana yang menjadi bagian tupoksi dari BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
  - Khusus kepada Sdr. Bupati/Walikota bagi daerah Kabupaten/Kota yang tidak membentuk BPBD, penyelenggaraan penanggulangan bencana diwadahi dalam lembaga atau SKPD yang selama ini ditunjuk/ditetapkan untuk penanggulangan bencana.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. MENTERI DALAM NEGERI  
SEKRETARIS JENDERAL  
DIAH ANGGRAENI

**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan .
- Yth. Sdr. Kepala BNPB.





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN

Jalan Sili Manggopoh No Telp. ( 0751 ) 690960 Pariaman

Nomor : 005/ /DPRD/VIII/2010

Pariaman, 26 Agustus 2010

Lampiran : \_

Perihal : Laporan Pansus I Kepada Fraksi-Fraksi

Mengenai Pembahasan Ranperda SOTK

Kota Pariaman

Kepada Yth :

Sdr. Ketua dan Anggota Fraksi  
DPRD Kota Pariaman

Di

Pariaman

Berdasarkan hasil Rapat PANSUS I DPRD Kota Pariaman yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2010 jam 11.00 Wib memutuskan bahwa PANSUS I DPRD Kota Pariaman menyepakati dalam menentukan klarifikasi tipe SOTK BPBD Kota Pariaman adalah Tipe A dengan alasan sebagai berikut :

1. Dari hasil Kunjungan Kerja Pansus I DPRD Kota Pariaman ke Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman pada tanggal 26 s/d 29 Januari 2010, dimana masyarakat Yogyakarta merasakan betapa dahsyatnya gempa yang menimpa Jawa Tengah pada umumnya sehingga menelan korban lebih kurang 1000 orang dan hancurnya bangunan-bangunan rumah penduduk dan fasilitas lainnya. Sewaktu terjadinya gempa, Badan yang menangani pasca gempa berada di bawah Dinas Kesbanglinmas. Betapa repotnya Pemda Yogyakarta dan Aparat Pemerintah menangani pasca gempa karena hal tersebut. Pemda Yogyakarta akan membentuk SOTK BPBD Yogyakarta dengan Tipe A;
2. Konsultasi Pansus I ke Kantor Gubernur Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 4 Februari dengan mengikutsertakan Pihak Eksekutif (Kesbanglinmas dan Kabag Hukum). Dari hasil Konsultasi diperoleh keterangan bahwa Kota Pariaman adalah salah satu daerah dari 5 (lima) daerah di Sumatera Barat yang masuk lintasan garis merah daerah rawan bencana. Untuk itu, Kepala BPBD Propinsi Sumatera Barat menyarankan dalam menentukan klarifikasi SOTK BPBD kota Pariaman sebaiknya Tipe A;



3. Konsultasi Pansus I DPRD Kota Pariaman ke Kota Padang pada tanggal 4 Februari 2010. Pemerintah Daerah Kota Padang sangat terpuak waktu terjadinya gempa 30 September, padahal pada waktu tersebut Pemda Kota Padang baru membentuk Badan Penanggulangan Bencana. Pemerintah Daerah belum siap menghadapi bencana gempa sehingga tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. Untuk itu pemerintah Daerah Kota Padang dalam pembentukan SOTK BPBD Kota Padang memilih BPBD dengan klarifikasi A. Untuk Kota Pariaman disarankan juga memilih Klarifikasi A;

4. Konsultasi Pansus I DPRD Pariaman ke BNPB dan Departemen Sosial RI pada tanggal 14 s/d 17 Februari, dimana BNPB menyarankan kepada Pemda Kota Pariaman dalam menentukan klarifikasi Tipe SOTK BPBD dengan klarifikasi A, akan mendapat keuntungan yaitu BNPB pusat akan menanggarkan dana sebesar 5,6 milyar yang dipersiapkan untuk penanggulangan bencana jika terjadi peristiwa gempa bumi.

Selanjutnya Departemen Sosial RI memberikan penjelasan bahwa bagi daerah rawan bencana akan diberikan bantuan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan daerah lain yang bukan daerah rawan bencana. Sebaiknya Pemerintah Daerah Kota Pariaman dalam menentukan klarifikasi SOTK BPBD memilih Tipe A mengingat wilayahnya berada dalam kawasan rawan bencana.

5. Konsultasi Pansus I DPRD Kota Pariaman ke Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 18 Maret 2010. Kabupaten Padang Pariaman belum menyusun Badan Penanggulangan Bencana akan tetapi diatur dengan Peraturan Bupati. Kabupaten Padang Pariaman menyampaikan saran sebaiknya Pemko Kota Pariaman dalam menentukan klarifikasi Tipe SOTK BPBD sebaiknya Tipe A. Hal ini dikarenakan Kota Pariaman termasuk daerah rawan gempa, dan apabila nantinya terjadi gempa/bencana lainnya Pemko Pariaman juga dapat bekerja sama dengan Pemda Kabupaten Padang Pariaman dalam penanggulangan pasca gempa/bencana;

6. Konsultasi ke Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 14 Juli 2010 ke Biro Hukum Propinsi Sumatera Barat, menyarankan untuk menentukan klarifikasi Tipe SOTK BPBD sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada :

- kondisi keuangan daerah;

- kondisi keuangan daerah;
- kebutuhan daerah;
- beban kerja;

Apabila dalam pembahasan pembentukan BPBD tidak diperoleh kata sepakat sebaiknya divoting karena bagaimanapun Badan ini sangat dibutuhkan keberadaanya.

#### Kesimpulan :

Pansus ! DPRD Kota Pariaman berdasarkan hasil Konsultasi dan Rapat-Rapat Pansus I memutuskan merekomendasikan SOTK BPBD Kota Pariaman dengan Tipe A, namun demikian untuk Keputusan akhir sepenuhnya diserahkan kepada Keputusan Akhir Fraksi-Fraksi (Stemmotivering)

Demikian disampaikan atas perhatian dan pertimbangan diucapkan terima kasih.

#### PANITIA KHUSUS I DPRD KOTA PARIAMAN,

- |                          |               |         |
|--------------------------|---------------|---------|
| 1. Mulyadi               | : Ketua       | (.....) |
| 2. Muhanomad Yasin, S.Tp | : Wakil Ketua | (.....) |
| 3. Priyaldi, S.Sos       | : Sekretaris  | (.....) |
| 4. Ibnu Hajar, SH        | : Anggoia     | (.....) |
| 5. Yusrizal, SE          | : Anggota     | (.....) |
| 6. Amrizal Tanjung       | : Anggota     | (.....) |







KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 September 2010

Kepada  
Yth. 1. Sdr. Gubernur  
2. Sdr. Bupati  
3. Sdr. Walikota

di  
Seluruh Indonesia

Nomor : 360 / 3622 / SJ  
Sifat : Amat segera

Lampiran :  
Hal :

Peran BPBD Provinsi dalam memfasilitasi Pemadam Kebakaran di Kabupaten/Kota dan kelembagaan yang menangani penanggulangan bencana bagi Kabupaten/Kota yang tidak membentuk BPBD

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan rekomendasi Rapat Fasilitas Mekanisme Penanggulangan Bencana Bagi Daerah Yang Tidak Membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta rekomendasi Rapat Fasilitas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Daerah, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota penanganan bencana kebakaran diselenggarakan oleh Dinas/Kantor/UPT Pemadam Kebakaran (sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing). Bencana kebakaran adalah kebutuhan bencana non alam yang merupakan tupoksi BPBD. Mengingat keberadaan dan pembinaan SKPD yang menangani kebakaran tersebut selama ini belum di fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi sehingga dipandang perlu BPBD Provinsi yang telah dibentuk di masing-masing Provinsi diberikan arahan tugas untuk memfasilitasi keberadaan SKPD yang menangani kebakaran. Hal ini sejalan dengan maksud PP Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilayah Provinsi, Gubernur selaku wakil pemerintah menjalankan tugas pemerintahan, dimana dalam hal urusan penanganan bencana Gubernur dapat mewakili Pemerintah.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota sebagaimana pasal 36 Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 dan Bab III, point A Nomor 4 lampiran Peraturan Kepala BNPE Nomor 3 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD :  
Untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah, diwadahi dengan lembaga atau instansi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana.
  - b. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah :  
Dalam melaksanakan fungsi dimaksud, pada prinsipnya adalah ada instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan bila terjadi bencana ada instansi atau lembaga yang menanganinya